



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak dasar masyarakat secara layak;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dirumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat** : 1. **Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
2. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);**
3. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);**
4. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**
5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**
6. **Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);**
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);**
8. **Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 7 Seri E);**
9. **Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7);**

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 40);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 62 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 3 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Belitung Timur dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target program pembangunan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang memuat matriks prioritas program dalam penanggulangan kemiskinan.

## BAB II RPKD

### Pasal 2

- (1) RPKD memuat gambaran umum kondisi umum Daerah, profil kemiskinan Daerah, prioritas program, dan lokasi prioritas.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD adalah untuk:

- a. merumuskan rencana dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan; dan
- c. memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

### Pasal 4

Tujuan penyusunan RPKD adalah sebagai pedoman dalam:

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Daerah;
- b. membangun konsensus bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
- e. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- f. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- g. mewujudkan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

## **BAB IV SISTEMATIKA**

### **Pasal 5**

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. kondisi umum Daerah;
  - c. profil kemiskinan Daerah;
  - d. prioritas program;
  - e. lokasi prioritas; dan
  - f. penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan RPKD, dan sistematika penulisan RPKD.
- (3) Kondisi umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi geografi dan demografi wilayah, kawasan strategis, serta struktur dan perekonomian.
- (4) Profil kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memuat konsep kemiskinan, analisis karakteristik kemiskinan secara makro dan mikro.
- (5) Prioritas program sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memuat pengembangan logika program, analisis keterkaitan, analisis kondisi fiskal, serta analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi.
- (6) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e memuat isu strategis dan lokasi prioritas.
- (7) Penutup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f memuat matriks prioritas program.

## **BAB V PEMANTAUAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 6**

Bupati melalui TKPK melakukan pemantauan pelaksanaan RPKD.

### **Pasal 7**

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan RPKD kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal **26** Februari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,



**KAMARUDIN MUTEN**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal **26** Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



**ERNA KUNONDO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR **6**



**RENCANA PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH  
(RPKD) KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR TAHUN  
2025-2029**

**TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH**

**TAHUN 2025**



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

---

### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan RPKD ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan lintas sektor, lintas perangkat daerah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah.

Melalui RPKD ini, diharapkan dapat terwujud sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga nonpemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Penyusunan dokumen ini juga selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan RPKD ini, baik melalui penyediaan data, masukan kebijakan, maupun partisipasi aktif dalam forum-forum konsultasi publik. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Manggar,  
2025

KETUA TKPK BELITUNG TIMUR,

**KHAIRIL ANWAR**

DAFTAR ISI



# RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

---

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
<b>BABI PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan	7
1.3. Dasar Hukum	10
1.4. Sistematika Penulisan	12
<b>BAB II KONDISI UMUM DAERAH</b>	<b>13</b>
2.1. Geografi dan Demografi Wilayah	13
2.2. Kawasan Strategis	16
2.3. Struktur dan Perekonomian	18
<b>BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH</b>	<b>35</b>
3.1. Konsep Kemiskinan	35
3.2. Analisis Karakteristik Kemiskinan	37
<b>BAB IV PRIORITAS PROGRAM</b>	<b>85</b>
4.1. Pengembangan Logika Program (Theory of Change)	85
4.2. Analisis Keterkaitan (Causal Relationship)	92



# RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

---

	4.3. Kondisi Fiskal .....	95
	4.4. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi .....	111
BAB V	LOKASI PRIORITAS .....	113
113	5.1. Isu Strategis .....	
114	5.2. Lokasi Prioritas .....	
BAB VI	PENUTUP .....	131
	6.1. Matriks Prioritas Program .....	132



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Isu kemiskinan adalah isu strategis dan menjadi masalah utama semua negara. Oleh sebab itu, masalah kemiskinan secara khusus dituangkan kedalam tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

Penanganan masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan menjadi tanggungjawab semua pihak baik itu pemerintah Pusat, Daerah beserta seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha. Karena sifatnya yang tematik dan multidimensi tersebut, maka agar penanganan masalah kemiskinan menjadi efektif, maka perlu dilakukan koordinasi, sinergi antar semua pihak, dan integrasi antar program-program lintas sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dalam proses implementasinya dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Percepatan dalam penurunan angka kemiskinan telah diupayakan melalui peningkatan akselerasi penanggulangan kemiskinan, yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang percepatan program penanggulangan kemiskinan. Dalam Perpres Nomor 166 Tahun 2016 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengawal pelaksanaan Program Perlindungan Sosial ditingkat Pusat, sedangkan level daerah dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Sebagai langkah untuk memperkuat percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah pusat sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai pedoman bagi Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah daerah sampai ke level Pemerintah Desa mengoptimalkan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Selain aspek kebijakan, salah satu aspek penting yang mendukung rencana penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

---

sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya, dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatiannya pada kondisi kemiskinan di daerah masing-masing. Data kemiskinan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan wilayah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka. Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak Tahun 1998-2019 terus menurun hingga menyentuh 1 digit. Namun pada Tahun 2020 ditengah pandemic global COVID-19 yang melanda seluruh dunia, tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan Kembali teruji. Angka kemiskinan nasional kembali menyentuh 2 digit (10,19%) di bulan September 2020. Untuk mengatasi hal ini, berbagai kebijakan telah diterbitkan untuk membantu pengentasan kemiskinan. Selain itu berbagai program penanggulangan kemiskinan diperkuat dan dimaksimalkan untuk memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan terutama akibat pandemi agar tidak makin jatuh ke jurang kemiskinan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah penduduk miskin pada Tahun 2024 (Maret 2024) sebesar 69.950 jiwa atau 4,55%, angka ini meningkat sebesar 0,03% persen dari tahun sebelumnya pada Tahun 2023 (Maret 2023) yang berjumlah sekitar 68.690 jiwa atau sebesar 4,52%. Garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024 sebesar Rp. 908.397,-. Dimana indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada Tahun 2024 mencapai 0,66% Angka ini meningkat dibanding Tahun 2023 yang mencapai 0,63 dengan indeks keparahan kemiskinan (P2) pada Tahun 2024 mencapai 0,16, Angka ini meningkat dibanding Tahun 2023 yang mencapai 0,13.

Untuk Kabupaten Belitung Timur sendiri, jumlah penduduk miskinnya terus mengalami menurun dari Tahun 2023 sebanyak 8.890 jiwa (6,73%) menjadi 8.500 jiwa (6,36%) pada Tahun 2024. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada Tahun 2023 sebesar 0,91 mengalami penurunan dari Tahun 2024 yang mencapai 0,64 dengan indeks keparahan kemiskinan (P2) pada Tahun 2023 mencapai 0,23 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 0,15 pada Tahun 2024.

Untuk data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belitung Timur juga mengalami penurunan Dimana menurut data Badan Pusat Statistik angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belitung Timur sebesar 1,60% dan menurun di tahun 2022 menjadi sebesar 0,81%, kemudian turun Kembali menjadi 0,38% pada tahun 2023 dan turun Kembali menjadi 0,35% pada tahun 2024.



## **RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

---

Dari data statistik diatas, angka kemiskinan di Kabupaten Belitong Timur menunjukkan trend yang menurun, dimana kondisi ini juga terjadi pada kondisi umum kemiskinan di Indonesia dimana jumlah penduduk miskin semakin menurun walaupun dengan tren yang landai. Namun yang perlu dikaji lebih jauh adalah upaya dan rencana apa yang harus dilakukan untuk mengeluarkan masyarakat miskin Indonesia dari garis kemiskinan, agar mereka memiliki ketahanan ekonomi rumah tangga yang tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi. Terkait hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti misalnya menyusun program penanggulangan kemiskinan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Seperti yang disebutkan diatas, kemiskinan adalah masalah multidimensi dan masalah yang kompleks. Kemiskinan berdampak dan disebabkan oleh beragam faktor seperti ekonomi, politik, sosial budaya, agama, sumberdaya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, bencana alam/non alam, dan teknologi informasi. Selain itu, disebutkan diawal bahwa kemiskinan itu bersifat tematik, oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan tidak dapat diberlakukan secara universal antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kearifan lokal dan karakteristik wilayah harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan strategi penanggulangan kemiskinan. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan, sehingga diharapkan dokumen tersebut dapat dijadikan acuan oleh semua pihak dalam upaya pencapaian tujuan yaitu menurunkan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan.

Sesuai dengan amanat Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Belitong Timur sebagai rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan, merupakan bagian dari penyusunan RPJMD bidang Penanggulangan Kemiskinan, sehingga seluruh Program yang tertuang dalam RPKD juga tertuang dalam RPJMD, dengan demikian diharapkan percepatan penanggulangan kemiskinan akan dapat terwujud sesuai dengan yang ditetapkan.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

---

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).

Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Identifikasi penduduk miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi.

Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2024 tentang Percepatan Penghapusan kemiskinan Ekstrem bahwa Para Bupati/ Walikota diinstruksi untuk :

1. Menjabarkan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota guna mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk untuk pemutakhiran data penerima berbasis nama dan alamat (by name by address).
2. Melakukan koordinasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
3. Mendukung program Sekolah Rakyat di wilayah kabupaten/kota, yang meliputi penyiapan lahan, perizinan, serta penyediaan guru dan tenaga kependidikan, sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
4. Menyampaikan laporan hasil optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

---

### 1.2. Maksud dan Tujuan

#### 1.2.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk:

1. Merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem;
2. Menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
3. Memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

#### 1.2.2. Tujuan

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:

1. Menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
2. Membangun konsensus bersama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
3. Memperkuat pengarusutamaan (mainstreaming) penanggulangan kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
4. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Sasaran penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam kebijakan 5 tahunan, sesuai periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Belitong Timur, bertujuan untuk :

1. Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Memperkuat kapasitas masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan;
3. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa.

### 1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir miskin;



## **RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

---

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
12. Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan penghapusan Kemiskinan Ekstrem
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : HK.00.03-388 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan secretariat Tim Korodinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Belitung Timur periode 2025-2029.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

---

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika

#### BAB II KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1. Geografi dan Demografi Wilayah
- 2.2. Kawasan Strategis
- 2.3. Struktur Perekonomian

#### BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

- 3.1. Konsep Kemiskinan
- 3.2. Analisis Karakteristik Kemiskinan

#### BAB IV PRIORITAS PROGRAM

- 4.1. Pengembangan Logika Program (Theory of Change)
- 4.2. Analisis Keterkaitan (Causal Relationship)
- 4.3. Analisis Kondisi Fiskal
- 4.4. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi

#### BAB V LOKASI PRIORITAS

- 5.1. Isu Strategis



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

---

5.2. Lokasi Prioritas

### BAB VI PENUTUP

6.1. Matriks Prioritas Program



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

### BAB II KONDISI UMUM DAERAH

#### 2.1. Geografi dan Demografi Wilayah

##### 2.1.1. Geografi

Kabupaten Belitung Timur adalah sebuah kabupaten yang terletak di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung dengan ibukota terletak di Manggar. Kabupaten Belitung Timur dibentuk pada tahun 2003 sebagai wilayah hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Wilayahnya sendiri memiliki luas sebesar 17.967,93 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas darat 2.506,90 km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut 15.461,03 km<sup>2</sup>. Kabupaten Belitung Timur termasuk kedalam wilayah kepulauan dengan 149 pulau besar dan kecil yang secara administratif terbagi menjadi tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Simpang Pesak, dan Kecamatan Dendang dengan total 39 desa.

Adapun batas-batas geografis Kabupaten Belitung Timur seperti pada Gambar di



bawah.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2024

Secara Geografis Kabupaten Belitung Timur terletak diantara 1070 45'-1080 18' Bujur Timur dan 020 30'-030 15' Lintang Selatan. Posisi geografis Kabupaten Belitung Timur yang berada di jalur Selat Karimata, merupakan salah satu potensi tersendiri yang dimiliki wilayah ini.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

### 2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk dapat menjadi nilai tambah sekaligus beban bagi pemerintah apabila tidak ditangani dengan baik. Penduduk yang berkualitas dapat memperkuat produksi dan menjadi potensi ekonomi. Sebaliknya, penambahan penduduk yang tidak terkendali akan menjadi bom waktu yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hingga bermuara pada terhambatnya pembangunan. Masalah kesenjangan sosial, penyediaan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan bahkan hingga ke perumahan adalah sebagian masalah yang ditimbulkan dari keadaan tersebut.

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 sampai dengan semester 2 (dua) berjumlah 132.495 jiwa, terdiri dari 68.071 laki-laki dan 64.424 perempuan, Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2024 sampai Semester I Terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya sebanyak 374 orang. Untuk data detail dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Daerah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah / Total	
1	Manggar	9	229	20.699	19.888	40.587	177,24
2	Gantung	7	546,3	16.066	14.869	30.935	56,63
3	Dendang	4	243,3	5.722	5.346	11.068	45,49
4	Kelapa Kampit	6	498,5	10.040	9.511	19.551	39,22
5	Damar	5	236,9	7.085	6.800	13.885	58,61
6	Simpang Renggang	4	390,7	3.965	3.747	7.712	19,74
7	Simpang Pesak	4	362,2	4.494	4.263	8.757	24,18
Jumlah		39	2.506,90	68.071	64.424	132.495	51,54

Sumber : PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Semester II 2024

Struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Belitung Timur di dominasi oleh penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) dengan porsi sebesar 69,73% disusul dengan usia muda (0 – 14 tahun) sebesar 23,18% dan usia tua (65+) sebesar 7,09%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025-2029

Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024

Struktur Usia	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	4.522	4.354	8.876
5 - 9	5.388	4.939	10.327
10 - 14	5.974	5.531	11.505
15 - 19	5.338	5.090	10.428
20 - 24	5.810	5.466	11.276
25 - 29	4.991	4.757	9.748
30 - 34	4.941	4.515	9.456
35 - 39	4.941	4.639	9.580
40 - 44	5.854	5.510	11.364
45 - 49	5.526	4.873	10.399
50 - 54	4.600	3.989	8.589
55 - 59	3.419	3.070	6.489
60 - 64	2.530	2.528	5.058
65 - 69	1.781	2.022	3.803
70 - 74	1.340	1.527	2.867
75 +	1.116	1.614	2.730
<b>TOTAL</b>	<b>68.071</b>	<b>64.424</b>	<b>132.495</b>

Sumber : PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Semester II 2024

### 2.2. Kawasan Strategis

Pengembangan wilayah Kabupaten Belitong Timur dilakukan berdasarkan penataan ruang yang memiliki potensi yang penting untuk dikembangkan dengan beberapa kebijakan, diantaranya:

- Pengembangan kawasan-kawasan perdesaan sebagai sentra penghasil komoditas unggulan yang berbasis potensi pariwisata, agropolitan, dan potensi bahari dalam suatu kawasan perdesaan yang terpadu;
- Pengembangan kawasan-kawasan perkotaan sebagai sentra pelayanan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi seluruh wilayah secara berjenjang;



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

---

- c. Pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil di setiap kecamatan, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari, industri perikanan, serta mempermudah jangkauan pelayanan publik dan penguatan struktur ekonomi bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat secara optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta berperan penting dalam aksesibilitas wilayah; dan
- e. Pembangunan dan pengembangan kawasan Strategis pertumbuhan ekonomi kabupaten secara terpadu yang menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan Kawasan warisan geologi melalui konservasi, edukasi dan pengembangan perekonomian masyarakat berkelanjutan.

Beberapa kawasan yang telah dan berpotensi untuk dikembangkan, antara lain:

- a. Kawasan Perkotaan Manggar di Kecamatan Manggar dan Kecamatan Damar
- b. Kawasan Perkotaan Gantung di Kecamatan Gantung
- c. Kawasan Industri Air Kelik di Kecamatan Damar
- d. Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan Gantung dan Manggar dengan luas  $\pm 3.402\text{Ha}$ ;
- e. Kawasan Pelabuhan Dendang di Kecamatan Dendang;
- f. Kawasan Pariwisata Burung Mandi di Kecamatan Damar;
- g. Kawasan Wisata Kuala Tambak di Kecamatan Damar;
- h. Kawasan Wisata Pantai Punai di Kecamatan Simpang Pesak; dan
- i. Rencana dan peluang investasi perikanan (tambak) di Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Gantung dan Kecamatan Damar;
- j. Rencana dan peluang investasi pariwisata di Geosite Kabupaten Belitung Timur.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

Tabel Luasan Kawasan Budidaya di Kecamatan Kabupaten Belitung Timur

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Manggar	14.442
2	Damar	17.070
3	Kelapa Kampit	36.212
4	Gantung	50.932
5	Simpang Renggiang	32.388
6	Simpang Pesak	21.859
7	Dendang	39.209
TOTAL		212.112

Sumber: RTRW Kabupaten Belitung Timur, 2014 – 2034

Kawasan budidaya di Kabupaten Belitung Timur meliputi kawasan pertahanan keamanan, kawasan hortikultura, kawasan hutan produksi, kawasan industri, PLTU, kawasan pariwisata, kawasan perikanan laut, kawasan perkebunan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan kawasan tanaman pangan.

### 2.3. Struktur dan Perekonomian

#### 2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

##### 2.1.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah pada tahun tertentu. Dengan kata lain, PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya guna menciptakan nilai tambah bagi masing-masing sektor perekonomian. Lebih jauh, kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat digambarkan dengan melihat capaian PDRB yang dihasilkan baik atas dasar harga berlaku (AdHB) tahun berjalan, maupun atas dasar harga konstan (AdHK). Untuk melihat peranan masing-masing kategori/lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut :



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

Tabel Distribusi Persentase masing-masing Sektor terhadap PDRB Kabupaten Belitung Timur  
Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha 2020-2024

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2020	2021	2022*	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,9	25,4	25	25,7	27,29
B	Pertambangan dan Penggalian	14,49	14,96	13,34	11,68	11,69
C	Industri Pengolahan	20,26	21,87	23,73	23,41	20,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,08	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	8,14	7,84	7,44	7,73	7,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,66	10,4	11,35	11,58	11,41
H	Transportasi dan Pergudangan	2,06	1,95	2,07	2,19	2,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,49	2,45	2,6	2,75	2,88
J	Informasi dan Komunikasi	1,28	1,19	1,18	1,27	1,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,49	0,49	0,51	0,56	0,56
L	Real Estat	3,13	2,88	2,85	2,89	2,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,28	0,29	0,31	0,32
O	Administrasi Pemerintahan	5,85	5,52	5,04	5,21	5,65
P	Jasa Pendidikan	2,77	2,62	2,49	2,56	2,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,52	1,52	1,45	1,49	1,48
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,58	0,56	0,56	0,58	0,62

Catatan:

\*: Angka sementara (preliminary figures)

\*\* : Angka sangat sementara (very preliminary figures)

Berdasarkan data distribusi persentase PDRB Kabupaten Belitung Timur tahun 2020–2024 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, terlihat bahwa perekonomian daerah ini masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada 2020 kontribusinya mencapai 25,90%, sedikit menurun pada 2021 menjadi 25,40%, dan terus turun hingga 25,09% pada 2022. Namun, pada 2023 dan 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 25,74% dan 27,29%. Angka ini menegaskan peran sektor primer sebagai penopang utama ekonomi daerah.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025-2029

---

Sektor Industri Pengolahan berada di posisi kedua dengan kontribusi 20,26% pada 2020, naik menjadi 21,87% di 2021, kemudian 23,73% pada 2022. Meski demikian, tahun 2023 turun menjadi 21,94% dan kembali turun ke 20,83% pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan nilai tambah produksi.

Sementara itu, Pertambangan dan Penggalian yang berkontribusi 14,49% pada 2020, terus menurun menjadi 13,96% (2021), 13,34% (2022), 11,86% (2023), dan 11,69% (2024). Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya ketergantungan pada sektor ekstraktif.

Beberapa sektor lain juga mencatat kontribusi penting, seperti Perdagangan Besar dan Eceran yang stabil di kisaran 10,46%–11,41%, serta Konstruksi di kisaran 7,64%–8,14%. Sektor Administrasi Pemerintahan juga cukup besar perannya, meskipun trennya menurun dari 5,85% (2020) menjadi 5,02% (2024).

Sektor dengan kontribusi lebih kecil seperti Transportasi dan Pergudangan (1,95%–2,26%), Akomodasi dan Makan Minum (2,49%–2,85%), serta Informasi dan Komunikasi (1,18%–1,35%) menunjukkan potensi untuk dikembangkan, terutama dalam mendukung pariwisata dan konektivitas wilayah.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa Belitong Timur masih sangat bergantung pada sektor primer, namun memiliki peluang besar untuk memperkuat industri pengolahan, perdagangan, jasa pariwisata, dan sektor kreatif sebagai upaya diversifikasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

### 2.1.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Untuk Kepentingan berbagai analisis ekonomi makro masing-masing daerah, pada umumnya PDRB dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan suatu tahun dasar (tahun 2010). PDRB atas dasar harga konstan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku adalah untuk mengetahui nilai PDRB berdasarkan harga pada tahun penghitungan (besarnya pergerakan harga). Nilai ekonomi Kabupaten Belitong Timur untuk pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2020 hingga 2024 berfluktuatif, hal ini dapat terlihat pada gambar dibawah ini.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025-2029

Gambar 2.4  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020 – 2024



Sumber Data : BPS Belitong Timur

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitong Timur pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dengan fluktuasi yang mencerminkan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi daerah ini. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -0,63 persen. Penurunan ini sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi, menurunkan permintaan pariwisata, membatasi pergerakan masyarakat, serta mempengaruhi sektor utama seperti pertambangan, perikanan, dan perdagangan.

Memasuki tahun 2021, terjadi lonjakan pertumbuhan yang cukup tinggi menjadi 4,56 persen. Hal ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi, mulai pulihnya sektor pariwisata, meningkatnya aktivitas perdagangan, serta adanya program pemerintah yang mendorong pemulihan ekonomi daerah. Meski demikian, pada tahun 2022, pertumbuhan sedikit melambat menjadi 3,78 persen. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti gejolak harga komoditas global, biaya logistik yang meningkat, dan beberapa kendala struktural di tingkat daerah.

Tahun 2023 menjadi periode yang positif kembali, dengan pertumbuhan meningkat ke 4,70 persen. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan membaiknya investasi, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan produksi di sektor unggulan. Namun, tren positif ini tidak berlanjut di 2024, di mana pertumbuhan kembali melemah drastis menjadi -0,03 persen atau hampir stagnan. Perlambatan ini dapat mengindikasikan adanya tekanan dari sisi permintaan maupun penawaran, misalnya akibat ketidakpastian ekonomi global, penurunan harga komoditas, atau melemahnya daya beli masyarakat.



## **RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029**

---

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa ekonomi Belitung Timur cukup responsif terhadap perubahan kondisi eksternal, namun masih rentan terhadap guncangan global maupun domestik



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

### BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

#### 1.1. Konsep Kemiskinan

Konsep atau definisi kemiskinan yang digunakan pada dokumen ini menggunakan konsep kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, dimana dinyatakan bahwa Kemiskinan Absolut adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum yaitu pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan Pokok minimum tersebut, kemudian direpresentasikan kedalam jumlah rupiah minimum, yang kemudian ditetapkan sebagai garis kemiskinan. Berdasarkan garis tersebut, maka penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan dapat digolongkan sebagai penduduk miskin.

Dengan menggunakan garis kemiskinan absolut maka kita dapat membandingkan kemiskinan secara umum dan menilai efek dari kebijakan penanggulangan kemiskinan antar waktu, serta memperkirakan dampak dari suatu program terhadap angka kemiskinan (misalnya, pemberian kredit usaha kecil, pemberian bantuan sosial dan lain-lain). Bank Dunia sendiri menggunakan garis kemiskinan absolut untuk melihat dan membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Dengan adanya garis kemiskinan absolut tersebut maka akan mempermudah penentuan sasaran dan pengalokasian sumber daya sosial serta anggaran dalam proses ngentasan kemiskinan. Adapun Pemerintah Indonesia menggunakan ukuran pendapatan US\$ 1 perkapita per hari sebagai garis kemiskinan, yang artinya penduduk yang pendapatannya dibawah US\$ 1 perkapita per hari dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Kemiskinan adalah masalah multidimensi, artinya tidak tercapainya standar hidup layak oleh seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tidak memenuhi kualitas SDM, kurangnya kesempatan produktif atau tidak terpenuhinya perlindungan sosial. Lebih jauh lagi terkait rendahnya kualitas SDM misalnya, hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal seperti minimnya akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya. Melihat luasnya lingkup sektor yang mempengaruhi kemiskinan, maka diperlukan langkah strategis, sistematis dan terintegrasi dari seluruh pihak yang terlibat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Dalam strategi percepatan penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan



## **RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

---

usaha ekonomi mikro, kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Secara garis besar, percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil.
4. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.



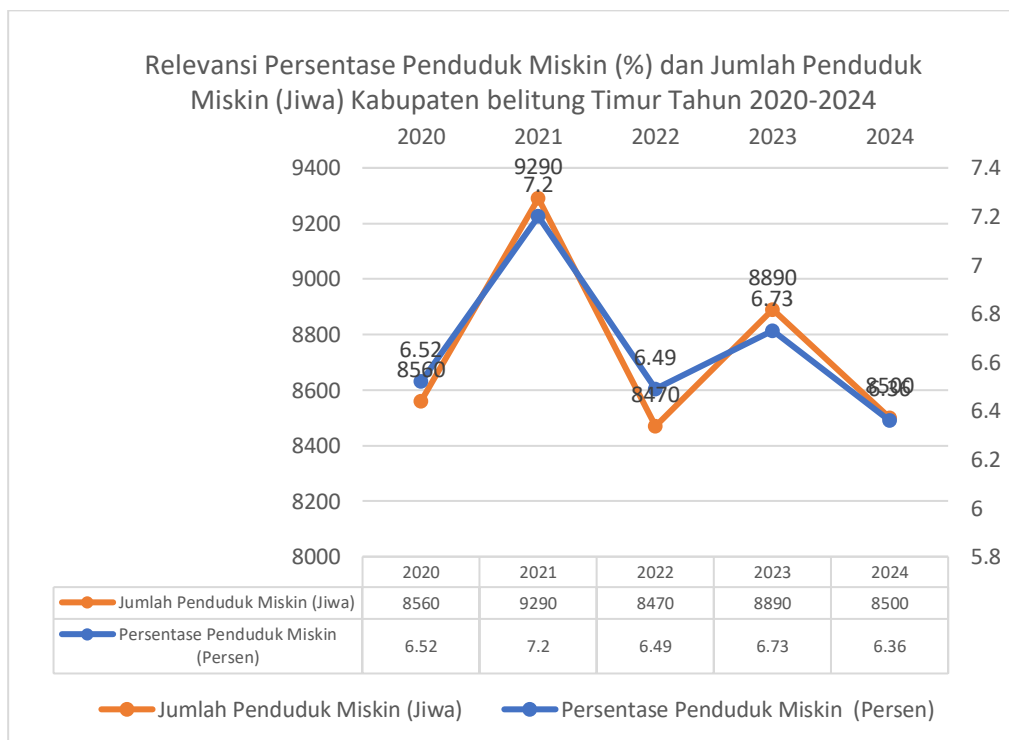
## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

### 3.2. Analisis Karakteristik Kemiskinan

#### 3.2.1 Kondisi Umum Kemiskinan Daerah (Kemiskinan Konsumsi)

Kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Belitong Timur sendiri dapat dijabarkan sebagai berikut: persentase penduduk miskin Kabupaten belitong Timur tahun 2024 mencapai 6,36%, angka ini menurun sebesar 0,37% dari tahun 2021 diangka 6,73%. Capaian pada tahun 2024 ini belum mencapai target indikator penurunan angka kemiskinan yang telah di tetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026, dimana pada angka kemiskinan ditargetkan diangka 6,11%. Perkembangan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut

Gambar 3.1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020-2024



Sumber data : BPS



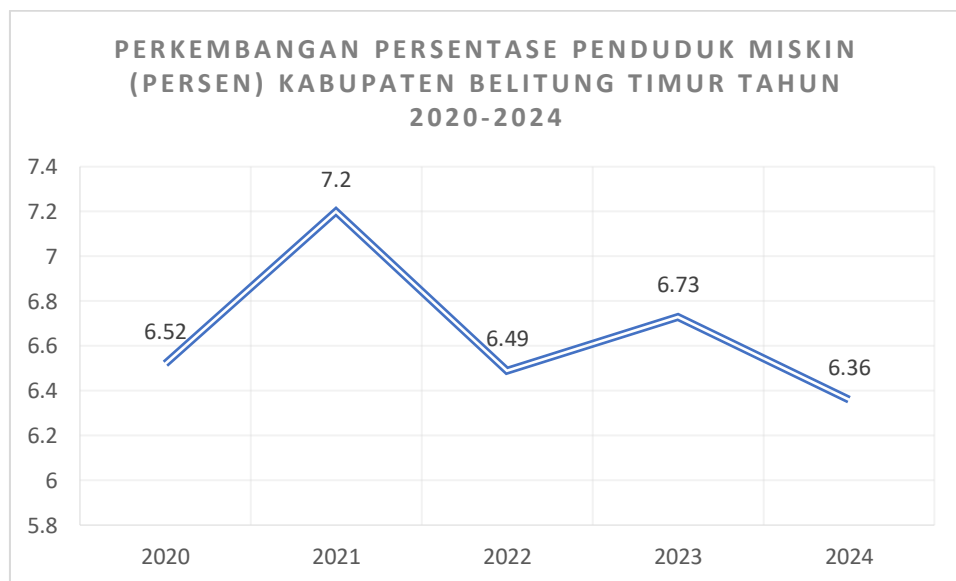
## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Beberapa hal yang dapat dijabarkan dari tabel diatas adalah :

a. Persentase Penduduk Miskin

Kesenjangan ekonomi adalah adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Ketimpangan ekonomi dan tingginya tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan, tidak terkecuali Kabupaten Belitong Timur. Terkait dengan perkembangan persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.2 Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020-2024



Sumber data : BPS

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitong Timur periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,52 persen. Angka ini mengalami kenaikan signifikan pada 2021 menjadi 7,2 persen, yang kemungkinan besar merupakan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19. Pandemi tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, terbatasnya aktivitas ekonomi, serta terganggunya sektor usaha kecil dan menengah.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

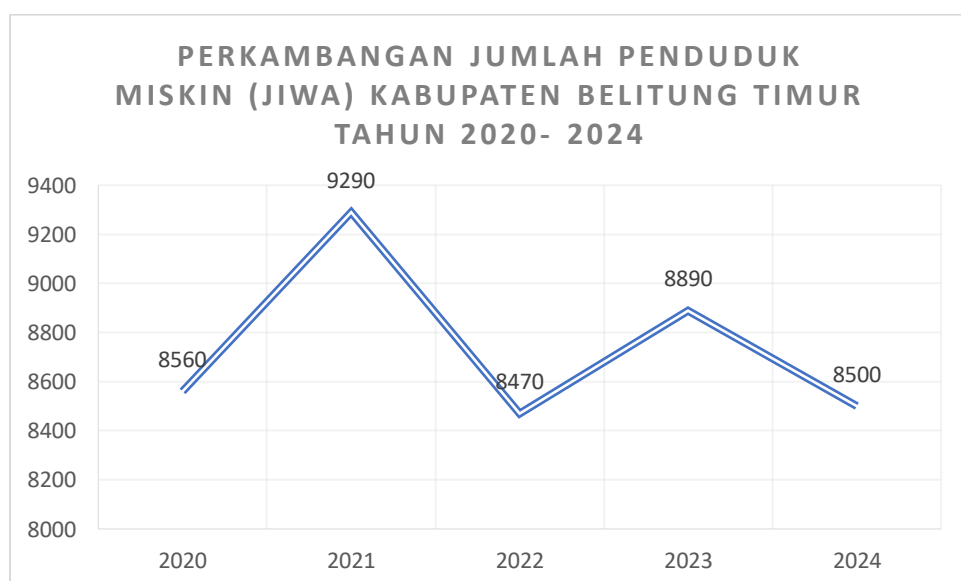
Memasuki tahun 2022, persentase penduduk miskin turun cukup tajam menjadi 6,49 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi seiring mulai pulihnya aktivitas perdagangan, pariwisata, dan sektor produktif lainnya. Namun, pada 2023 angka ini kembali meningkat menjadi 6,73 persen. Kenaikan ini diduga dipicu oleh tekanan inflasi, kenaikan harga bahan pokok, dan gejolak ekonomi global yang memengaruhi daya beli masyarakat.

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin kembali turun menjadi 6,36 persen. Hal ini menunjukkan adanya tren perbaikan, kemungkinan berkat program pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan, dukungan sosial, serta peningkatan peluang kerja. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Belitong Timur sangat sensitif terhadap faktor eksternal dan memerlukan strategi pengentasan yang berkelanjutan.

### b. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi persentase tingkat kemiskinan dalam suatu daerah. Semakin tinggi jumlah penduduk miskin, maka semakin besar persentase tingkat kemiskinan relatif terhadap jumlah penduduk. Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020-2024 terlihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020-2024





## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Sumber data : BPS

Pada Gambar 3.3 diatas terlihat bahwa Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitong Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 8.560 jiwa. Angka ini melonjak cukup tajam pada 2021 menjadi 9.290 jiwa, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas ekonomi, penurunan sektor pariwisata, dan berkurangnya peluang kerja menjadi faktor utama meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut.

Pada 2022, terjadi penurunan signifikan menjadi 8.470 jiwa. Perbaikan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi, peningkatan mobilitas masyarakat, serta dukungan program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial. Namun, pada 2023 jumlah penduduk miskin kembali naik menjadi 8.890 jiwa. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh tekanan inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta gejolak ekonomi global yang memengaruhi daya beli masyarakat.

Memasuki 2024, jumlah penduduk miskin menurun kembali menjadi 8.500 jiwa. Penurunan ini menunjukkan adanya keberhasilan program pengentasan kemiskinan, dan penguatan sektor ekonomi lokal.

### c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

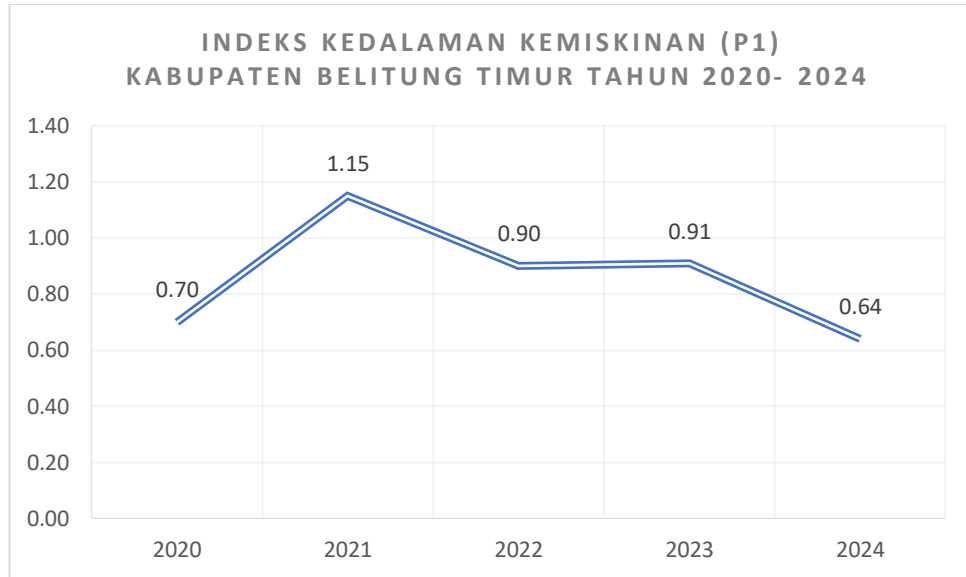
Indeks Kedalaman Kemiskinan dikenal dengan istilah P1 adalah kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi angka P1 menunjukkan semakin tinggi tingkat kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinan. Angka P1 digunakan sebagai gambaran dalam menentukan prioritas intervensi pemerintah daerah terhadap program-program penanggulangan kemiskinan.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Gambar 3.4

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitong Timur periode Tahun 2020-2024



Sumber data : BPS

Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitong Timur periode 2020–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan kecenderungan menurun di akhir periode. Pada tahun 2020, indeks P1 tercatat sebesar 0,70, mencerminkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan yang relatif rendah. Namun, pada 2021 terjadi peningkatan signifikan menjadi 1,15. Lonjakan ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, kemungkinan dipengaruhi oleh penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi.

Memasuki 2022, indeks P1 menurun menjadi 0,90, menunjukkan adanya perbaikan daya beli dan penurunan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tahun 2023, angkanya relatif stabil di 0,91, yang berarti kondisi kedalaman kemiskinan tidak banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2024, indeks P1 kembali menurun cukup signifikan menjadi 0,64. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, yang bisa jadi merupakan hasil dari program bantuan



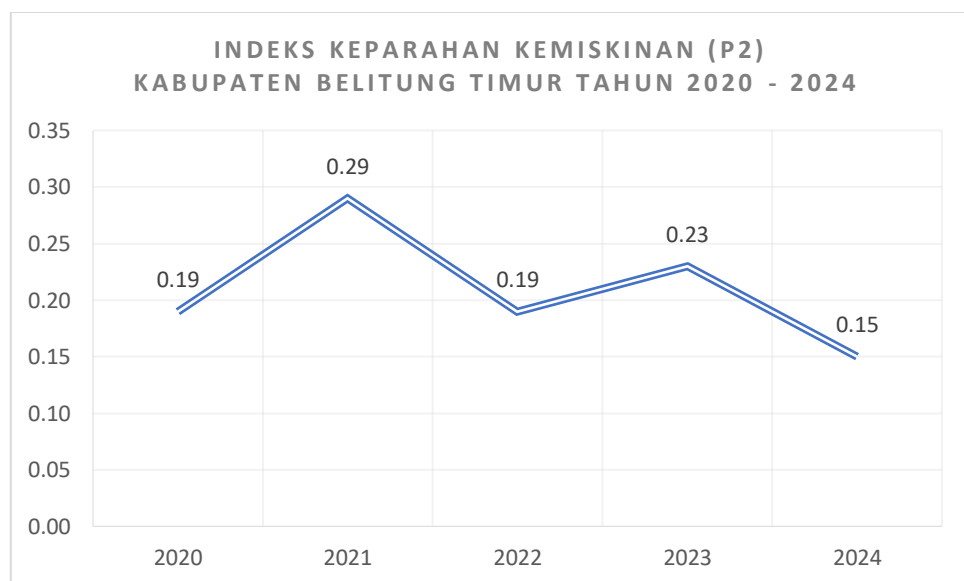
## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

sosial, peningkatan lapangan kerja, serta pemulihan ekonomi daerah. Secara umum, tren ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan di Belitong Timur, meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan agar penurunan ini konsisten. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan yang dikenal dengan istilah P2, adalah kesenjangan pengeluaran antar sesama masyarakat miskin atau perbandingan jumlah pengeluaran RTM (Rumah Tangga Miskin) yang satu dibandingkan dengan RTM lainnya dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka P2 berarti tingkat kesenjangan pengeluaran/belanja diantara masyarakat miskin semakin besar, sebaliknya semakin kecil P2, berarti kesenjangan pengeluaran antar masyarakat miskin dalam suatu wilayah juga semakin kecil.

Gambar 3.5

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitong Timur periode Tahun 2020-2024



Sumber data : BPS

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitong Timur pada periode 2020–2024 memperlihatkan pola fluktuatif dengan kecenderungan membaik di akhir periode. Pada 2020, nilai indeks berada di angka 0,70, yang berarti rata-rata penduduk miskin memiliki jarak pengeluaran relatif dekat dengan garis kemiskinan. Namun, pada 2021 indeks melonjak menjadi 1,15. Kenaikan ini mengindikasikan memburuknya kondisi kemiskinan, di mana penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain dampak ekonomi pandemi COVID-19 yang menekan pendapatan, membatasi aktivitas usaha, dan menurunkan daya beli masyarakat.

Memasuki 2022, indeks P1 menurun menjadi 0,90, menunjukkan adanya perbaikan daya beli dan berkurangnya kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tahun 2023, nilai P1 relatif stabil di angka 0,91, yang berarti tidak terjadi perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Pada 2024, indeks P1 menurun cukup signifikan menjadi 0,64, mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berbagai program pemerintah daerah, peningkatan kesempatan kerja, dan perbaikan kondisi ekonomi. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa meski sempat meningkat, kedalaman kemiskinan di Belitong Timur berhasil ditekan pada akhir periode pengamatan.

#### d. Garis Kemiskinan

Dalam menghitung angka kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan bukan makanan. Hal ini dikenal dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi yaitu padipadian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Berdasarkan penghitungan BPS, garis kemiskinan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024 sebesar Rp 907.577,- Angka ini dapat diartikan bahwa penduduk Belitong



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Timur dengan pengeluaran perbulan dibawah Rp 907.577,- tergolong penduduk miskin. Perkembangan Garis Kemiskinan Tahun 2020-2024 dan Posisi Relatif Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Gambar 3.6 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Belitung Timur periode Tahun 2020-2024



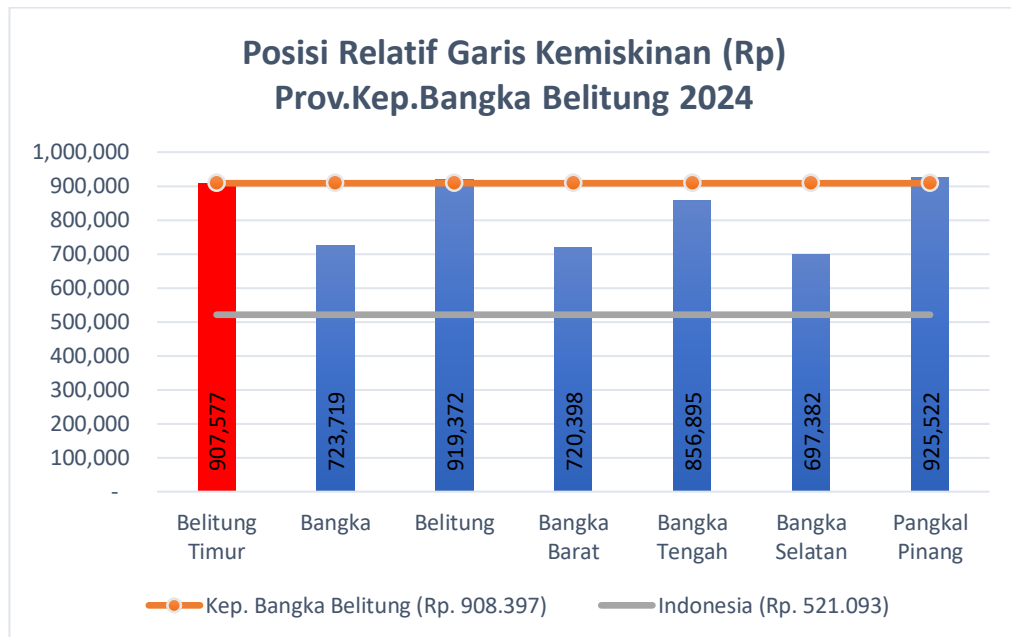
Sumber data : BPS

Gambar 3.7

Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber data : BPS

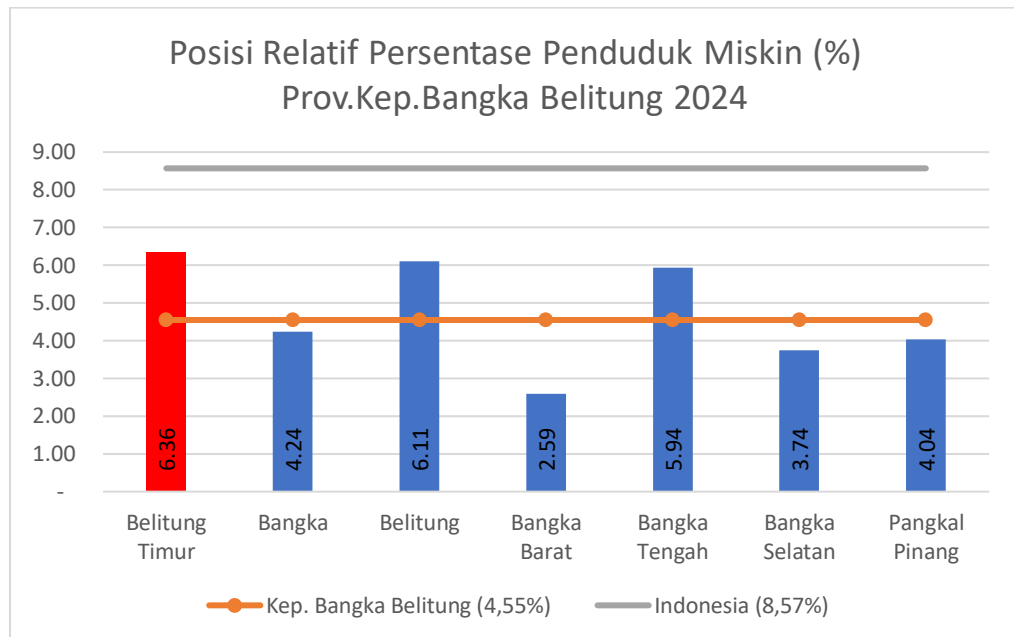
### e. Posisi Relatif Tingkat Capaian Indikator Kemiskinan Daerah

Posisi Relatif menggambarkan posisi suatu wilayah diantara wilayah lainnya dalam satu Provinsi terhadap rata-rata Provinsi dan Nasional. Posisi Relatif angka kemiskinan Kabupaten Belitung Timur, diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada urutan ke-1 dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 6,36%. Capaian tahun 2024 ini masih belum mengalami perbaikan dari Tahun 2024 yang sebelumnya berada pada urutan ke-1. Persentase kemiskinan ini diatas rata-rata Provinsi sebesar 4,55% dan masih dibawah rata-rata nasional sebesar 9,54%. Lebih rinci posisi relatif capaian-capaian indikator kemiskinan Kabupaten Belitung Timur diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebagai berikut.

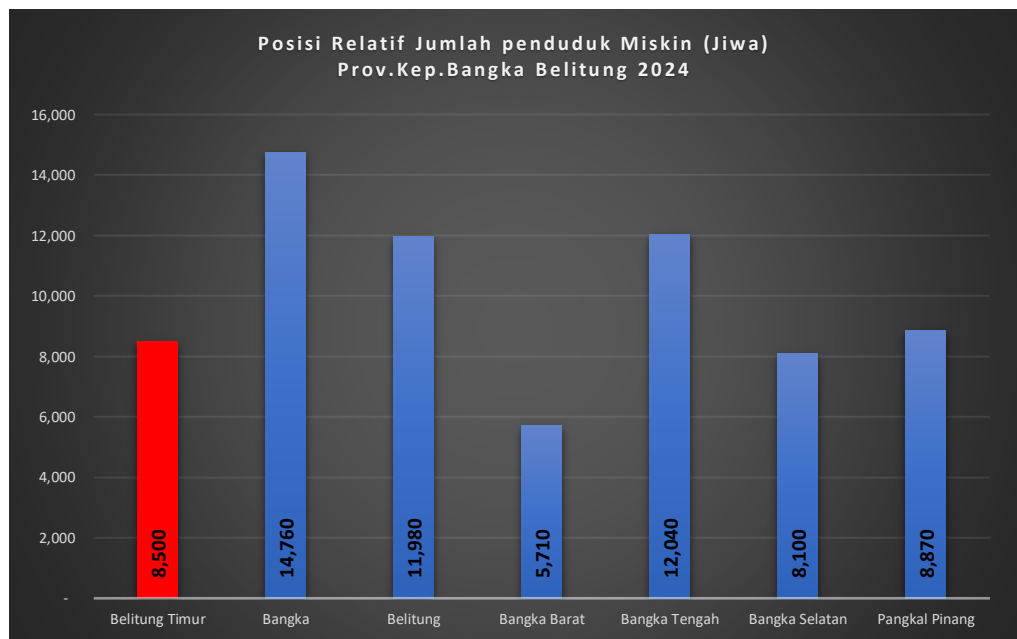
Gambar 3.8 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur diantara  
Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber data : BPS



Sumber data : BPS

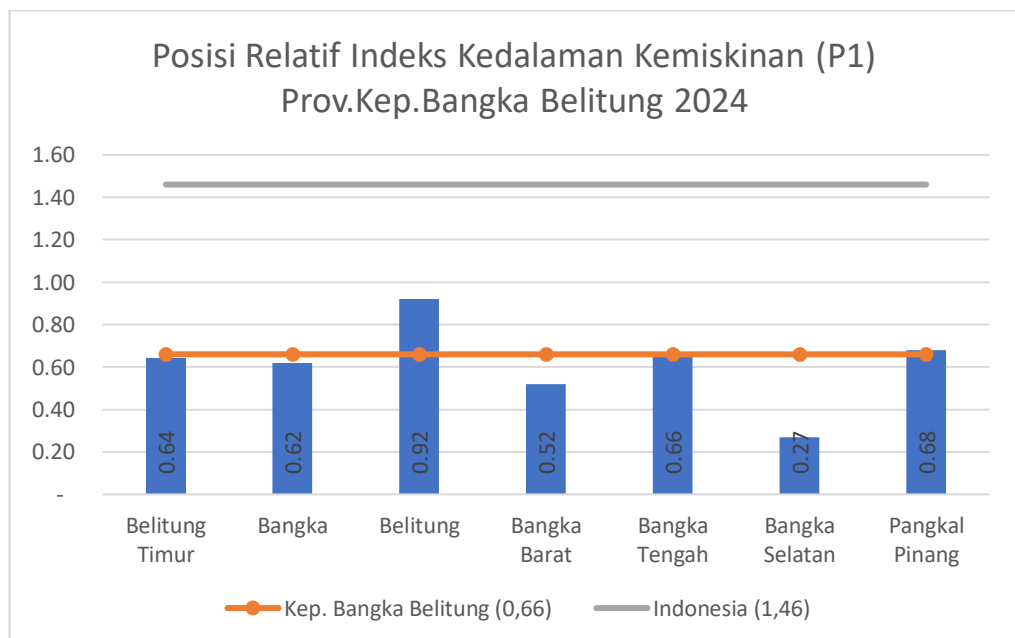
Melihat capaian diatas, maka perlu adanya usaha untuk terus memaksimalkan upaya penurunan angka kemiskinan. Implementasi program-program penanggulangan kemiskinan harus ditingkatkan efektivitasnya dan sasaran program juga harus terus dipertajam agar tepat sasaran. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan sinergi antara Pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat agar



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

memiliki kesamaan visi dan tujuan serta komitmen untuk menjadikan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai program utama dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain indikator angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, indikator indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan perlu terus mendapat perhatian agar perkembangannya terus membaik.

Gambar 3.9 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung Timur Diantara Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

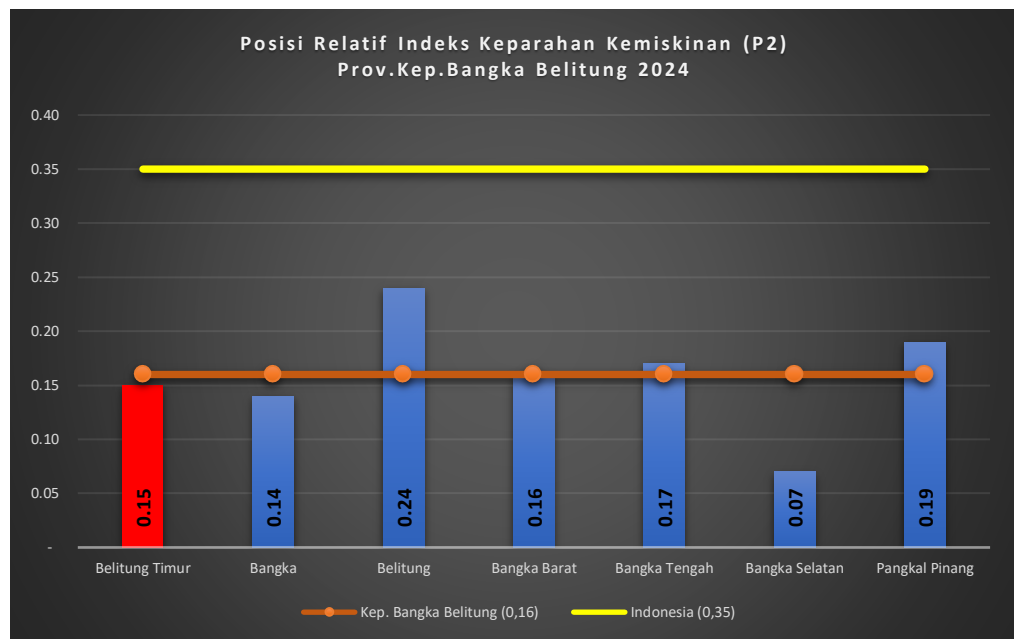


Sumber data : BPS

Gambar 3.10 Posisi Relatif Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung Timur Diantara Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber data : BPS

Pada Gambar 3.11 diatas Berdasarkan grafik Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, terlihat bahwa Kabupaten Belitung Timur mencatat nilai 0,15. Angka ini relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi yaitu 0,16, serta jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,35.

Jika dibandingkan dengan 6 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, capaian Belitung Timur menempati posisi menengah. Kabupaten dengan capaian P2 terendah adalah Bangka Selatan (0,07), disusul Bangka (0,14), kemudian Belitung Timur (0,15), Bangka Barat (0,16), Bangka Tengah (0,17), dan Pangkal Pinang (0,19). Sementara capaian tertinggi atau paling besar berada di Kabupaten Belitung (0,24).

Capaian Belitung Timur yang lebih rendah daripada rata-rata provinsi menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di daerah ini cukup terkendali, meskipun masih ada kabupaten/kota lain yang memiliki capaian lebih baik seperti Bangka Selatan dan Bangka. Namun, pencapaian Belitung Timur tetap positif karena masih jauh lebih rendah dibandingkan angka nasional, yang berarti kualitas penanggulangan kemiskinan relatif efektif dan tidak terlalu timpang antarpenduduk miskin.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Secara keseluruhan, capaian Belitung Timur tahun 2024 memberikan gambaran bahwa meskipun masih ada ruang untuk perbaikan agar bisa setara dengan Bangka Selatan yang terbaik di provinsi, daerah ini sudah berada di jalur yang baik dalam mengurangi ketimpangan kemiskinan.

### 3.2.2. Analisis Efektifitas Tingkat Kemiskinan Daerah Gambar

#### 3.12 Analisis Efektifitas Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024



Sumber data : BPS



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Pada Gambar 3.12 Berdasarkan grafik Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020–2024, terlihat bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi namun secara umum menunjukkan tren menurun.

Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,52%, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 7,20%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Peningkatan ini kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Memasuki tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup tajam hingga mencapai 6,49%, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang mulai berjalan. Namun, pada tahun 2023 kembali terjadi kenaikan menjadi 6,73%, menandakan adanya tekanan ekonomi atau tantangan baru yang dihadapi.

Pada tahun 2024, capaian persentase penduduk miskin kembali turun signifikan menjadi 6,36%, yang sekaligus menjadi angka terendah dalam periode analisis ini. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam program pemerintah daerah bersama dengan dukungan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan.

Secara keseluruhan, meskipun sempat berfluktuasi, tren lima tahun terakhir menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin dari 6,52% (2020) menjadi 6,36% (2024). Artinya, Kabupaten Belitong Timur mampu mengendalikan kemiskinan secara bertahap, dan program penanggulangan yang dijalankan menunjukkan efektivitas positif.

### 1.2.3. Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan Daerah

Gambar 3.13 Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Belitong Timur terhadap rata-rata Nasional dan Provinsi Tahun 2020-2024



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber data : BPS

Berdasarkan grafik **Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020–2024**, terlihat bahwa capaian Belitung Timur cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun tetap lebih rendah daripada angka nasional.

Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di Belitung Timur tercatat **6,52%**, lebih tinggi dari provinsi (**4,53%**) dan lebih rendah dibanding nasional (**10,19%**). Tahun 2021 angka kemiskinan di Belitung Timur meningkat tajam menjadi **7,20%**, melebihi provinsi (**4,90%**) dan masih lebih baik dibanding nasional (**9,71%**). Tahun 2022 angka ini kembali turun menjadi **6,49%**, sementara provinsi **4,45%** dan nasional **9,54%**.

Pada tahun 2023, Belitung Timur sempat naik ke **6,73%**, sedangkan provinsi berada di **4,52%** dan nasional **9,36%**. Hingga tahun 2024, angka kemiskinan di Belitung Timur berhasil ditekan menjadi **6,36%**, tetap lebih tinggi dari provinsi (**4,55%**) namun lebih rendah daripada nasional (**9,03%**).

Secara keseluruhan, tren lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Belitung Timur masih menghadapi tantangan dalam menekan kemiskinan agar sebanding dengan capaian provinsi. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi nasional, Belitung Timur mampu menjaga angka kemiskinan tetap lebih rendah. Hal ini menandakan program pengentasan kemiskinan cukup efektif, meskipun masih perlu upaya ekstra untuk mengejar rata-rata provinsi.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

### 1.2.4. Analisis Keterkaitan Tingkat Kemiskinan Daerah

Analisis keterkaitan dilakukan untuk mengetahui apakah 4 (empat) indikator utama kemiskinan memiliki keterkaitan dengan 4 (empat) perspektif di Kabupaten Belitong Timur, sehingga dapat diketahui akar masalah kemiskinan. Lebih jelasnya hasil analisis keterkaitan, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Analisis Keterkaitan Indikator Kemiskinan terhadap 4 (empat) Perspektif di Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024

Indikator	Posisi Relatif	Perkembangan antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Persentase Penduduk Miskin (%)	Persentase penduduk miskin Kab. Belitong Timur sebesar 6,36%, berada di atas rata-rata Provinsi Kep. Bangka Belitung 4,55% dan di bawah Nasional 9,03%.	Persentase penduduk miskin fluktuatif 2020–2024, dengan tren menurun dari puncaknya 7,20% (2021) menjadi 6,36% (2024).	Efektif, karena berhasil menurunkan angka kemiskinan.	Relevan terhadap capaian Provinsi dan Nasional.	Dari ke-5 perspektif, indikator ini menunjukkan posisi Kab. Belitong Timur lebih baik dari nasional, tetapi masih lebih tinggi dari provinsi.
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Jumlah penduduk miskin Kab. Belitong Timur berada pada posisi ke-5 tertinggi di Prov. Babel sebesar ± 8.000 jiwa (estimasi BPS 2024).	Perkembangan jumlah penduduk miskin fluktuatif, namun relatif menurun dibanding 2021.	Cukup efektif	Relevan terhadap capaian Provinsi dan Nasional.	Jumlah penduduk miskin masih cukup besar, sehingga perlu prioritas program penanggulangan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Posisi ke-2 terendah di Provinsi Kep. Bangka Belitung, berada di bawah rata-rata Provinsi (0,80%) dan jauh di bawah Nasional (1,70%).	Perkembangan cenderung membaik selama periode 2020–2024.	Cukup efektif, menunjukkan ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin makin kecil.	Relevan terhadap capaian Provinsi dan Nasional.	Pencapaian ini memperlihatkan program pengentasan kemiskinan mulai berhasil mengurangi kesenjangan.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Posisi ke-3 terendah di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 0,15, lebih baik dari rata-rata Provinsi (0,16) dan jauh lebih baik dari Nasional (0,35).	Perkembangan fluktuatif tetapi menurun pada 2024.	Efektif, karena berhasil menjaga ketimpangan di antara penduduk miskin tetap rendah.	Relevan terhadap capaian Provinsi dan Nasional.	Pencapaian ini memperkuat arah kebijakan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi di Belitong Timur.

### 1.2.5. Profil Kemiskinan Ekstrem



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Kemiskinan ekstrem diukur dengan pendekatan “absolute poverty measure”, yang menetapkan garis kemiskinan ekstrem pada USD 1,9 per hari (PPP). Ini adalah standar global yang digunakan oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada Maret 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan ekstrem sebesar 0,83 %, turun dari 1,12 % pada Maret 2023 . Namun, jika disesuaikan dengan standar PPP terbaru (USD 3,00 per hari, PPP 2021), jumlah penduduk miskin ekstrem naik secara signifikan menjadi sekitar 15,42 juta orang atau 5,44 % dari populasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode pengukuran yang berbeda menghasilkan estimasi angka yang sangat bervariasi. Sementara itu, kemiskinan umum pada Maret 2024 tercatat sebesar 9,03 %, yaitu sekitar 25,22 juta orang, turun dibandingkan tahun sebelumnya

Untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah pusat telah mengadopsi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai basis data utama, yang menjadi pijakan utama dalam merancang intervensi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi antar sektor, seperti pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, hingga penciptaan lapangan kerja baru, juga diperkuat agar penanganan kemiskinan menjadi lebih efektif dan menyeluruh. Bupati Belitung Timur sudah menetapkan Data Pensasaran Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2024 Nomor HK.00.-3-577 Tahun 2024, Penetapan Data Pensasaran Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 oleh Bupati Belitung Timur sudah berdasarkan hasil musyawarah desa yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa.

Kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Kec	Data Individu				Data Individu				Data Keluarga				Data keluarga			
		Sebelum Verval (Jiwa)				Setelah Verval (Jiwa)				Sebelum Verval (Keluarga)				Sesudah Verval (Keluarga)			
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
1	Dendang	1250	986	1773	1819	11	6	0	2	341	415	503	550	3	2	0	1
2	Gantung	2402	2772	5057	4595	0	0	0	0	603	1194	1367	1350	0	0	0	0
3	Simpang Pesak	845	920	1261	1107	10	1	0	1	223	417	355	337	2	1	0	1
4	Manggar	3681	4094	6065	5554	0	2	0	0	892	1875	1715	1625	0	2	0	0



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

No	Kec	Data Individu				Data Individu				Data Keluarga				Data keluarga			
		Sebelum Verval (Jiwa)				Setelah Verval (Jiwa)				Sebelum Verval (Keluarga)				Sesudah Verval (Keluarga)			
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
5	Kelapa Kampit	1649	1800	2912	2861	0	0	0	0	450	923	839	844	0	0	0	0
6	Damar	831	1095	2183	2303	6	4	1	0	223	564	610	670	3	1	1	0
7	Simpang Renggang	450	572	1009	1166	0	0	0	0	148	314	298	368	0	0	0	0
Jumlah se-Kab Belitong Timur		11.108	12.239	20260	19405	27	13	1	3	2880	5702	5687	5744	8	6	1	2

Sumber data : Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor HK.00.-3-577 Tahun 2024

### 1.2.6. Profil Kemiskinan Non Konsumsi

Prioritas intervensi kebijakan ditentukan dengan menganalisis determinan kemiskinan atau masalah pokok kemiskinan dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kondisi umum kemiskinan di daerah. Di Kabupaten Belitong Timur determinan kemiskinan berkaitan erat terhadap akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar perumahan, pengangguran dan lainnya. Disamping itu penyebab lain adalah, masyarakat yang kurang cepat untuk dapat keluar dari garis kemiskinan serta terbatasnya kemampuan wirausaha masyarakat.

Bidang-bidang yang menjadi determinan kemiskinan di Kabupaten Belitong Timur adalah:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
2. Bidang Infrastruktur Dasar
3. Bidang Ketenagakerjaan
4. Bidang Ekonomi
5. Bidang Ketahanan Pangan

Penjelasan lebih jauh terkait dengan determinan kemiskinan tersebut:

1. Bidang Pendidikan

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas pendidikan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didalamnya terdapat



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

komponen pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator Pendidikan penting karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas dapat menunjang seseorang untuk mengakses kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan hidupnya. Dari berbagai penelitian, ditemukan fakta bahwa keluarga miskin memiliki kesulitan akses ke lembaga pendidikan formal dibanding dengan keluarga dengan ekonomi mapan. Akibatnya seorang anak dari keluarga miskin akan lebih sulit bersaing dalam mendapatkan pekerjaan dengan kompensasi yang memadai, dibanding anak dari keluarga mampu. Hal ini akan berdampak dimasa depan, dimana anak tersebut akan sulit untuk dapat keluar dari garis kemiskinannya.

Berikut perbandingan capaian indikator bidang pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponen didalam IPM yang terkait dengan indikator pendidikannya.

### a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit yang dipilih dan direkomendasikan untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah maupun perkembangan antar waktu. IPM disusun dari empat indikator yang menggambarkan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar yaitu dimensi peluang hidup, yang diukur menggunakan indikator angka harapan hidup penduduk pada saat lahir. Dimensi kedua adalah dimensi pengetahuan/pendidikan diukur dengan dua indikator, yakni angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja. Yang ketiga adalah standar kehidupan yang layak yang diukur menggunakan indikator pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP).

Gambar 3.14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber Data : BPS

Berdasarkan grafik **Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung Timur tahun 2020–2024**, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Belitung Timur berada pada angka **70,92**, kemudian meningkat menjadi **71,42** pada tahun 2021. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian **72,29**, dan kembali naik menjadi **72,86** pada tahun 2023. Pada tahun 2024, IPM mencapai **73,19**, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.

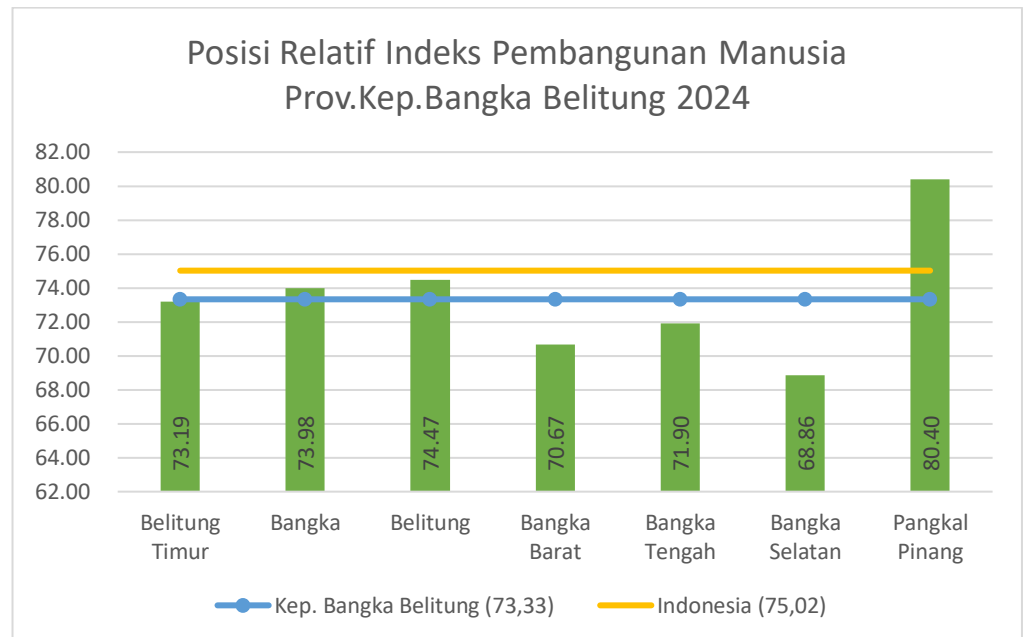
Peningkatan IPM ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat Belitung Timur. Dengan tren positif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia di Belitung Timur bergerak ke arah yang lebih baik, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah. Hal ini juga menandakan bahwa berbagai program pembangunan, baik di tingkat pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi, memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada gambar berikut ditampilkan Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Timur.

Gambar Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber data ; BPS

Berdasarkan grafik **Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024**, terlihat bahwa capaian IPM Kabupaten Belitung Timur berada pada angka **73,19**. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi yaitu **73,33**, namun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar **75,02**.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di provinsi ini, IPM Belitung Timur menempati posisi menengah. Kabupaten Belitung mencatat IPM tertinggi di antara kabupaten, yaitu **74,47**, diikuti Kabupaten Bangka **73,98**. Sementara itu, Kabupaten Bangka Tengah (**71,90**), Bangka Barat (**70,67**), dan Bangka Selatan (**68,86**) masih berada di bawah capaian Belitung Timur. Kota Pangkalpinang menempati posisi tertinggi dengan capaian IPM **80,40**, jauh di atas rata-rata provinsi maupun nasional.

Dari posisi relatif ini, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Belitung Timur telah mampu menjaga tren pembangunan manusianya dengan cukup baik, berada di atas sebagian besar kabupaten lain di provinsi. Namun demikian, masih terdapat tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari capaian nasional serta memperkecil kesenjangan dengan Kota Pangkalpinang yang jauh lebih unggul dalam hal kualitas pembangunan manusianya.

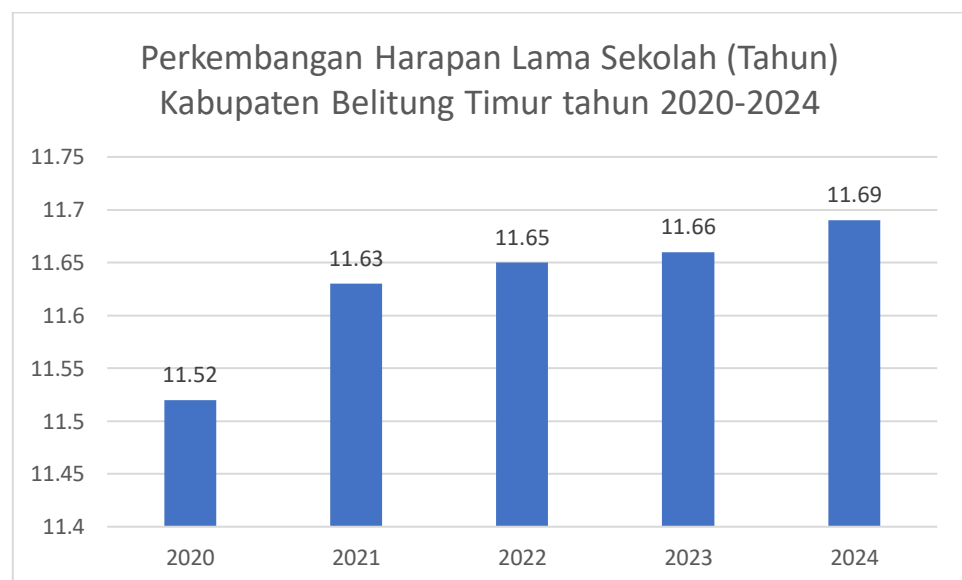


## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

### b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Indikator pendidikan didalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) salah satunya dihitung melalui komponen Harapan Lama Sekolah (HLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 11,52 tahun. Kemudian, HLS meningkat menjadi 11,63 tahun pada tahun 2021, 11,65 tahun pada tahun 2022, 11,66 tahun pada tahun 2023, dan mencapai 11,69 tahun pada tahun 2024. Secara keseluruhan, terjadi tren positif dalam HLS di Kabupaten Belitung Timur selama periode 2020-2024.

Gambar 3.16 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024

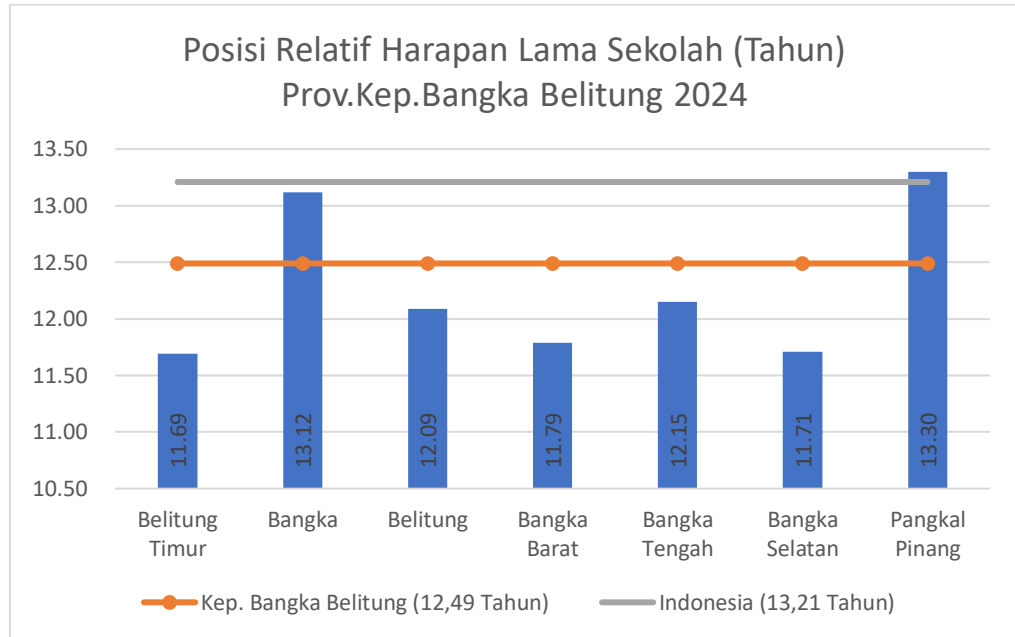


Sumber data : BPS

Gambar 3.17 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber Data : BPS

Pada gambar diatas terlihat bahwa Pada tahun 2024, **Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Belitung Timur** tercatat sebesar **11,69 tahun**. Angka ini menempatkan Belitung Timur pada posisi **kedua terendah** di antara tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, HLS Belitung Timur berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai **12,49 tahun**, dan juga masih lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar **13,21 tahun**. Kabupaten/kota dengan capaian HLS tertinggi adalah **Pangkal Pinang** dengan **13,30 tahun**, disusul oleh **Kabupaten Bangka** dengan **13,12 tahun**.

Sementara itu, daerah lain seperti **Belitung (12,09 tahun)**, **Bangka Barat (11,79 tahun)**, **Bangka Tengah (12,15 tahun)**, dan **Bangka Selatan (11,71 tahun)** masih mencatatkan capaian yang lebih baik dibanding Belitung Timur, meskipun sebagian besar juga berada di bawah rata-rata nasional.

Dengan capaian ini, Belitung Timur perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agar mampu mendekati, bahkan melampaui, rata-rata provinsi maupun nasional.

### c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)



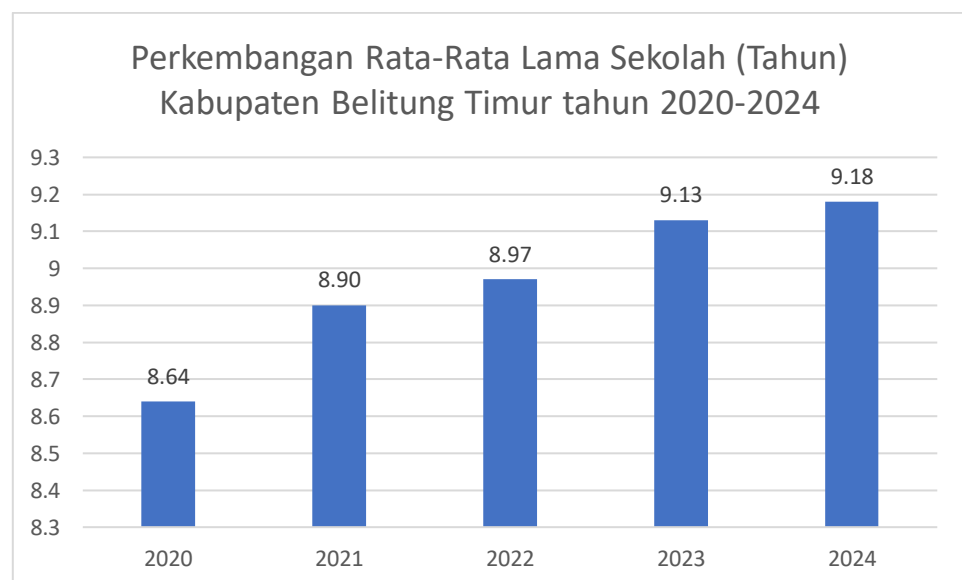
## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Indikator pendidikan didalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selanjutnya dihitung melalui komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Selama periode 2020 hingga 2024, **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung Timur** menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar **8,64 tahun**, kemudian naik menjadi **8,90 tahun** di tahun 2021.

Pada tahun 2022, RLS kembali meningkat meskipun relatif lebih kecil, yakni menjadi **8,97 tahun**. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai **9,13 tahun**. Di tahun terakhir pengamatan, 2024, capaian RLS Belitung Timur kembali naik menjadi **9,18 tahun**.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, RLS Kabupaten Belitung Timur berhasil meningkat sebesar **0,54 tahun**, dari 8,64 tahun (2020) menjadi 9,18 tahun (2024). Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal, meskipun perlu terus ditingkatkan agar dapat mendekati atau melampaui target nasional.

Gambar Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024

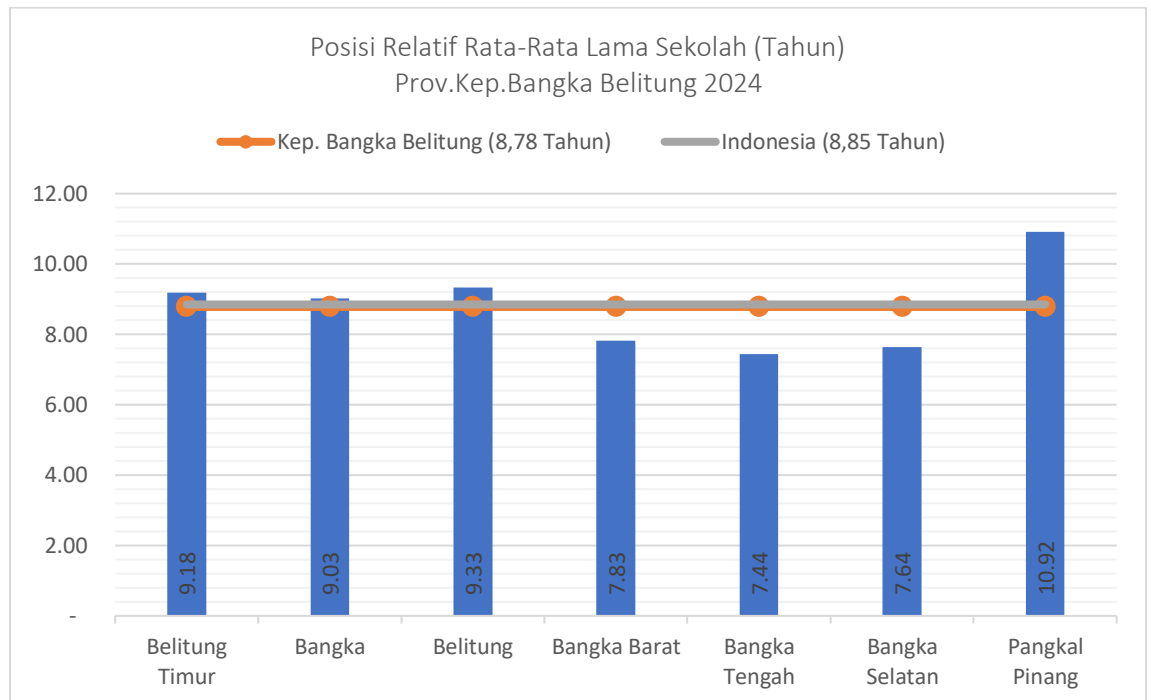


Sumber Data : BPS

Gambar 3.19 Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber Data : BPS

Pada gambar 3. 3.19 diatas dapat dijelaskan bahwa Pada tahun 2024, **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung Timur** mencapai **9,18 tahun**. Angka ini menempatkan Belitung Timur pada posisi **kedua tertinggi** di antara tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jika dibandingkan dengan capaian provinsi yang sebesar **8,78 tahun**, RLS Belitung Timur berada di atas rata-rata provinsi. Bahkan, capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai **8,85 tahun**.

Secara peringkat, posisi tertinggi ditempati oleh **Kota Pangkal Pinang** dengan capaian **10,92 tahun**, diikuti oleh **Kabupaten Belitung (9,33 tahun)** dan **Kabupaten Belitung Timur (9,18 tahun)**. Selanjutnya, **Kabupaten Bangka (9,03 tahun)** juga berada sedikit di bawah Belitung Timur.

Sementara itu, empat kabupaten lainnya yaitu **Bangka Barat (7,83 tahun)**, **Bangka Tengah (7,44 tahun)**, dan **Bangka Selatan (7,64 tahun)** mencatatkan RLS yang masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

Dengan capaian ini, Kabupaten Belitung Timur menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam peningkatan partisipasi pendidikan, meskipun masih perlu



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

mengejar ketertinggalan dari Kota Pangkal Pinang yang berada jauh di atas rata-rata.

### 2. Bidang Kesehatan

#### a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Indikator kesehatan didalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dicerminkan melalui komponen Usia Harapan Hidup (UHH). Selama periode 2020 hingga 2024, **Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Belitong Timur** menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar **72,03 tahun**, kemudian naik tipis menjadi **72,10 tahun** pada tahun 2021.

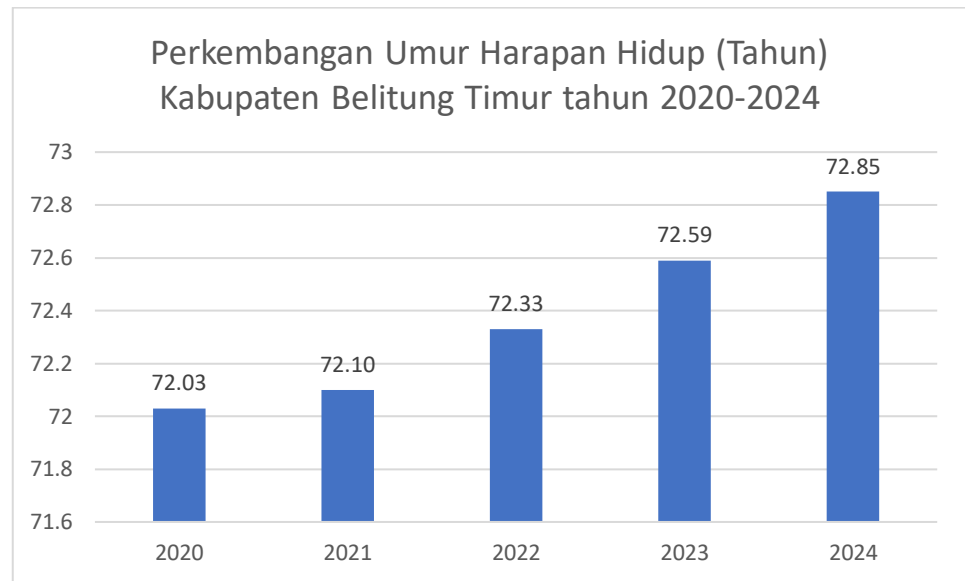
Peningkatan lebih signifikan terlihat pada tahun 2022, ketika UHH mencapai **72,33 tahun**, dan terus berlanjut di tahun 2023 menjadi **72,59 tahun**. Pada tahun 2024, capaian UHH Kabupaten Belitong Timur kembali meningkat menjadi **72,85 tahun**.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, UHH Belitong Timur bertambah sebesar **0,82 tahun**, dari 72,03 tahun pada 2020 menjadi 72,85 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi kesehatan, gizi, serta akses layanan kesehatan masyarakat yang berkontribusi pada meningkatnya kualitas hidup penduduk di daerah tersebut.

Gambar 3.20 Perkembangan Umur Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020-2024

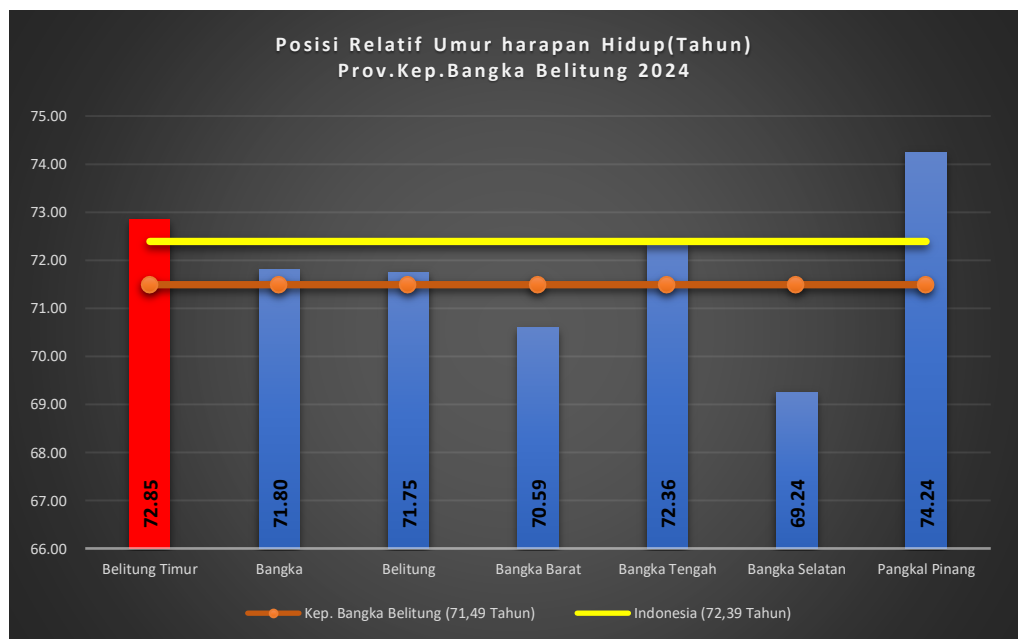


## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber Data : BPS

Gambar 3.21 Posisi Relatif Umur Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



Sumber Data : BPS

Pada gambar diatas Pada tahun 2024, **Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Belitung Timur** mencapai **72,85 tahun**. Capaian ini menempatkan Belitung Timur pada posisi **kedua tertinggi** di Provinsi Kepulauan Bangka



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Belitung, hanya berada di bawah Kota Pangkal Pinang yang mencatatkan UHH **74,24 tahun**.

Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang sebesar **71,49 tahun**, UHH Belitung Timur berada **lebih tinggi 1,36 tahun**. Bahkan, capaian ini juga melampaui rata-rata nasional yang mencapai **72,39 tahun**.

Secara perbandingan antarwilayah, setelah Pangkal Pinang (74,24 tahun) dan Belitung Timur (72,85 tahun), posisi berikutnya ditempati oleh Bangka Tengah (72,36 tahun), Bangka (71,80 tahun), Belitung (71,75 tahun), Bangka Barat (70,59 tahun), dan Bangka Selatan (69,24 tahun).

Dengan capaian tersebut, Belitung Timur menunjukkan kinerja yang baik dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

### b. Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Status gizi buruk pada ibu hamil dan bayi merupakan faktor utama yang menyebabkan anak balita mengalami Stunting. Ada banyak sekali hal-hal yang dapat memicu terjadinya gizi buruk ini. Berikut adalah penyebab gizi buruk pada ibu hamil dan bayi yang masih sering ditemui :

1. Pengetahuan ibu yang kurang memadai Sejak di dalam kandungan, bayi sudah membutuhkan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk mencapai ini, ibu harus berada dalam keadaan sehat dan bergizi baik.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

---

2. Infeksi berulang atau kronis Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting.
3. Sanitasi yang buruk Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum disertai kurangnya ketersediaan jamban (kakus) merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi.
4. Terbatasnya layanan kesehatan untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya.

Untuk mencegah stunting, konsumsi protein sangat mempengaruhi penambahan tinggi dan berat badan anak di atas 6 bulan. Indonesia menargetkan percepatan penanggulangan stunting dengan target 14,2% di Tahun 2029. Pada gambar berikut ini ditampilkan Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Belitong Timur.

Gambar 3.22 Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Belitong Timur Tahun 2019-2024



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber data : SSGI Kemenkes RI

Selama periode 2019 hingga 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren **fluktuatif namun cenderung menurun**. Pada tahun 2019, prevalensi stunting tercatat sebesar **22,13%**, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi **22,06%**.

Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022, ketika angka stunting turun hingga mencapai **16,00%**, atau berkurang lebih dari 6 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pada tahun 2023 prevalensi kembali naik menjadi **17,30%**, meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dan 2021.

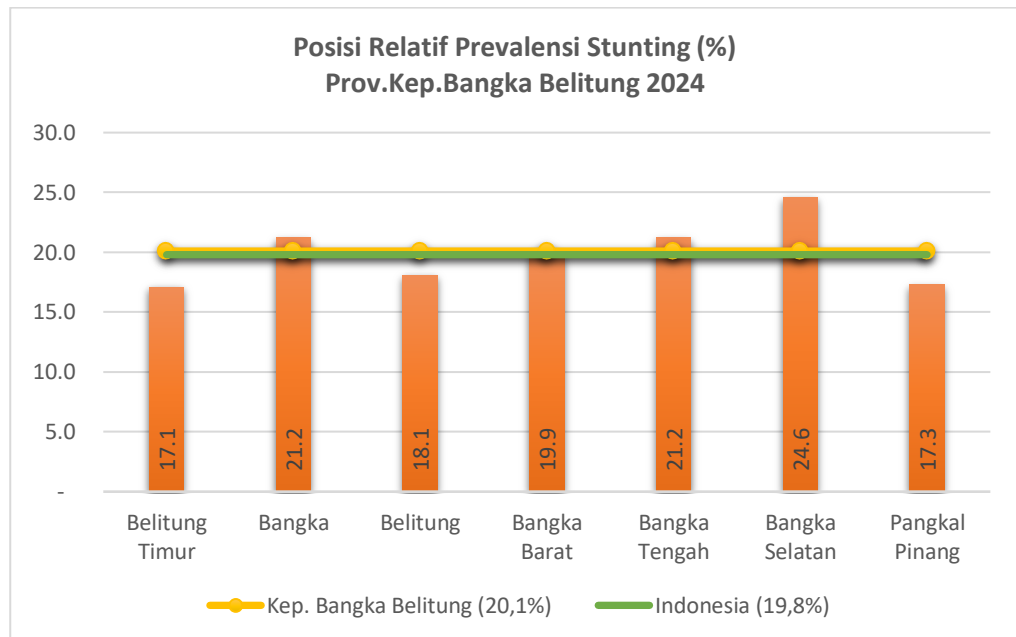
Pada tahun 2024, prevalensi stunting sedikit menurun menjadi **17,10%**, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam penanganan stunting, meski angka tersebut masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian serius.

Secara keseluruhan, dalam rentang waktu 2019–2024, prevalensi stunting di Belitung Timur berhasil ditekan dari **22,13%** menjadi **17,10%**, atau menurun sekitar **5,03 persen poin**. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan, namun keberlanjutan program intervensi gizi dan kesehatan anak tetap diperlukan untuk mencapai target nasional penurunan stunting.

Gambar 3.23 Posisi Relatif Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber data : SSGI Kemenkes RI

Dari Gambar diatas, terlihat bahwa Pada tahun 2024, **prevalensi stunting di Kabupaten Belitung Timur** tercatat sebesar **17,1%**. Angka ini merupakan salah satu yang **terendah** di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersama dengan **Kota Pangkal Pinang (17,3%)**, dan berada jauh di bawah rata-rata provinsi sebesar **20,1%** maupun rata-rata nasional sebesar **19,8%**.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Belitung Timur menempati posisi **terbaik (terendah)** dalam hal prevalensi stunting, menunjukkan capaian yang positif dalam penanganan masalah gizi anak. Setelah Belitung Timur, capaian terendah berikutnya adalah Kota Pangkal Pinang (17,3%) dan Kabupaten Belitung (18,1%).

Sebaliknya, angka stunting tertinggi terdapat di Kabupaten **Bangka Selatan (24,6%)**, disusul oleh Bangka (21,2%) dan Bangka Tengah (21,2%). Kabupaten Bangka Barat juga mencatat angka cukup tinggi yakni **19,9%**.

Dengan capaian ini, Kabupaten Belitung Timur berhasil menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam upaya percepatan penurunan stunting, melampaui rata-rata provinsi maupun nasional, serta menjadi daerah dengan prevalensi stunting terendah di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

### 3. Bidang Infrastruktur Dasar

Analisis bidang infrastruktur dasar yang merupakan karekteristik penting dalam penanggulangan kemiskinan dan sering dinamakan indikator utama adalah indicator rumah tangga dengan sanitasi layak (%), rumah tangga dengan air minum layak (%) dan rumah tangga dengan akses listrik (%).

Capaian indikator-indikator tersebut di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022, sebagian masih bermasalah, sehingga masih menjadi prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut Capaian indikator-indikator Bidang Infrastruktur Dasar yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Infrastruktur Dasar Perumahan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2024

Indikator	Capaian Belitung Timur	Capaian Provinsi Kep. Babel	Capaian Nasional
Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (%)	91,50	94,16	83,60
Proporsi Rumah tangga dengan air minum layak (%)	70,94	82,97	92,64
Proporsi Rumah Tangga dengan akses listrik (%)	99,82	99,66	99,48

Sumber data : BPS

Pada Tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga indikator utama kemiskinan bidang infrastruktur dasar perumahan, Secara umum, capaian Belitung Timur pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang cukup positif, terutama pada indikator akses listrik dan sanitasi layak. Namun, tantangan terbesar masih terdapat pada indikator air minum layak yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar dapat mengejar ketertinggalan dari capaian provinsi maupun nasional.

#### a. Rumah Tangga yang memiliki sanitasi layak

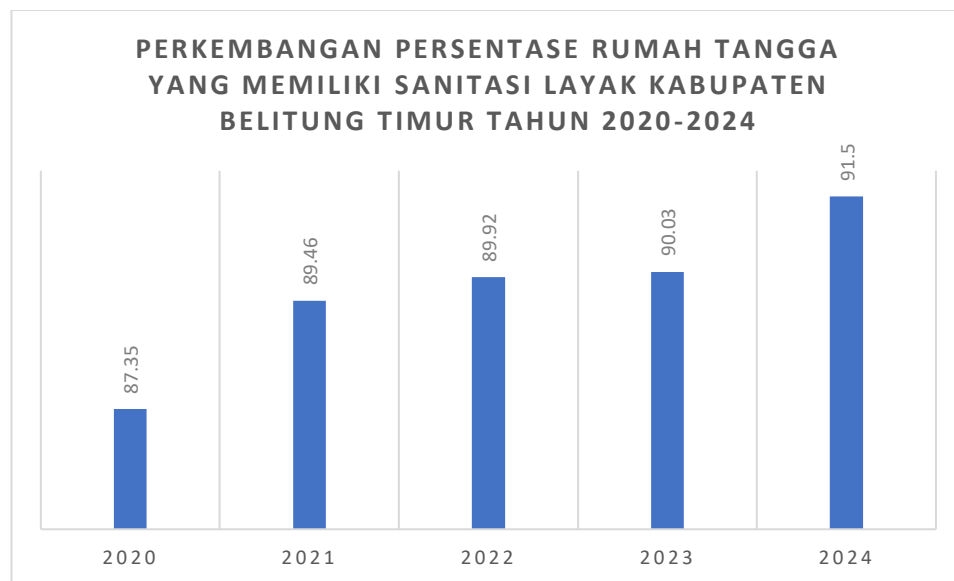
Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak memiliki definisi konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs terbaru dimana rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan. Selengkapnya perkembangan sanitasi layak di Kabupaten Belitong Timur 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam grafik berikut :

Tabel 3.3 Perkembangan Rumah Tangga yang memiliki Sanitasi Layak Kabupaten Belitong Timur tahun 2020-2024



Sumber data : BPS

Selama periode 2020 hingga 2024, persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak di Kabupaten Belitong Timur mengalami tren peningkatan yang konsisten.

Pada tahun 2020, capaian sanitasi layak tercatat sebesar 87,35%. Angka ini kemudian meningkat menjadi 89,46% pada tahun 2021, dan terus naik meskipun dengan laju yang lebih lambat pada tahun 2022 menjadi 89,92%.

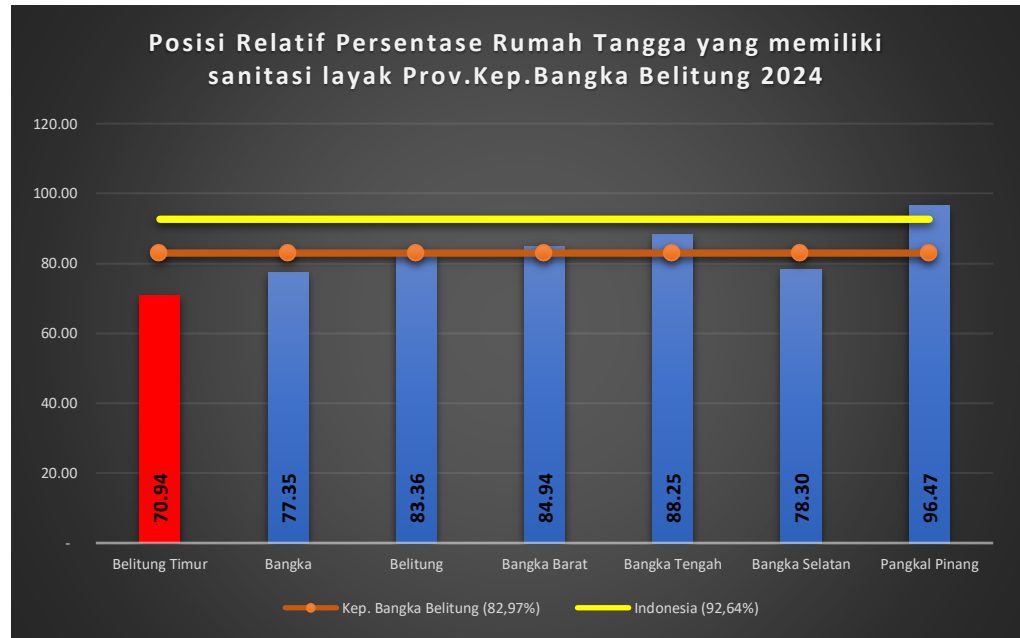
Pada tahun 2023, capaian sanitasi layak kembali meningkat menjadi 90,03%, dan pada tahun 2024 berhasil mencapai 91,50%.

Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 4,15 persen poin, dari 87,35% di tahun 2020 menjadi 91,50% di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan akses sanitasi yang layak bagi rumah tangga di Belitong Timur, seiring dengan upaya pemerintah daerah dalam mendukung program kesehatan lingkungan dan infrastruktur dasar.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Gambar 3.23 Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga yang memiliki Sanitasi Layak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



Sumber Data : BPS

Dari Gambar dapat dilihat bahwa Pada tahun 2024, **persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Belitung Timur** tercatat sebesar **70,94%**. Angka ini merupakan yang **terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, sekaligus jauh di bawah rata-rata provinsi (**82,97%**) maupun rata-rata nasional (**92,64%**).

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, capaian tertinggi terdapat di **Kota Pangkal Pinang** dengan **96,47%**, disusul oleh **Bangka Tengah (88,25%)**, **Bangka Barat (84,94%)**, dan **Belitung (83,35%)**. Sementara itu, **Kabupaten Bangka (77,35%)** dan **Bangka Selatan (78,30%)** juga masih berada di atas capaian Belitung Timur.

Dengan capaian ini, Belitung Timur menempati posisi paling rendah dalam hal sanitasi layak, menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup besar dibandingkan dengan daerah lain di provinsi maupun dengan standar nasional.

Kondisi ini menandakan bahwa peningkatan akses sanitasi layak harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di Belitung Timur, agar kualitas



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

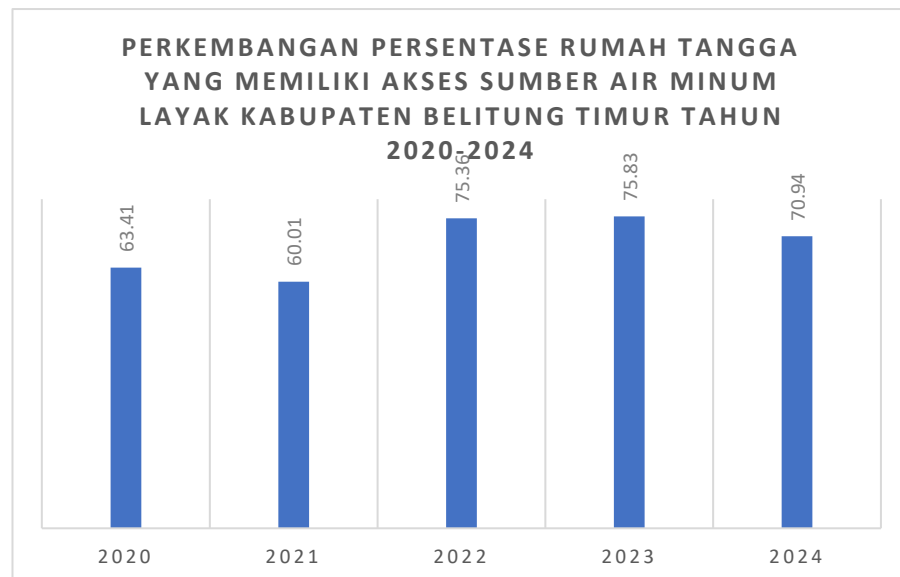
kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik serta sejajar dengan kabupaten/kota lainnya.

b. Rumah tangga dengan air minum layak (%)

**Rumah tangga dengan air minum layak** adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut **metadata SDGs terbaru**, suatu rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak apabila sumber air yang digunakan berasal dari **Air kemasan/air isi ulang** (dengan jaminan kualitas), **Air leding/perpipaan** (air yang dialirkan melalui jaringan perpipaan ke rumah, halaman, atau tetangga), **Pompa** (pompa tangan atau pompa listrik), **Sumur terlindung** (sumur yang memiliki konstruksi pelindung sehingga terhindar dari kontaminasi), **Mata air terlindung** (mata air yang dilengkapi pelindung agar air tidak tercemar), **Air hujan** (jika ditampung dan dikelola dengan benar untuk konsumsi rumah tangga).

Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024 dapat lihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.26 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)  
Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020-2024



Sumber data : BPS

Perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Belitong Timur dalam periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup berfluktuasi. Pada tahun 2020, persentase



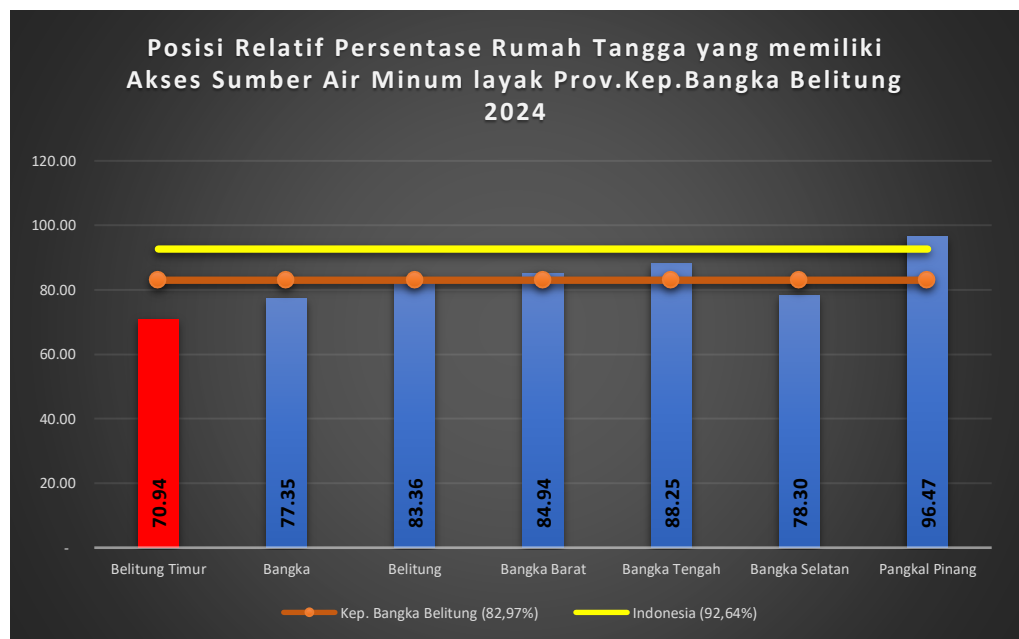
## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

rumah tangga dengan akses air minum layak tercatat sebesar **63,41%**, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi **69,01%**. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian tertinggi sebesar **75,90%**, menandakan adanya perbaikan akses dan kualitas layanan air minum di wilayah ini.

Namun, pada tahun 2023, capaian tersebut sedikit menurun menjadi **75,83%**, dan penurunan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan persentase **70,94%**. Meskipun terdapat fluktuasi, secara umum tren dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan awal periode 2020.

Capaian ini menggambarkan bahwa upaya penyediaan sumber air minum layak di Belitung Timur sudah menunjukkan hasil positif, meskipun konsistensi keberlanjutan akses dan kualitas layanan perlu terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas serta mencapai target yang lebih optimal.

Gambar 3.25 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



Sumber data : BPS

Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Belitung Timur tercatat sebesar 70,94%, menjadi yang terendah dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di Provinsi



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Kepulauan Bangka Belitung. Angka ini juga masih jauh di bawah capaian rata-rata provinsi sebesar 82,97% maupun capaian nasional sebesar 92,64%.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, capaian tertinggi diperoleh oleh Kota Pangkal Pinang dengan 96,47%, bahkan melampaui capaian nasional. Kabupaten Bangka Barat (84,94%) dan Belitung (83,36%) juga berada di atas rata-rata provinsi. Sementara itu, Kabupaten Bangka (77,35%), Bangka Tengah (82,25%), dan Bangka Selatan (78,30%) masih lebih baik dibandingkan Belitung Timur meskipun beberapa masih di bawah rata-rata provinsi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa akses air minum layak di Belitung Timur masih menjadi tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih, khususnya dalam meningkatkan cakupan layanan, kualitas, serta pemerataan akses agar mampu mengejar capaian provinsi dan nasional.

Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Akses Air Minum Layak di Belitung Timur

1. Keterbatasan Infrastruktur Penyediaan Air Minum
  - Belitung Timur memiliki wilayah dengan sebaran penduduk yang relatif terpencar dan banyak daerah pedesaan. Hal ini membuat pembangunan jaringan perpipaan dan sistem distribusi air bersih kurang merata.
  - Layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih terbatas cakupannya, sehingga banyak rumah tangga bergantung pada sumur gali, sumur pompa, atau sumber air permukaan yang tidak selalu memenuhi standar air minum layak.
2. Kualitas Sumber Air yang Belum Memadai
  - Beberapa sumber air tanah di wilayah Belitung Timur mengandung kadar zat tertentu (misalnya besi atau mangan) yang cukup tinggi, sehingga kualitasnya belum memenuhi syarat sebagai air minum layak.
  - Pada musim kemarau, terjadi penurunan debit air, sementara pada musim hujan rawan terjadi pencemaran dari limpasan permukaan.
3. Ketergantungan pada Sumber Air Tradisional
  - Sebagian besar masyarakat, terutama di pedesaan, masih mengandalkan sumber air tradisional seperti sumur gali atau sungai tanpa perlakuan lebih lanjut.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

- Kondisi ini membuat masyarakat rentan terhadap penggunaan air yang tidak higienis, sehingga berdampak pada rendahnya angka rumah tangga dengan akses air minum layak.
4. Kendala Ekonomi dan Sosial
- Masih ada rumah tangga dengan keterbatasan daya beli untuk mengakses layanan air minum perpipaan atau membeli air bersih.
  - Faktor perilaku juga berpengaruh, di mana sebagian masyarakat belum menempatkan akses air minum layak sebagai prioritas utama dibandingkan kebutuhan lainnya.
5. Minimnya Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
- Kurangnya pemahaman tentang pentingnya mengonsumsi air yang aman dan layak dapat menjadi penghambat.
  - Sebagian masyarakat beranggapan bahwa air dari sumur atau sungai sudah cukup baik untuk dikonsumsi tanpa perlu pengolahan lebih lanjut.
6. Upaya yang Dapat Dilakukan
- Perluasan jaringan perpipaan dan peningkatan layanan PDAM.
  - Peningkatan kualitas sumber air melalui pengolahan sederhana maupun instalasi skala komunitas.
  - Program edukasi masyarakat terkait pentingnya konsumsi air minum layak.
  - Dukungan kebijakan dan pendanaan baik dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mengejar target SDGs 2030.
- d. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%)

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2024 sudah hampir merata. Hampir seluruh rumah tangga telah menikmati layanan listrik, sehingga kebutuhan dasar energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas hidup, memperlancar aktivitas sehari-hari, serta mendorong perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk lebih jelasnya capaian Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.28 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)  
Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020-2024



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



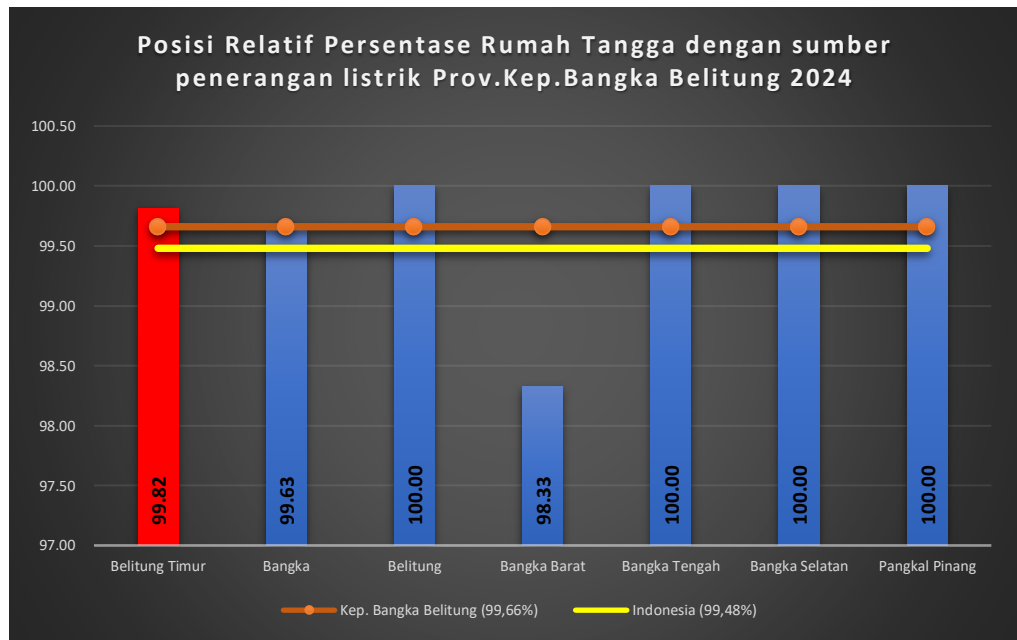
Sumber data : BPS

Perkembangan proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Belitung Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, sebagian besar rumah tangga sudah menikmati penerangan listrik. Capaian ini terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. Namun demikian, kondisi tersebut kembali membaik di tahun 2023 dan 2024, di mana hampir seluruh rumah tangga di Belitung Timur telah memiliki akses listrik. Hal ini mencerminkan bahwa ketersediaan listrik di wilayah tersebut sudah merata dan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.27 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber data : BPS

Berdasarkan data tahun 2024, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik yang sangat tinggi. Kabupaten Belitung Timur mencatat capaian sebesar **99,82 persen**, sementara Bangka dan Belitung masing-masing berada pada angka **99,63 persen** dan **100 persen**. Kabupaten Bangka Barat sedikit lebih rendah yaitu **98,33 persen**, sedangkan Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Kota Pangkal Pinang telah mencapai **100 persen**.

Jika dibandingkan dengan capaian provinsi yang berada pada level **99,66 persen**, maka sebagian besar kabupaten/kota berada di atas rata-rata provinsi. Sementara itu, angka nasional sebesar **99,48 persen** menunjukkan bahwa capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa akses rumah tangga terhadap listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah hampir merata dan sangat baik, meskipun masih terdapat sedikit perbedaan antar kabupaten/kota.

#### 4. Bidang Ketenagakerjaan

Analisis bidang ketenagakerjaan yang merupakan indikator daerah, juga sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan. Indikator-indikator tersebut adalah Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%), Indikator Tingkat



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%), dan Indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%).

Capaian indikator-indikator tersebut di Kabupaten Belitung timur Tahun 2022, relative lebih baik walaupun demikian tetap harus menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut capaian indikator-indikator Ketenagakerjaan yang mempengaruhi angka kemiskinan di Belitung Timur Tahun 2024.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2024

Indikator	Capaian Belitung Timur	Capaian Provinsi Kep. Bangka Belitung	Capaian Nasional
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)	2,63	4,63	4,91
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	70,56	68,87	70,63

Sumber data : BPS

Pada Tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa dari kedua indikator ketenagakerjaan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 yang sudah berada diatas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional. Dan satu indikator lainnya yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 masih dibawah capaian Nasional dan diatas rata-rata provinsi kepulauan Bangka Belitung.

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja. Manfaat analisis terhadap indikator ini adalah untuk melihat keterjangkauan pekerjaan. Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Kabupaten Belitung Timur perkembangan antar waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Gambar 3.30 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)  
Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS

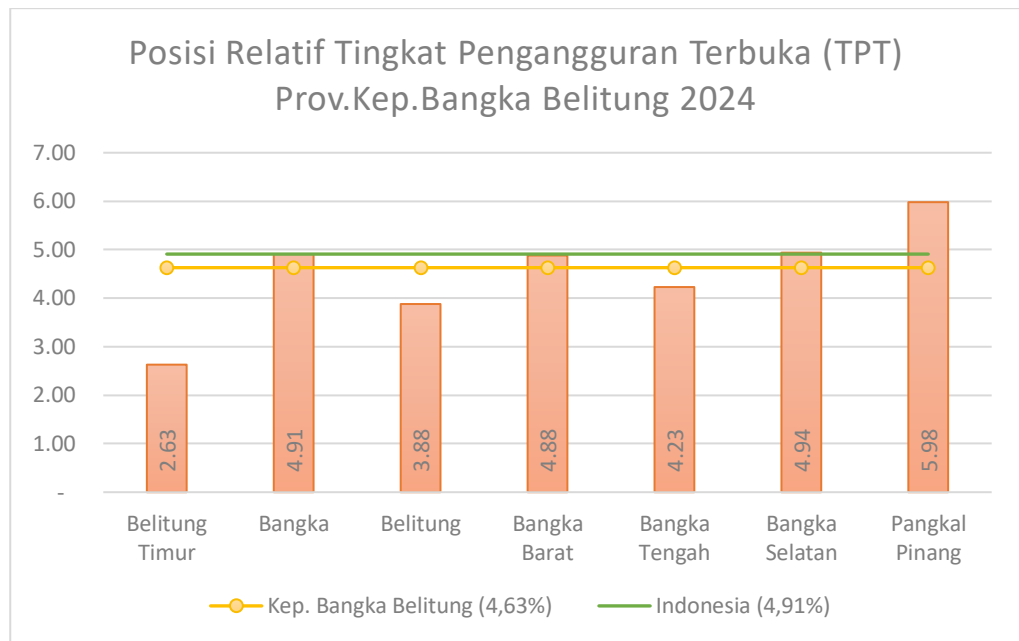
Berdasarkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung Timur selama periode 2020–2024 terlihat adanya tren fluktuatif. Pada tahun 2020, TPT masih berada pada angka yang relatif tinggi, namun mulai mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kembali menurun cukup signifikan di tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2023, angka pengangguran terus menunjukkan penurunan meskipun tipis, sebelum akhirnya kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, tren TPT Kabupaten Belitung Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan arah yang cenderung menurun dibandingkan awal periode, menandakan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Gambar 3.29 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



Sumber Data : BPS

Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan variasi antar kabupaten/kota. Kabupaten Belitung Timur mencatat angka TPT terendah di provinsi ini, menggambarkan kondisi pasar kerja yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, Kota Pangkal Pinang menempati posisi dengan TPT tertinggi, menandakan masih adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah perkotaan.

Beberapa kabupaten lainnya, seperti Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung, mencatat tingkat pengangguran yang berada pada kisaran menengah dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh dari rata-rata provinsi.

Secara agregat, TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada sedikit lebih rendah dibandingkan angka nasional. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi ketenagakerjaan di provinsi ini relatif lebih baik daripada rata-rata Indonesia, meskipun masih terdapat perbedaan mencolok antar wilayah yang perlu menjadi perhatian.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

### b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja merupakan perbandingan antara Angkatan Kerja (bekerja + pengangguran) dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas x 100. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang terlibat atau yang berusaha terlibat dalam kegiatan yang produktif untuk memproduksi barang dan/jasa dalam kurun waktu tertentu.

Gambar 3.32 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)  
Kabupaten Belitong Timur, Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Belitong Timur pada periode 2020–2024 mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada awal periode, partisipasi angkatan kerja berada pada level tinggi, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam keterlibatan masyarakat usia kerja di pasar tenaga kerja, baik karena faktor ekonomi maupun sosial.

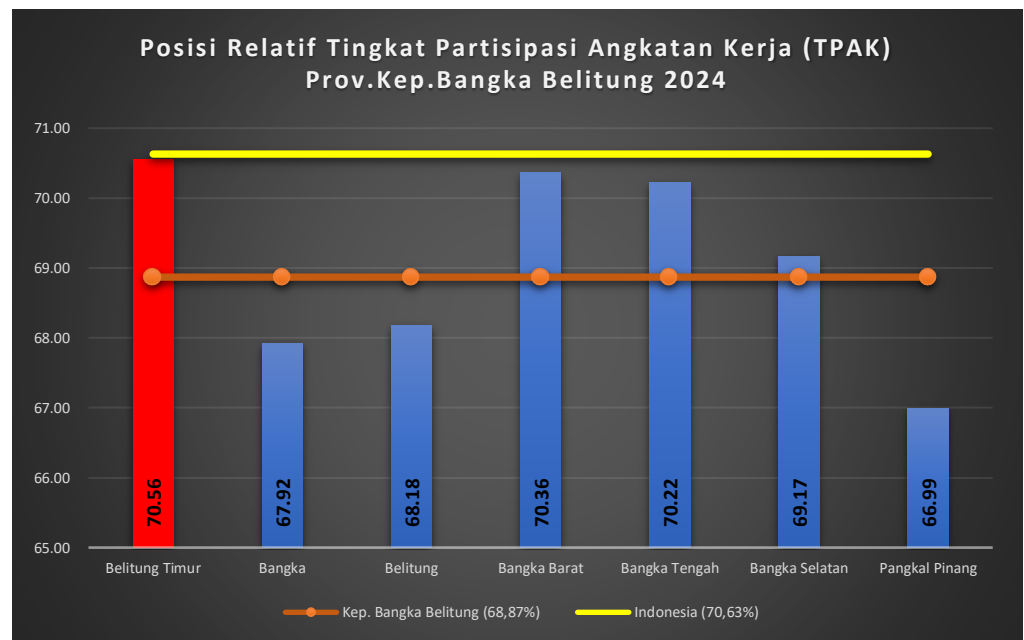
Namun, setelah itu terlihat adanya perbaikan, di mana TPAK kembali meningkat pada tahun 2023 dan stabil pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan pulihnya semangat dan kesempatan kerja masyarakat setelah



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

periode penurunan sebelumnya, sehingga partisipasi angkatan kerja kembali berada pada level yang relatif baik

Gambar Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024



Sumber Data : BPS

Pada tahun 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belitung Timur tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika dibandingkan dengan enam kabupaten/kota lainnya, capaian Belitung Timur lebih unggul dari Bangka Barat dan Bangka Tengah yang juga berada pada level tinggi, sementara beberapa daerah lain seperti Bangka, Belitung, Bangka Selatan, serta Pangkal Pinang menunjukkan angka partisipasi yang lebih rendah.

Secara umum, capaian TPAK Kabupaten Belitung Timur berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat usia kerja di Belitung Timur memiliki tingkat keterlibatan yang lebih kuat dalam pasar tenaga kerja dibandingkan dengan sebagian besar wilayah lain di provinsi tersebut



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

### 5. Bidang Ekonomi

Analisis bidang ekonomi difokuskan pada indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi ini yang dianggap paling berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan seberapa berkembangnya perekonomian suatu wilayah secara total.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, perekonomian daerah ini mengalami kontraksi akibat dampak pandemi. Namun, pada tahun 2021, kondisi mulai membaik dengan pertumbuhan yang melonjak positif. Tren positif ini berlanjut meskipun sempat sedikit melambat di tahun 2022, kemudian kembali menguat di tahun 2023.

Sayangnya, pada tahun 2024 laju pertumbuhan kembali menurun hingga berada pada titik stagnasi. Dinamika ini menggambarkan bahwa perekonomian Belitung Timur masih rentan terhadap berbagai faktor eksternal maupun internal, meskipun di beberapa periode mampu menunjukkan pemulihan yang cukup kuat

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di grafik di bawah ini yang menggambarkan Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Belitung Timur dilihat dari Perkembangan antar waktu Tahun 2020-2024 pada Gambar berikut.

Gambar Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Belitung Timur,  
Tahun 2020-2024

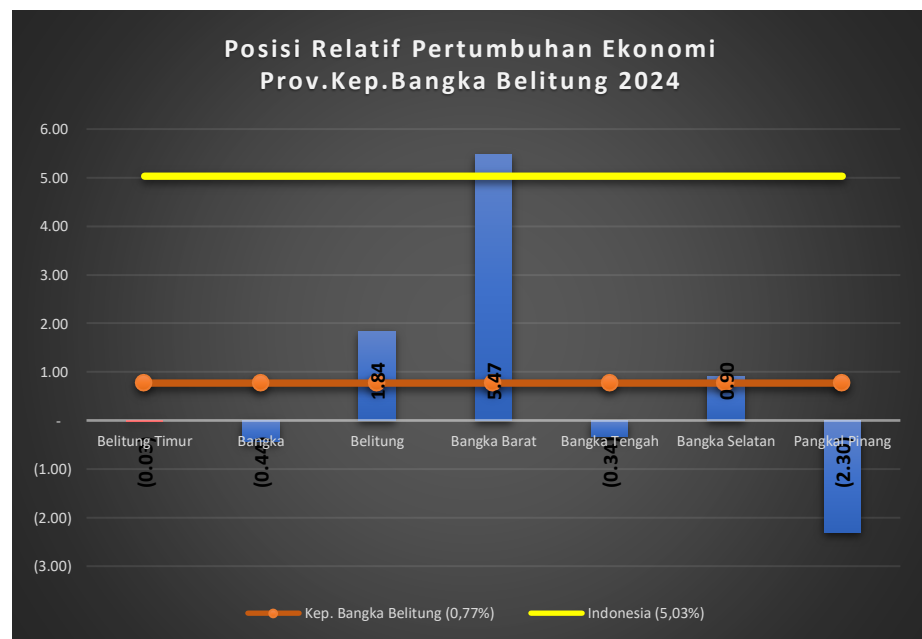


## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber data : BPS

Gambar 3.36 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Belitung Timur  
Tahun 2024



Sumber Data : BPS

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mengalami kontraksi tipis, sehingga berada pada posisi yang relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika dibandingkan, Bangka Barat mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

dengan laju yang cukup kuat, sedangkan Pangkal Pinang mengalami kontraksi paling dalam. Sementara itu, Bangka, Belitung, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan masih mencatat pertumbuhan positif meskipun tidak terlalu tinggi.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 juga belum optimal, dengan capaian di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada daerah yang mampu tumbuh lebih cepat, perekonomian provinsi secara agregat masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pemerataan pertumbuhan.

### 6. Bidang Ketahanan Pangan

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling besar berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2023, sektor ini memiliki andil sebesar 25,64 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha di Kabupaten Belitung Timur. Nilai ini meningkat 0,65 persen dibandingkan tahun 2022.

Laju pertumbuhan PDRB ADHK sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2022 mengalami percepatan dari 1,49 persen menjadi 4,98 persen di tahun 2023 dan menjadi salah satu sektor dari 17 kategori lapangan usaha ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif. Namun yang memberikan kontribusi terbesar dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ini bukan dari tanaman pangan dan hortikultura melainkan dari komoditas Perkebunan khususnya kelapa sawit dan lada serta komoditas perikanan yaitu perikanan tangkap.

Tabel Produksi Sektor Pertanian Tahun 2019-2023

Komoditi	2019	2020	2021	2022	2023
Padi	3.769,17	3.521,34	2.852,00	1.599,47	1.314,98
Jagung	881,25	545,5	363,6	593	254,4



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Ubi Kayu	1.378,00	1.826,50	1.291,60	1.162,90	658,45
Ubi Jalar	260	332	246	366	182,4
<b>Total</b>	<b>6.288,42</b>	<b>6.225,34</b>	<b>4.753,20</b>	<b>3.721,37</b>	<b>2.410,23</b>

Total produksi pangan terutama padi dan umbi-umbian di tahun 2019 sebanyak 6.288,42 ton dengan jumlah produksi paling besar adalah komoditi padi kemudian ubi kayu dan yang paling sedikit adalah komoditi ubi jalar. Di tahun 2020 produksi padi dan jagung mengalami penurunan sementara produksi ubi kayu dan ubi jalar mengalami kenaikan namun dengan total produksi sedikit mengalami penurunan. Produksi padi terus mengalami penurunan sampai di tahun 2023 hanya 1.314,98 ton begitu juga dengan produksi tanaman lainnya sehingga menyebabkan terjadinya penurunan jumlah produksi padi dan umbi-umbian secara keseluruhan dengan total 2.410,23 ton.

## **BAB IV PRIORITAS PROGRAM**

### **4.1. Pengembangan Logika Program (Theory of Change)**

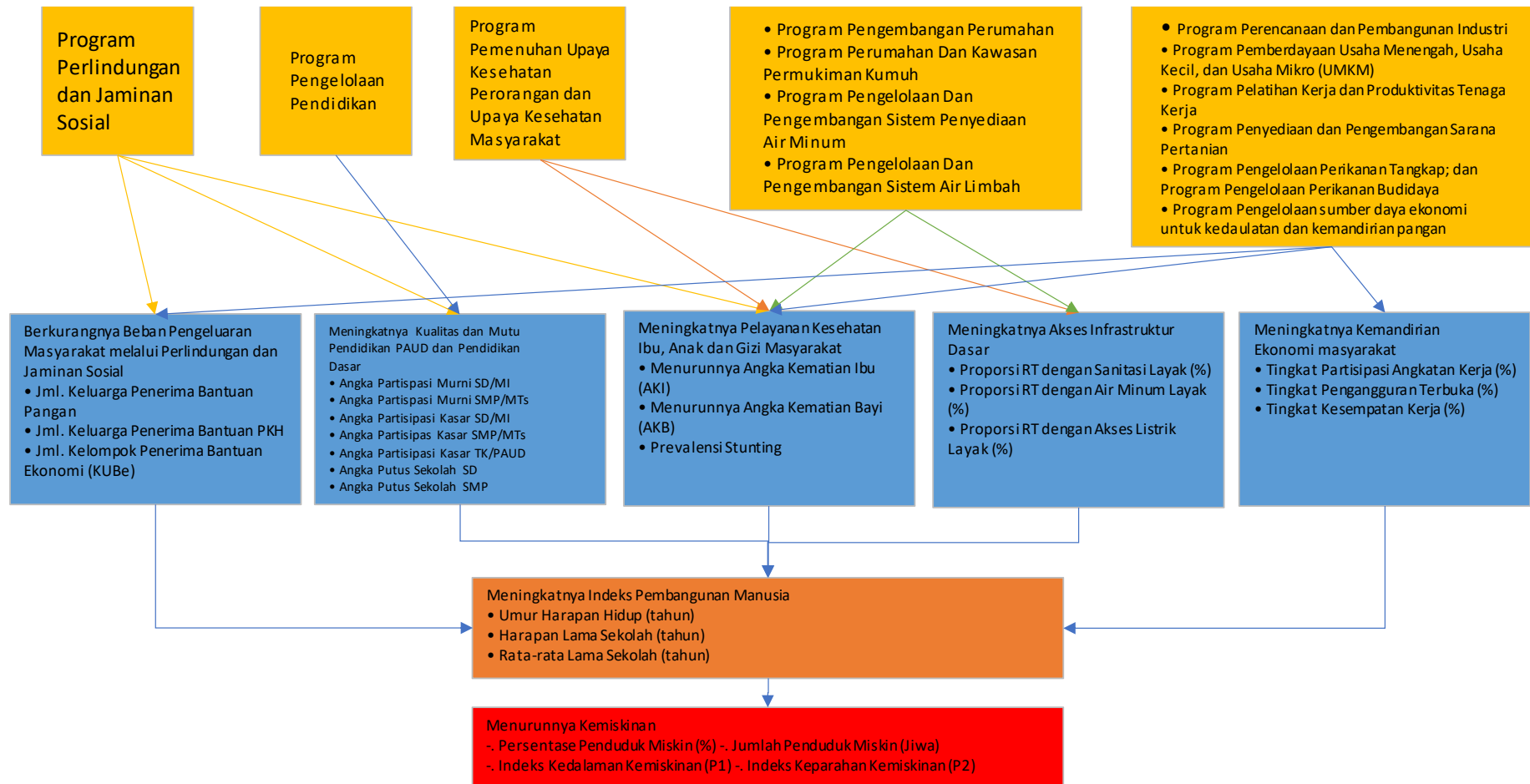
Theory of Change (ToC) adalah metodologi untuk menentukan outcome yang ingin dicapai sekaligus memproyeksikan langkah untuk mencapainya melalui intervensi program kebijakan. Theory of Change mendefinisikan tujuan jangka panjang atau menengah dan kemudian memetakan ke belakang untuk mengidentifikasi prasyarat yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

Metodologi ini digunakan sebagai persyaratan wajib dalam merancang sebuah proyek kebijakan yang efektif dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Dengan menggunakan prinsip Theory of Change, maka logika program akan menjelaskan mengapa sebuah program atau kebijakan diambil, dan nantinya akan bermanfaat sebagai basis untuk pemantauan dan evaluasi.

Penyusunan teori perubahan dapat diawali dengan mengumpulkan dan mengkaji ulang seluruh hasil kajian dan evaluasi yang pernah dilakukan. Kemudian dari bahan tersebut dapat diperkirakan apa yang terjadi jika intervensi dilakukan. Diharapkan setelah mengerjakan metodologi ini, maka praktisi dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang strategi dan taktik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Berikut pengembangan beberapa Logika Program (Theory of Change) berdasarkan permasalahan penyebab kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur yang telah dibahas pada Bab III sebelumnya.

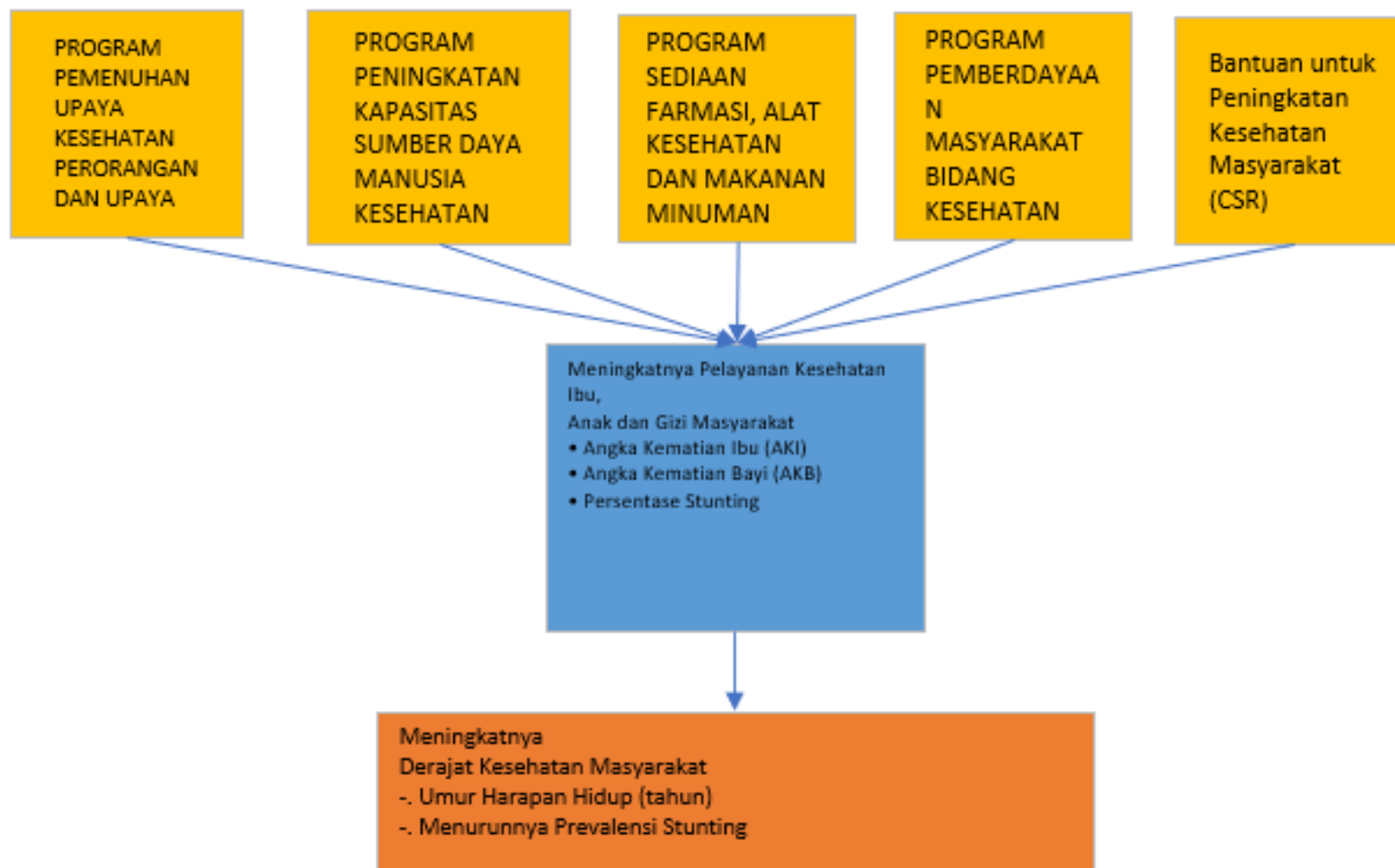
## BAB IV PRIORITAS PROGRAM



## 1. Bidang Pendidikan



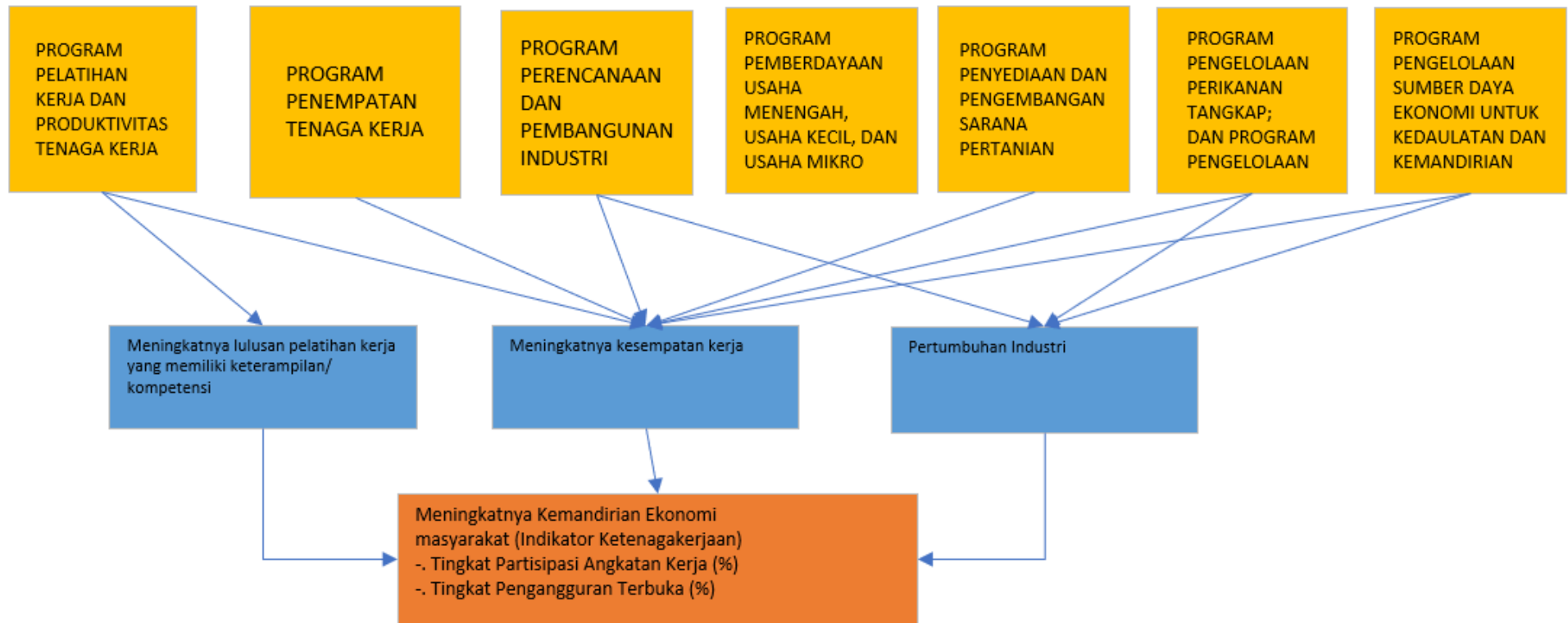
## 2. Bidang Kesehatan



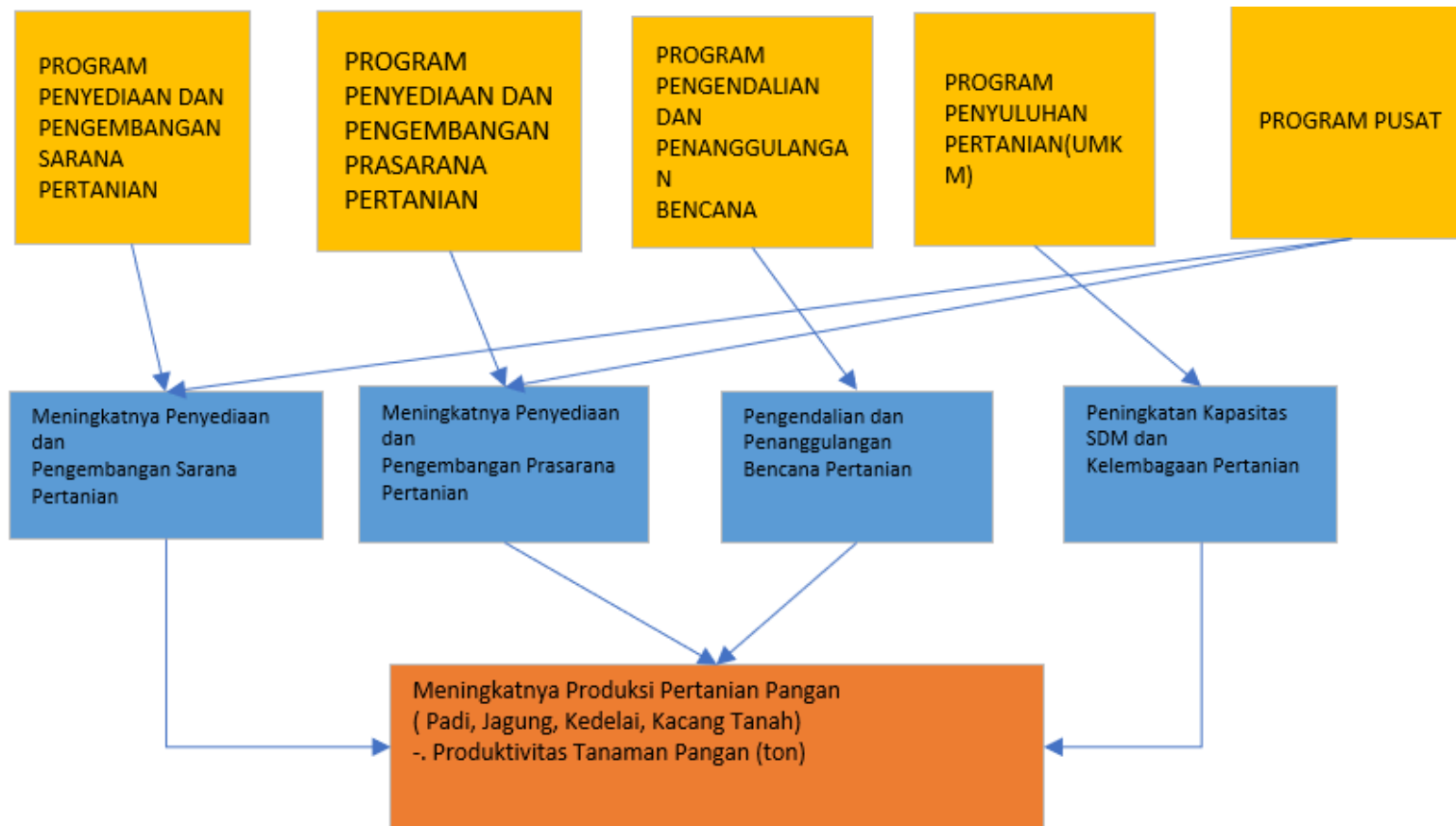
### 3. Bidang Infrastruktur Dasar



#### 4. Bidang Ketenagakerjaan



#### 5. Bidang Ketahanan Pangan





**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 -2025**

---



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

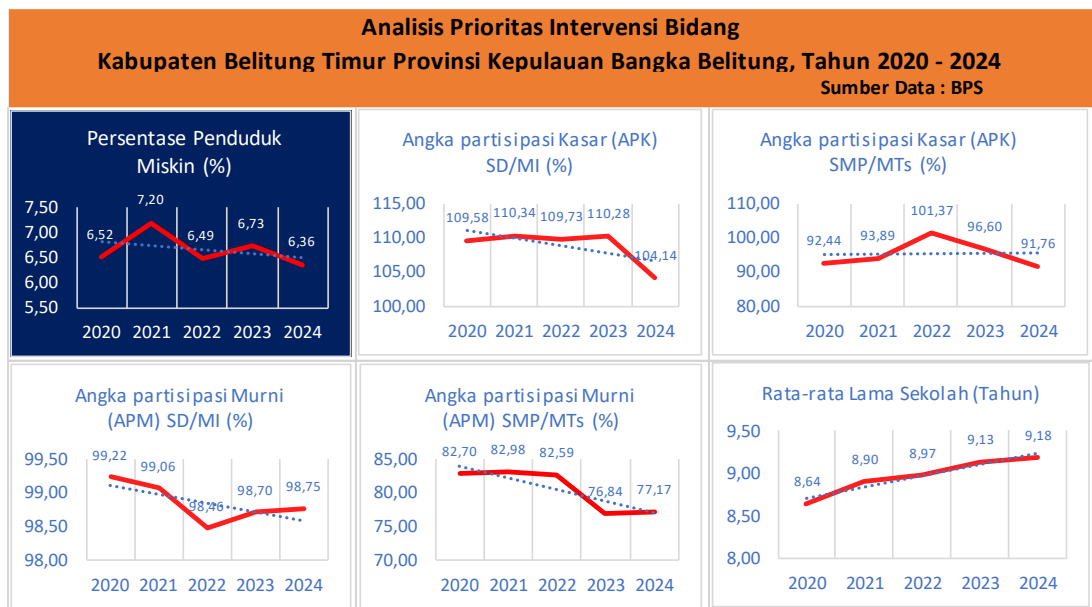
### 4.2. Analisis Keterkaitan (Causal Relationship)

Causal relationship adalah merupakan metode untuk menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan (causes) terjadinya suatu peristiwa atau perilaku tertentu. Causal relationship ini menjelaskan bahwa perubahan dapat terjadi akibat dilakukannya intervensi terhadap determinan-determinan tertentu baik disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Sebagai contoh adalah masalah kemiskinan yang menjadi salah satu permasalahan bangsa Indonesia. Atribut penyebab kemiskinan dilakukan untuk mengetahui dimensi lain yang memiliki keterkaitan dalam permasalahan kemiskinan untuk secara bersama-sama diintervensi melalui kebijakan dan rencana-rencana strategis daerah.

Berikut pengembangan beberapa hasil analisis keterkaitan (Causal relationship) berdasarkan permasalahan penyebab kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur yang telah dibahas sebelumnya.

Gambar 4.1

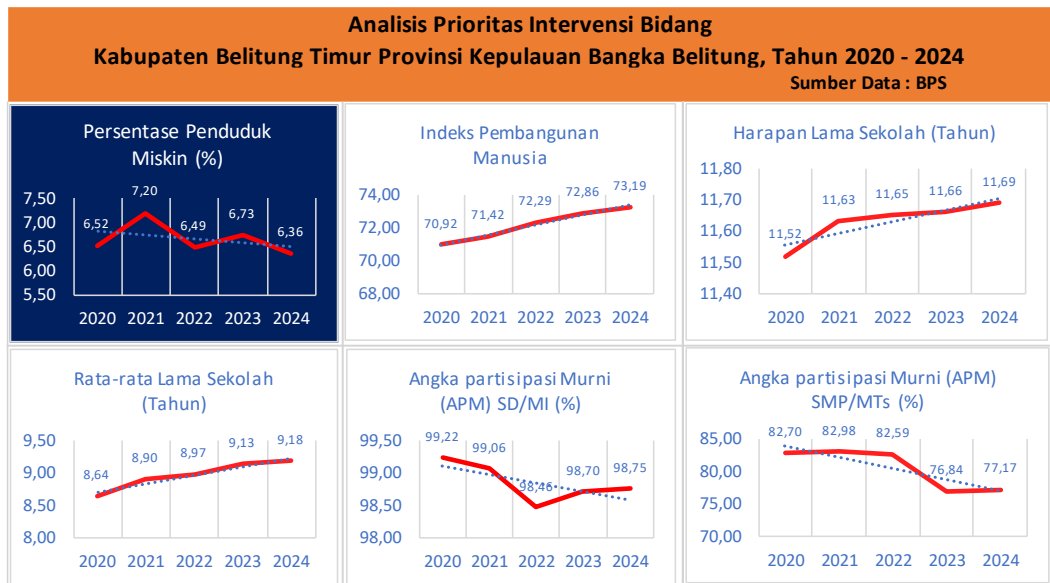
### Analisis Keterkaitan Penyebab Kemiskinan





## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

### PENDIDIKAN



Dalam bidang pendidikan, terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan Indeks pembangunan Manusia, sementara angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar Pendidikan Tingkat SD dan SMP capaiannya masih fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan.

Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menunjukkan keterkaitan dengan penurunan angka kemiskinan untuk Kabupaten Belitung Timur. Walaupun demikian, seluruh aspek tersebut harus terus ditingkatkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur.

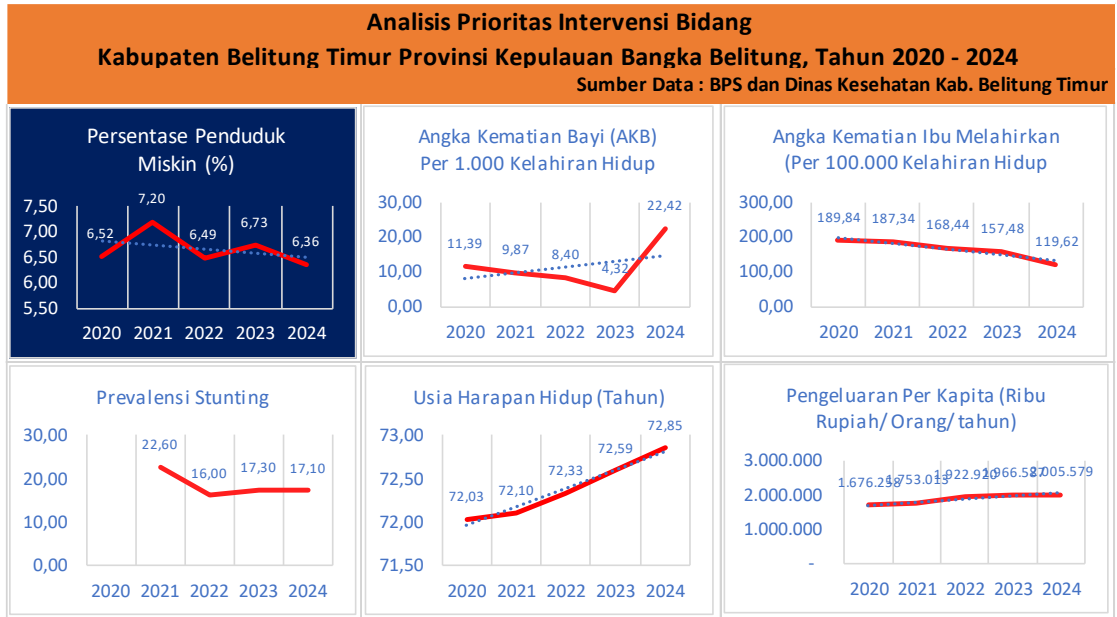
### KESEHATAN

Untuk bidang kesehatan, analisis keterkaitan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur, terlihat adanya keterkaitan pada indikator angka kematian ibu melahirkan yang turun, prevalensi stunting mengalami penurunan, sementara angka kematian bayi cenderung meningkat. Prevalensi stunting ini menjadi isu global dan nasional yang harus terus menjadi atensi daerah untuk diturunkan sesuai target Daerah prevalensi stunting dengan target 12,47% pada tahun 2029, target penurunan stunting kabupaten Belitung Timur lebih tinggi dari target nasional, Dimana target nasional 2029 sebesar 14,2 persen. Capaian Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai 17,1% dan capaian nasional 20,1 persen.

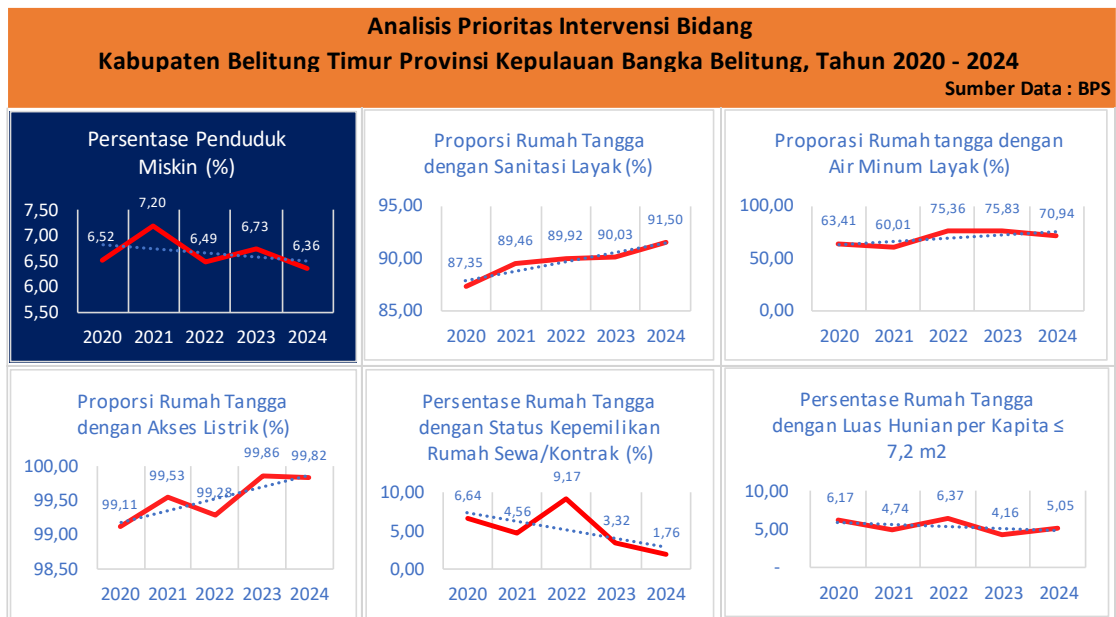


## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

No	Angka Prevalensi Stunting	Baseline 2024 (%)	Target (%)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Target Nasional (RPJMN)	20,1	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	13,2
2.	Target Daerah (RPJMD Kab. Belitung Timur)	17,1	16,34	15,38	14,42	13,46	12,47	11,51



### Infrastruktur Dasar

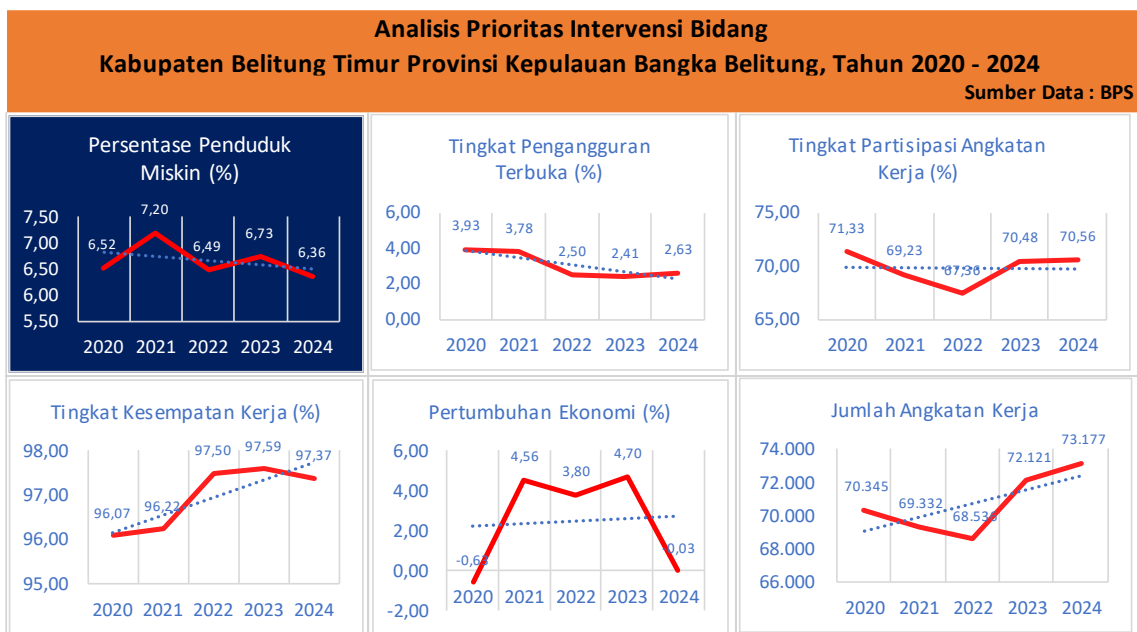




## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Untuk akses infrastruktur dasar, dari grafik terlihat analisis keterkaitan penyebab kemiskinan terletak pada proporsi sanitasi layak dan air minum layak yang terus mengalami kenaikan. Walaupun demikian perlu percepatan capaian Ketersediaan akses infrastruktur dasar ini harus terus ditingkatkan terkait juga dengan intervensi untuk penanganan perumahan tidak layak huni dan Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Belitung Timur.

### KETENAGAKERJAAN



Dalam bidang ketenagakerjaan, analisis keterkaitan penyebab kemiskinan untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif (berdampak untuk seluruh masyarakat bukan kelompok tertentu saja), yang akan berpengaruh untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja.

### 1.3. Kondisi Fiskal

Kinerja pelaksanaan APBD menguraikan analisis terhadap realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2020-2024. Pada periode 2020-2024,

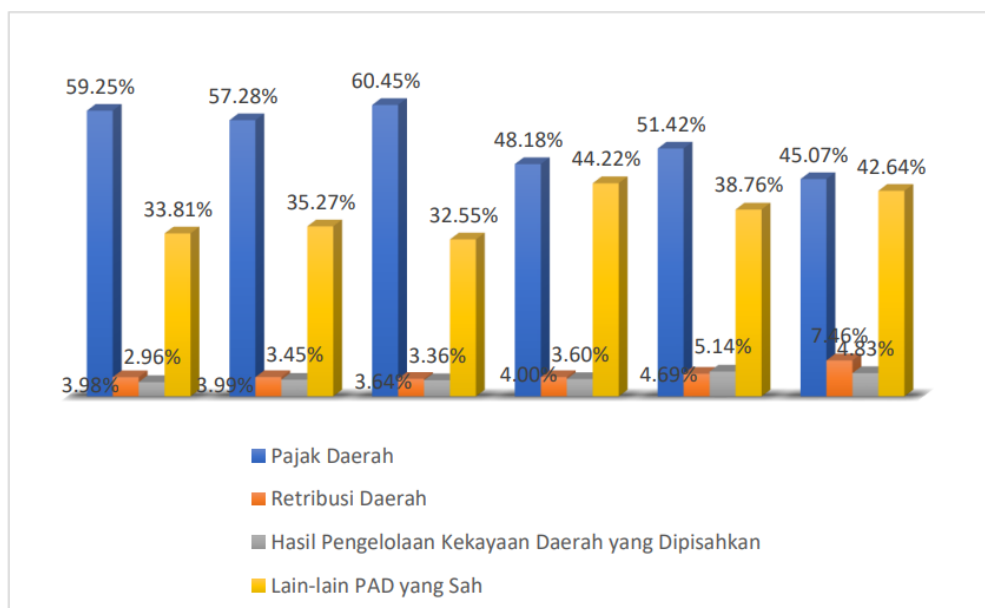


## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu Tahun Anggaran 2021-2022, menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun dalam bab ini akan disajikan analisis sebagaimana pembukuan akuntansi Akrual.

4.3.1 Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah secara rinci mencakup:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Pendapatan Transfer yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Daerah; serta
- 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Grafik Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024

Dengan memperhatikan grafik di atas, terlihat bahwa Kabupaten Belitung Timur masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendapatan transfer, terutama transfer pemerintah Pusat, dimana 90,72% dari komponen Pendapatan Transfer berasal dari pendapatan transfer pusat, naik dari tahun sebelumnya dengan proporsi 88,11%. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tingkat kemandirian daerah di hitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan daerah dengan total pendapatan. Tingkat kemandirian daerah kabupaten Belitung Timur terjadi sedikit fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024, terus meningkat dari tahun 2021 yaitu proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah 83,98% hingga mencapai 90,72% di tahun 2024.

Tabel Rincian Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

TAHUN	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Total Pendapatan Daerah
2020	88.507.836.791	687.458.507.442	17.987.700.000	793.954.044.233
2021	111.210.150.282	711.767.265.440	24.595.282.437	847.572.698.159
2022	128.256.199.761	746.010.500.214	8.646.848.214	882.913.548.189
2023	97.955.234.467	790.163.206.515	8.695.735.177	896.814.159.159
2024	102.461.502.970	767.784.168.091	1.249.750.000	871.495.421.061

#### 4.4. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi

Dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi perhatian adalah isu-isu strategis yang dianggap paling prioritas untuk ditangani sebagai hasil dari seluruh analisis program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur. Satu isu strategis dapat memuat beberapa indikator utama dalam satu bidang. Isu-isu strategis tersebut menjadi arah dari suatu hal yang akan dicapai melalui program-program secara bersama. Isu strategis dipilih dari banyak isu yang dihasilkan dari hasil analisis kemiskinan dan determinan kemiskinan pada setiap bidang, hasil evaluasi anggaran, dan kaji ulang kebijakan, yang kemudian dianalisis faktor pendorong dan penghambatnya untuk selanjutnya dapat dirumuskan isu strategisnya.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

---

Berikut adalah analisis faktor pendorong dan penghambat program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur :

### 1. Faktor Pendorong

- a. Pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat dan kapasitas yang cukup memadai untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur.

Indikasinya antara lain :

- 1) Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu Misi dalam rencana pembangunan daerah.
- 2) Adanya strategi, kebijakan, program aksi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah yang efektif sehingga indikator-indikator utama kinerja penanggulangan kemiskinan menunjukkan perkembangan yang baik dalam 5 tahun terakhir.
- b. Adanya dukungan regulasi dari Pemerintah yang mengatur dengan jelas tentang pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- c. Adanya intervensi yang cukup banyak dari pemerintah dalam Upaya penanggulangan kemiskinan di daerah, salah satunya kebijakan dalam penggunaan produk lokal daerah.
- d. Indeks Pembangunan Manusia, dengan laju kenaikan (progress) yang baik dan capaian yang terus meningkat.
- e. Rata Lama Sekolah dengan capaian yang terus meningkat.
- f. Tingkat Penangguran Terbuka tersendah dari Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- g. Potensi peningkatan kesempatan kerja dan usaha masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi yang terus tumbuh

### 2. Faktor Penghambat

- a. Persentase penduduk miskin yang masih tinggi jika dibanding dengan kabupaten/ Kota lain se provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur
- c. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) masih dibawah rata-rata provinsi.
- d. Masih tingginya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan jika dibanding dengan rata-rata provinsi



## **BAB V**

### **LOKASI PRIORITAS**

#### **5.1. Isu Strategis**

Isu strategis adalah isu-isu yang dianggap prioritas untuk ditangani sebagai hasil dari seluruh analisis program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitong Timur yang telah dilakukan pada proses Analisis Perencanaan dan Penganggaran seperti yang telah dijabarkan pada Bab 3 dan Bab 4. Satu isu strategis dapat memuat beberapa indikator utama dalam satu bidang, dimana isu-isu strategis tersebut menjadi fokus yang harus dicapai melalui program-program yang telah direncanakan.

Berbagai isu strategis dan permasalahan yang dialami masyarakat miskin harus diselesaikan secara komprehensif dan simultan bukan parsial. Berikut ini isu-isu strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitong Timur :

a. Isu Strategis Bidang Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan dasar, melalui peningkatan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan Pendidikan Kesetaraan dengan memprioritaskan pada anak usia sekolah yang tidak bersekolah .

b. Isu Strategis Bidang Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan dasar, melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan untuk perluasan akses layanan dengan prioritas pada pelayanan kesehatan balita, untuk pencegahan stunting, dan balita gizi buruk.

c. Isu Strategis Bidang Infrastruktur Dasar

Peningkatan aksesibilitas antar wilayah, melalui peningkatan sarana prasarana jalan, sarana prasarana dasar perumahan dengan memprioritaskan pada rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat terdampak bencana.

d. Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan

Masih rendahnya kualitas ketenagakerjaan, Peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi, peningkatan keterampilan SDM, dengan memprioritaskan pertumbuhan wirausaha baru, jumlah kunjungan wisatawan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

e. Isu Strategis Bidang Ketahanan Pangan

Masih tingginya ketergantungan akan pasokan pangan dari luar daerah, Pemanfaatan Sumber daya lokal dan peningkatan produksi pangan, melalui diversifikasi pangan, intensifikasi dan ekstensifikasi,.



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

---

### f. Isu Strategis Bidang Ekonomi

Peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan sarana prasarana pasar tradisional, industri pengolahan, dan kemudahan berinvestasi dengan memprioritaskan pada pertumbuhan yang berkualitas (inklusif).

Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut dilakukan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah diantaranya dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui kelompok program sebagai berikut :

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam Pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

### 5.2. Lokasi Prioritas

Penetapan lokasi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur merupakan langkah penting untuk memastikan intervensi program dan kegiatan dapat tepat sasaran. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemiskinan tidak tersebar merata di seluruh wilayah, melainkan terkonsentrasi pada desa atau kecamatan tertentu yang memiliki tingkat kemiskinan relatif lebih tinggi, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta kerentanan sosial ekonomi yang signifikan.

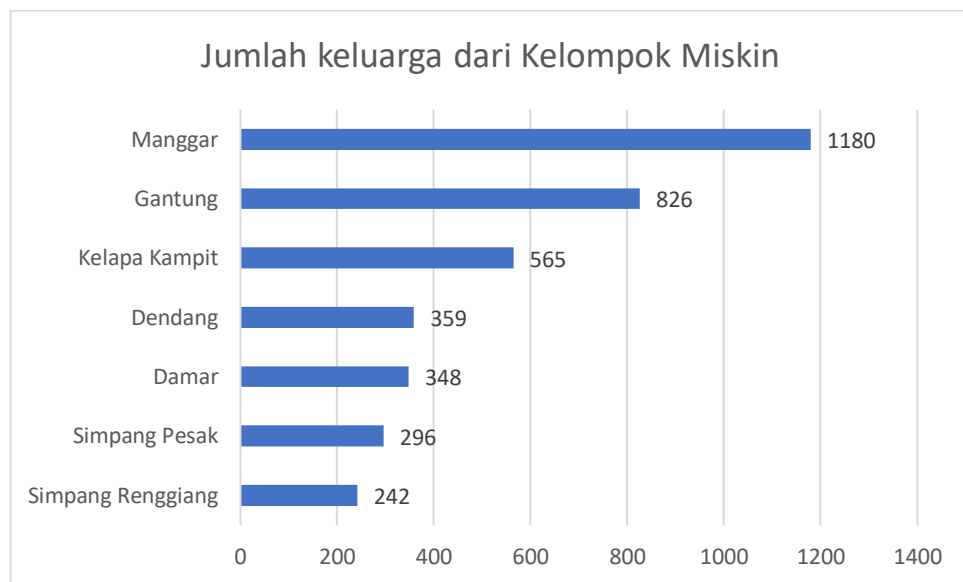


## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Melalui identifikasi lokasi prioritas, Pemerintah Kabupaten Belitong Timur berupaya mengarahkan sumber daya pembangunan secara lebih efektif dan efisien, sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat memberikan dampak nyata bagi rumah tangga miskin dan rentan. Selain itu, penetapan lokasi prioritas juga diharapkan menjadi dasar bagi koordinasi lintas perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun sinergi yang kuat untuk menurunkan angka kemiskinan

Gambar 5.1

Jumlah keluarga dari Kelompok Miskin per Kecamatan



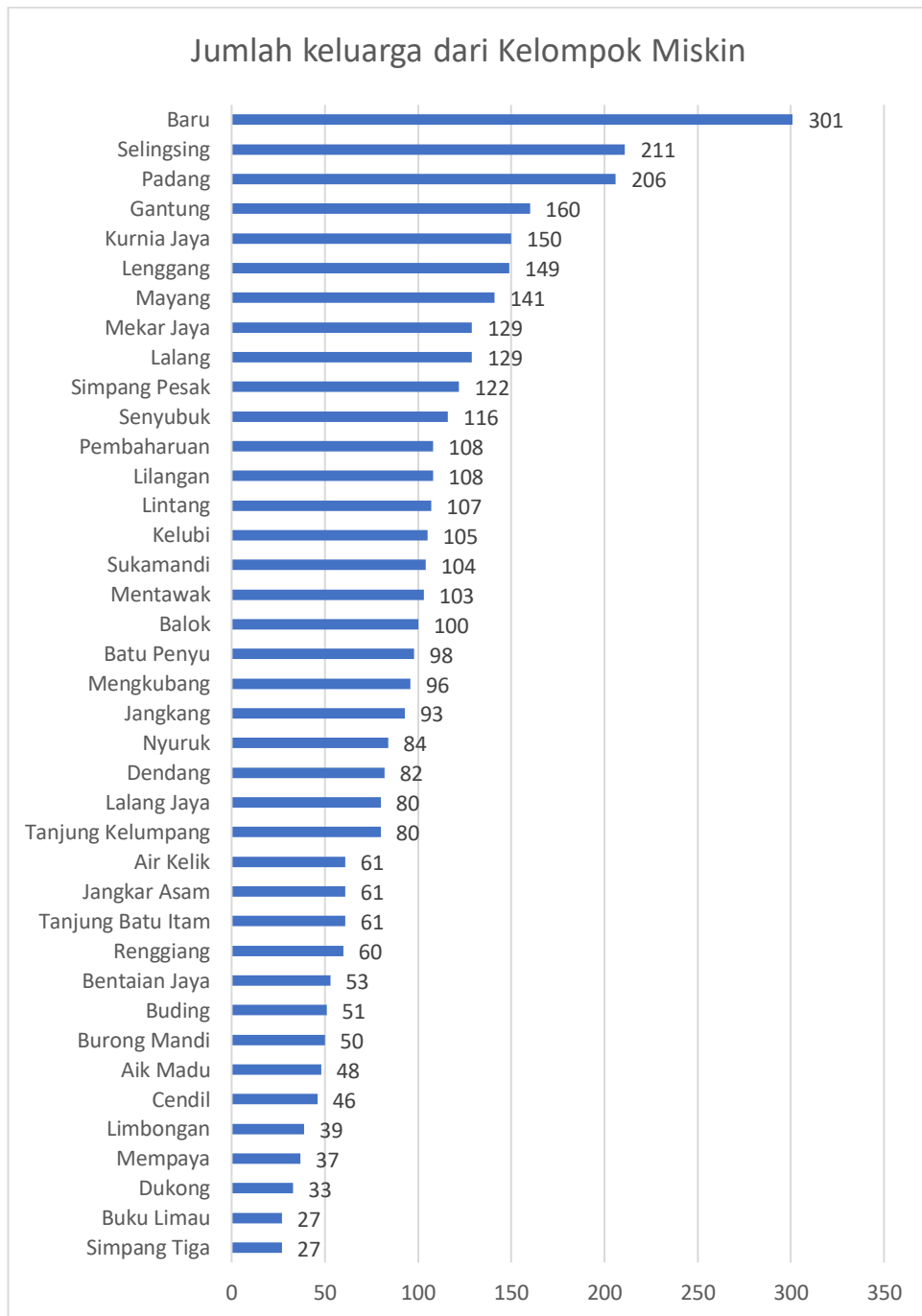
Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.2

Jumlah keluarga dari Kelompok Miskin per Desa



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

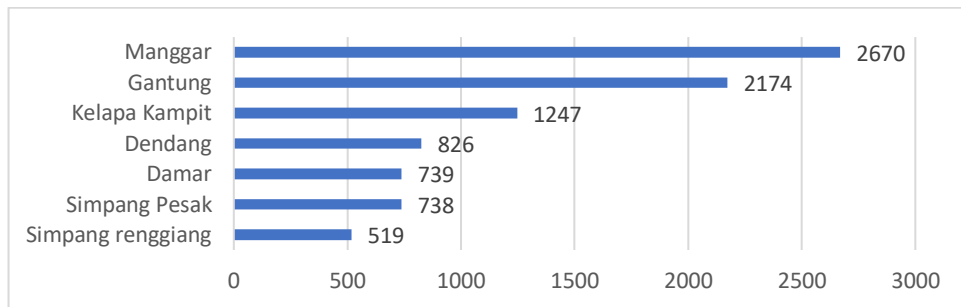


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.3 Jumlah Individu dari Kelompok Miskin per Kecamatan

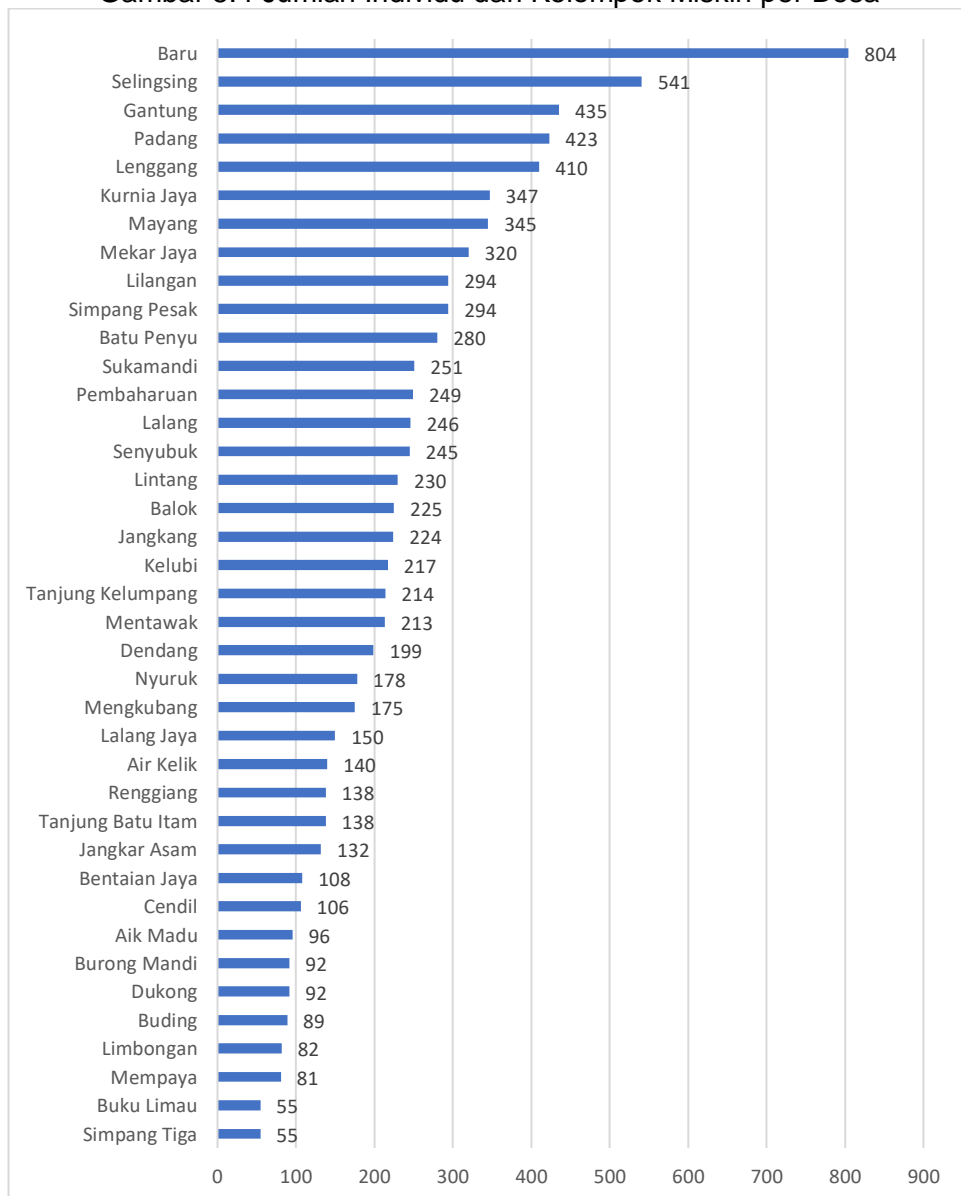


## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.4 Jumlah Individu dari Kelompok Miskin per Desa

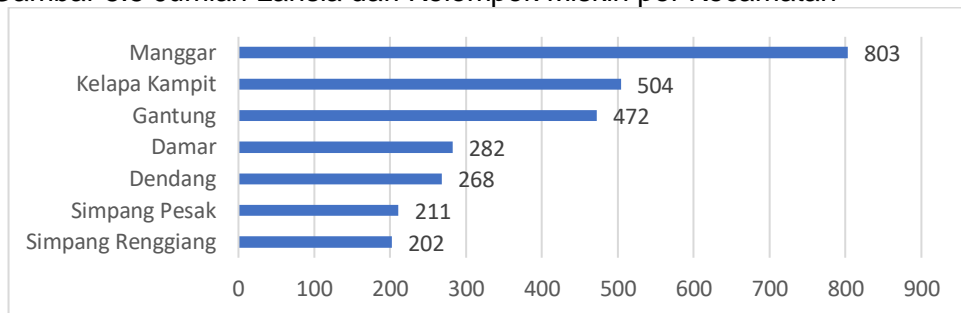


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)



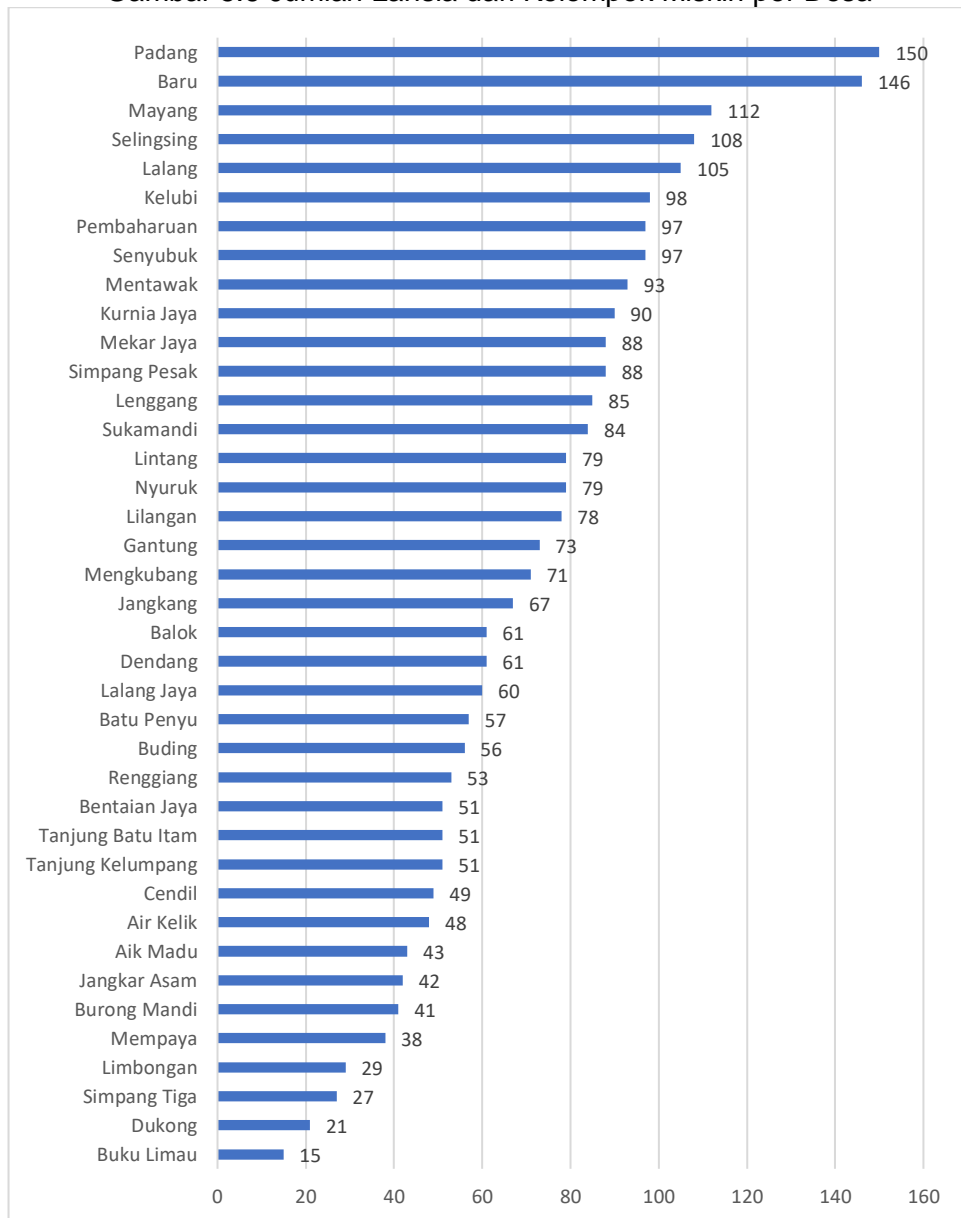
## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Gambar 5.5 Jumlah Lansia dari Kelompok Miskin per Kecamatan



Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.6 Jumlah Lansia dari Kelompok Miskin per Desa

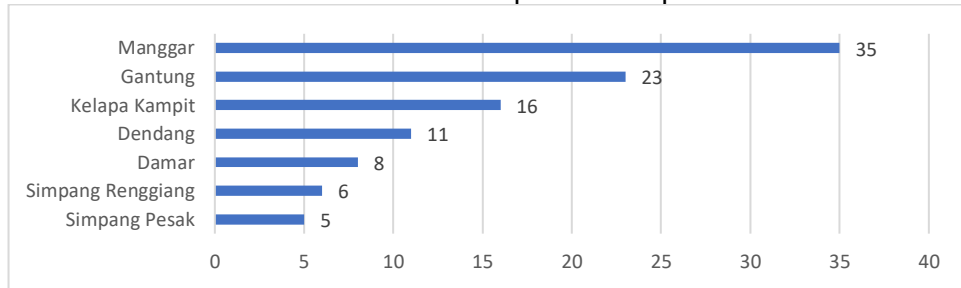


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Gambar 5.7 Jumlah Disabilitas dari Kelompok Miskin per Kecamatan

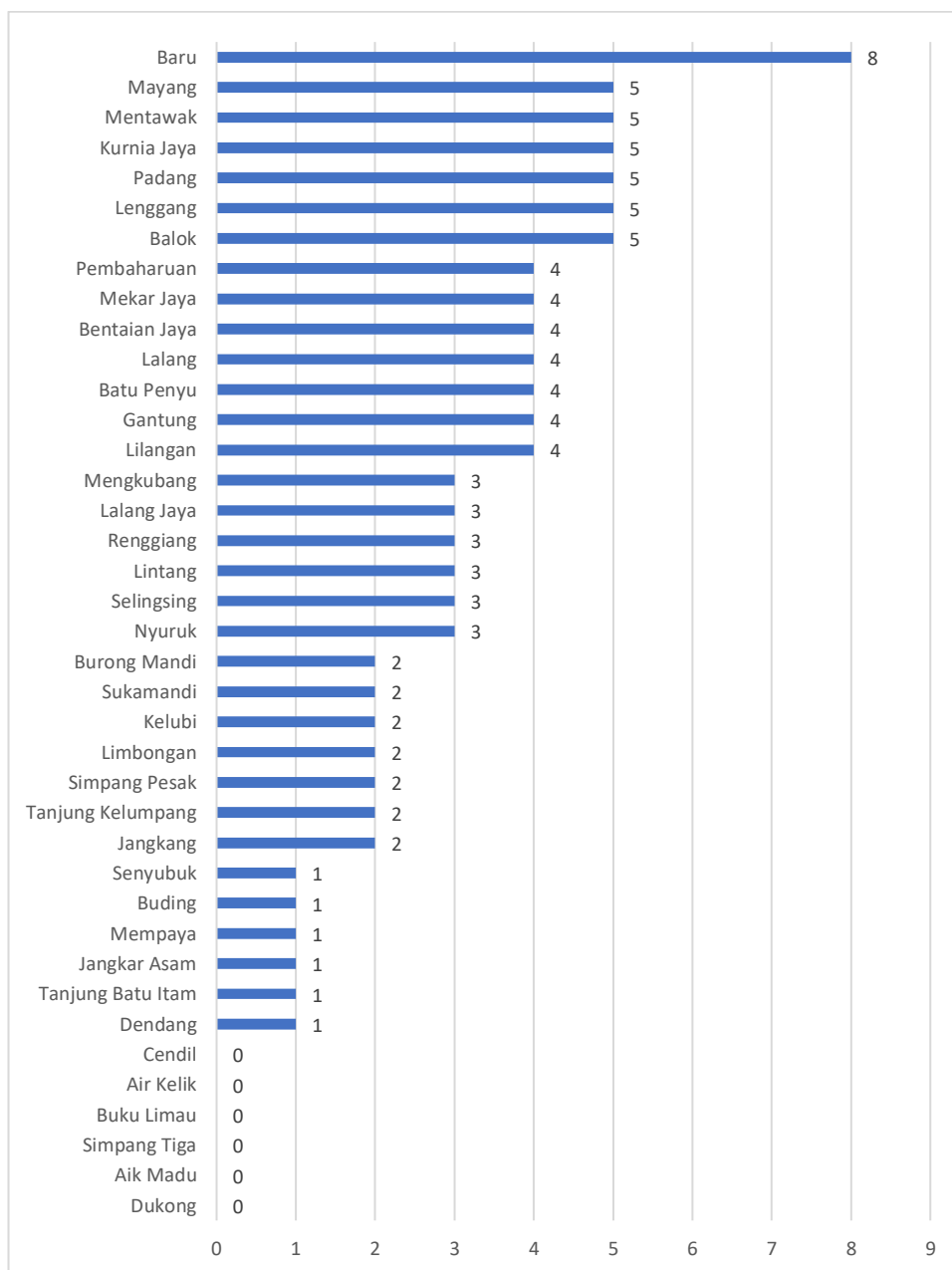


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.8 Jumlah Disabilitas dari Kelompok Miskin per Desa

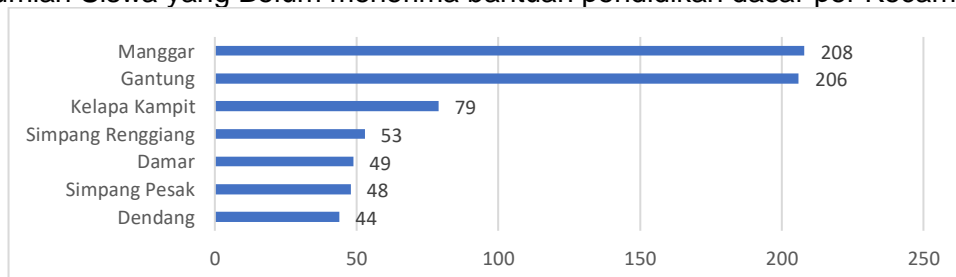


## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.9 Jumlah Siswa yang Belum menerima bantuan pendidikan dasar per Kecamatan

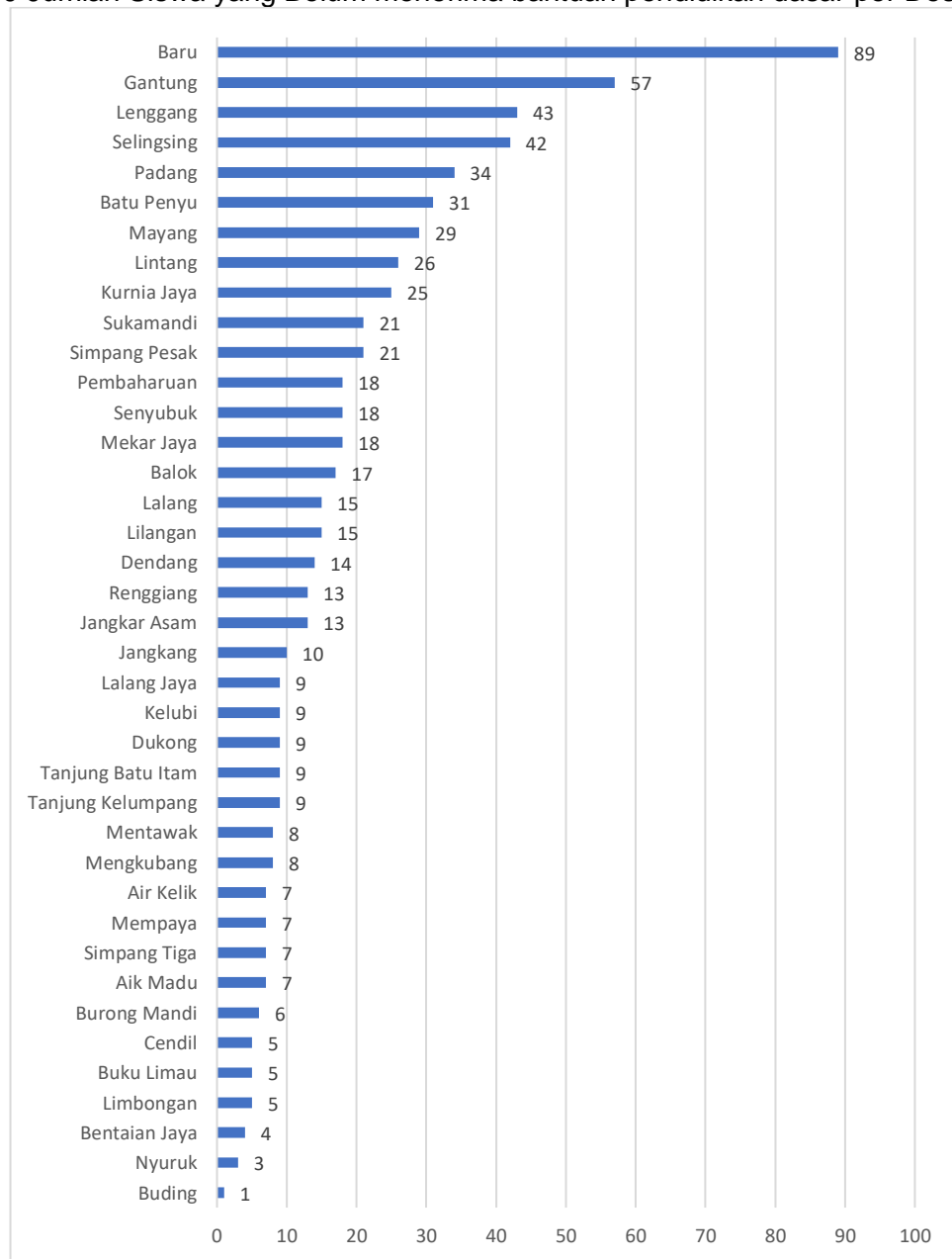


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)



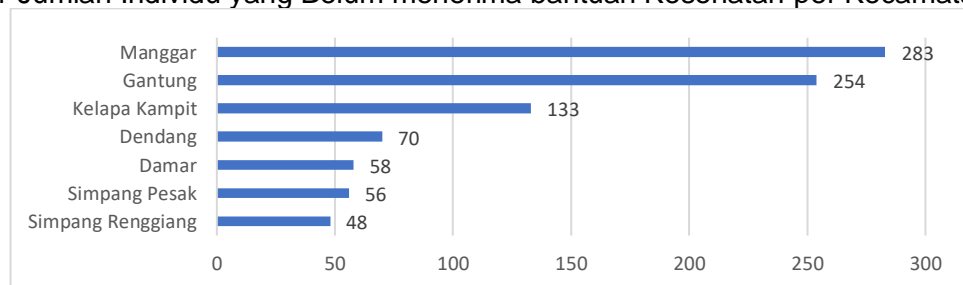
## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Gambar 5.10 Jumlah Siswa yang Belum menerima bantuan pendidikan dasar per Desa



Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.11 Jumlah Individu yang Belum menerima bantuan Kesehatan per Kecamatan

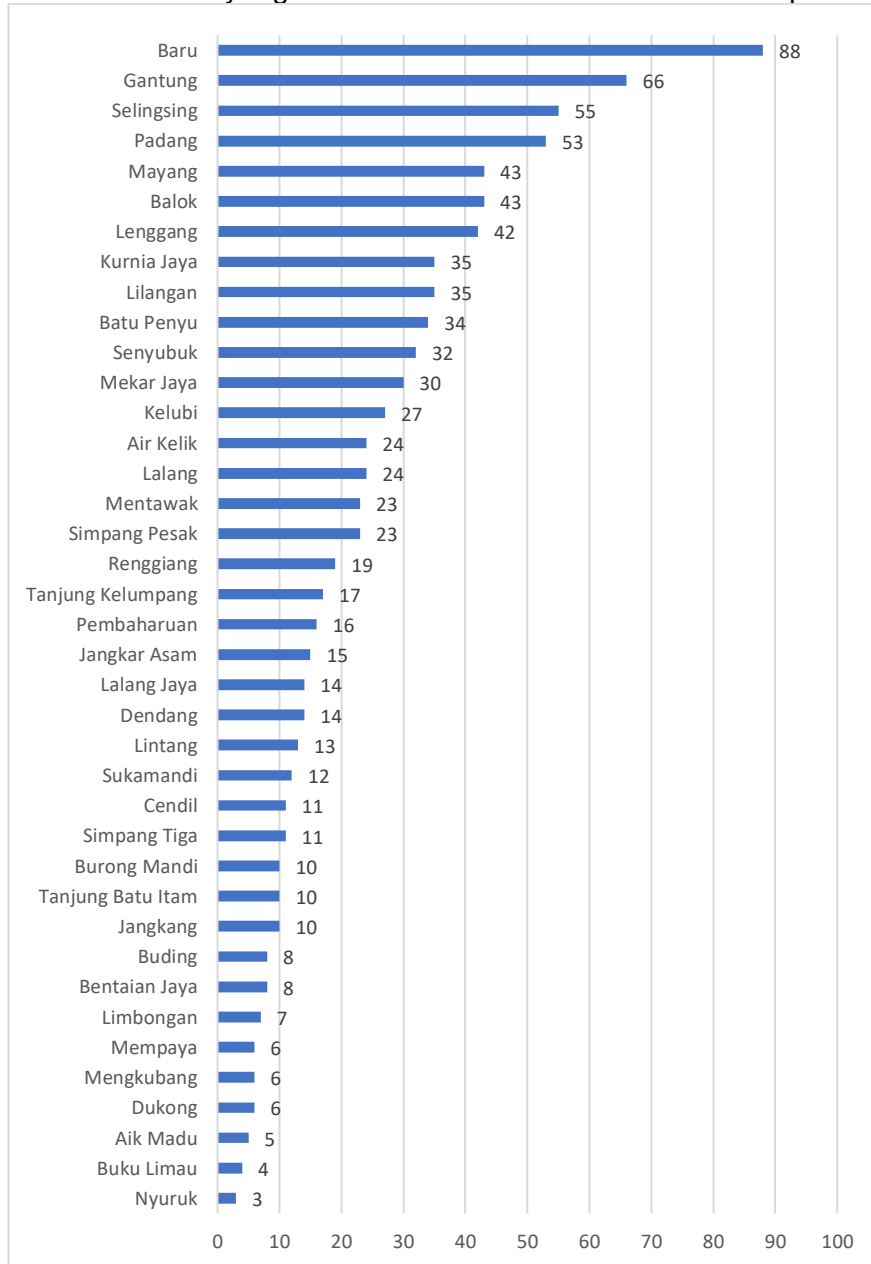


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)



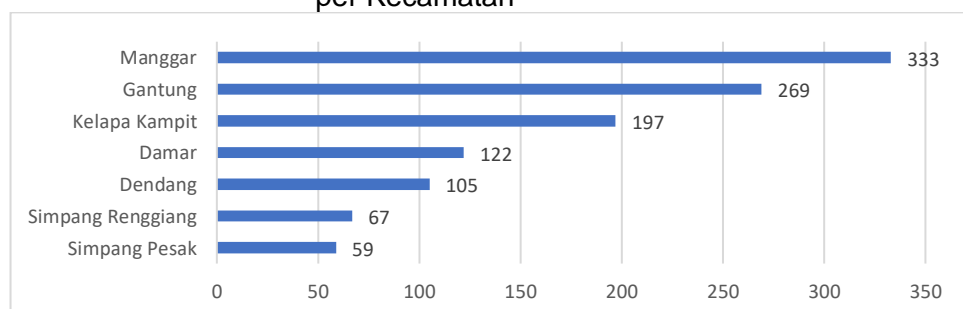
## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Gambar 5.12 Jumlah Individu yang Belum menerima bantuan Kesehatan per Desa



Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.13 Jumlah Keluarga yang Belum menerima Bansos Bersyarat tetapi memenuhi syarat per Kecamatan

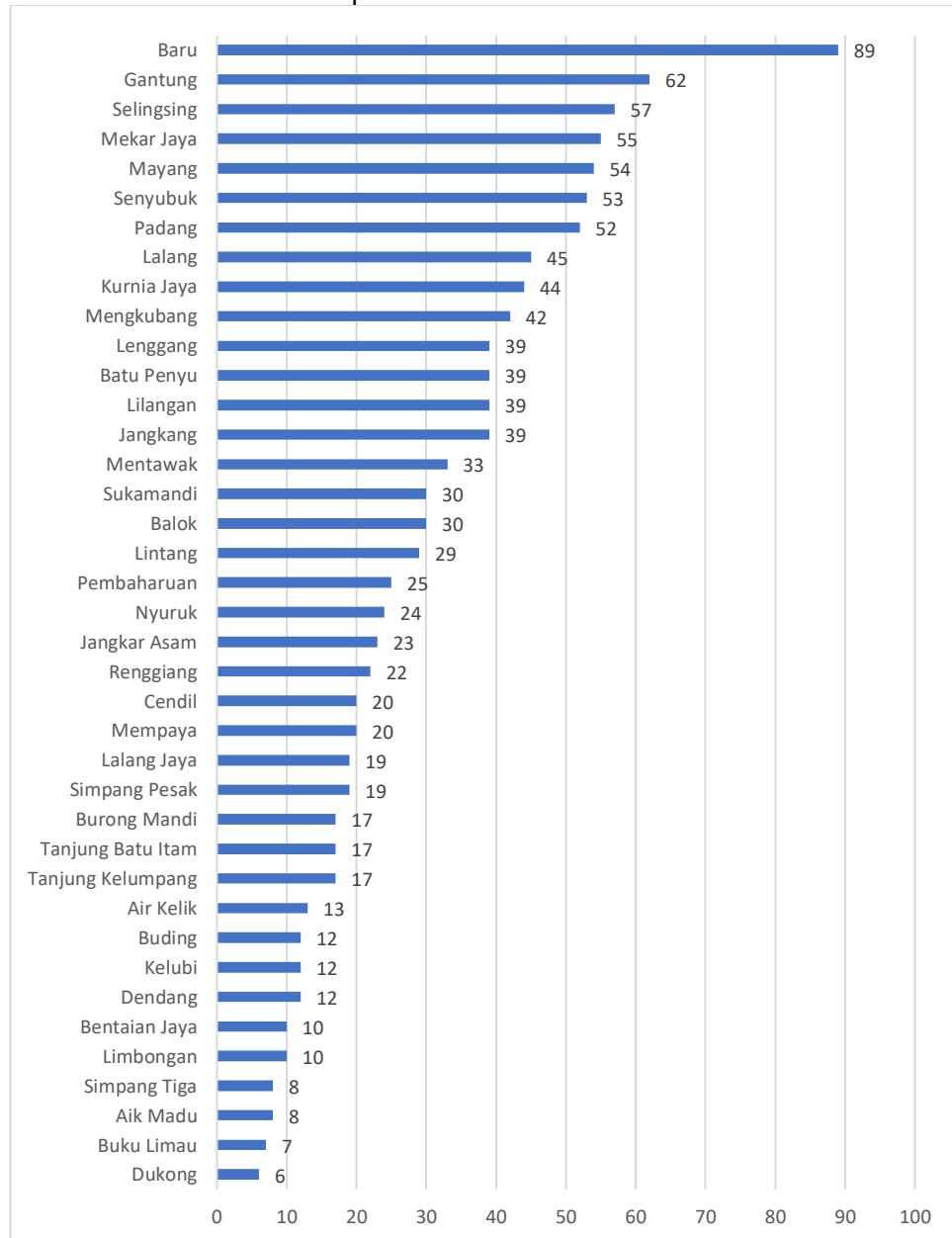




## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.14 Jumlah Keluarga yang Belum menerima Bansos Bersyarat tetapi memenuhi syarat per Desa

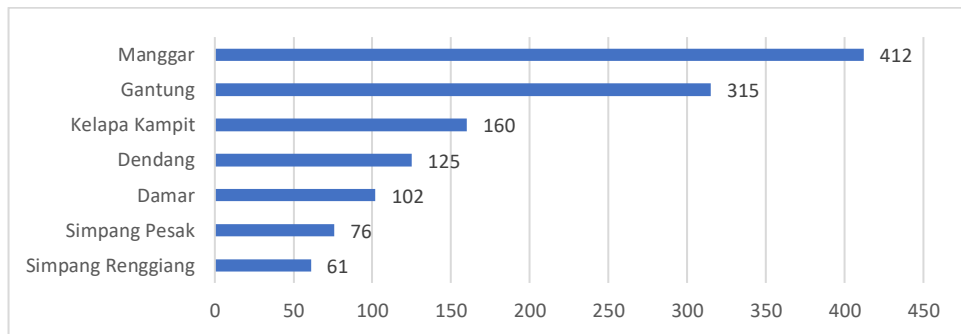


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.15 Jumlah Keluarga yang Belum menerima Bantuan Pangan per Kecamatan

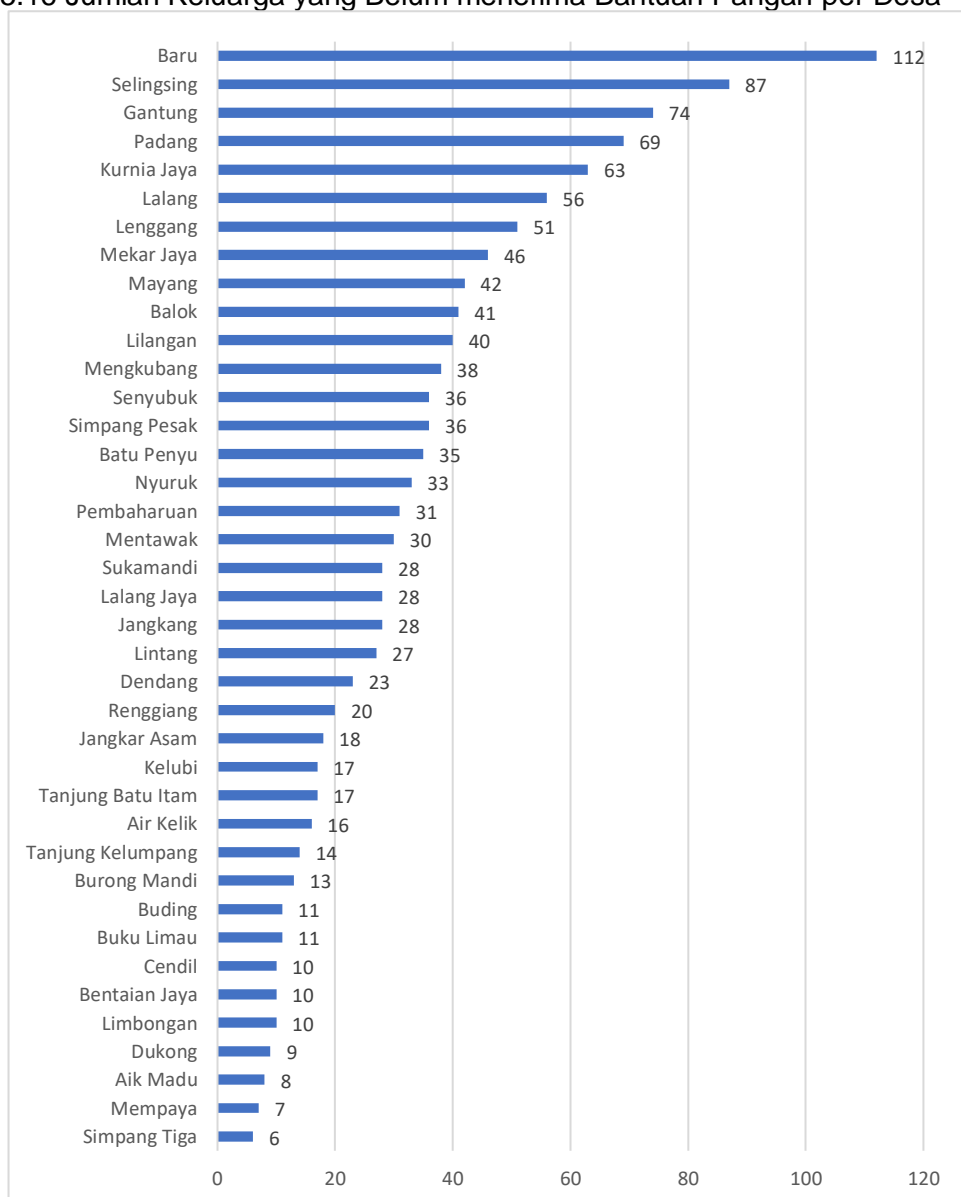


## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.16 Jumlah Keluarga yang Belum menerima Bantuan Pangan per Desa

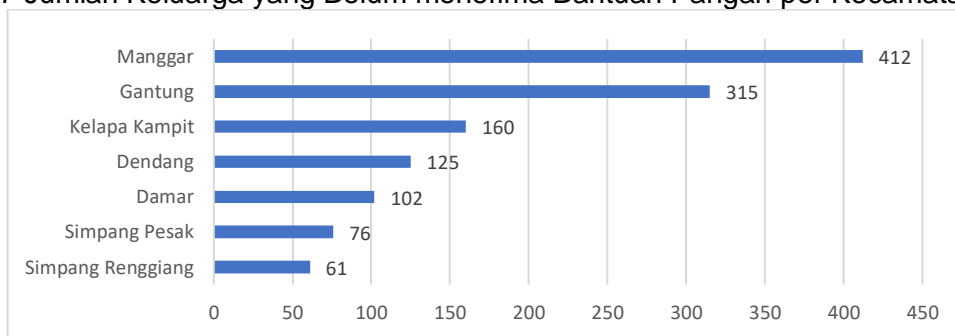


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)



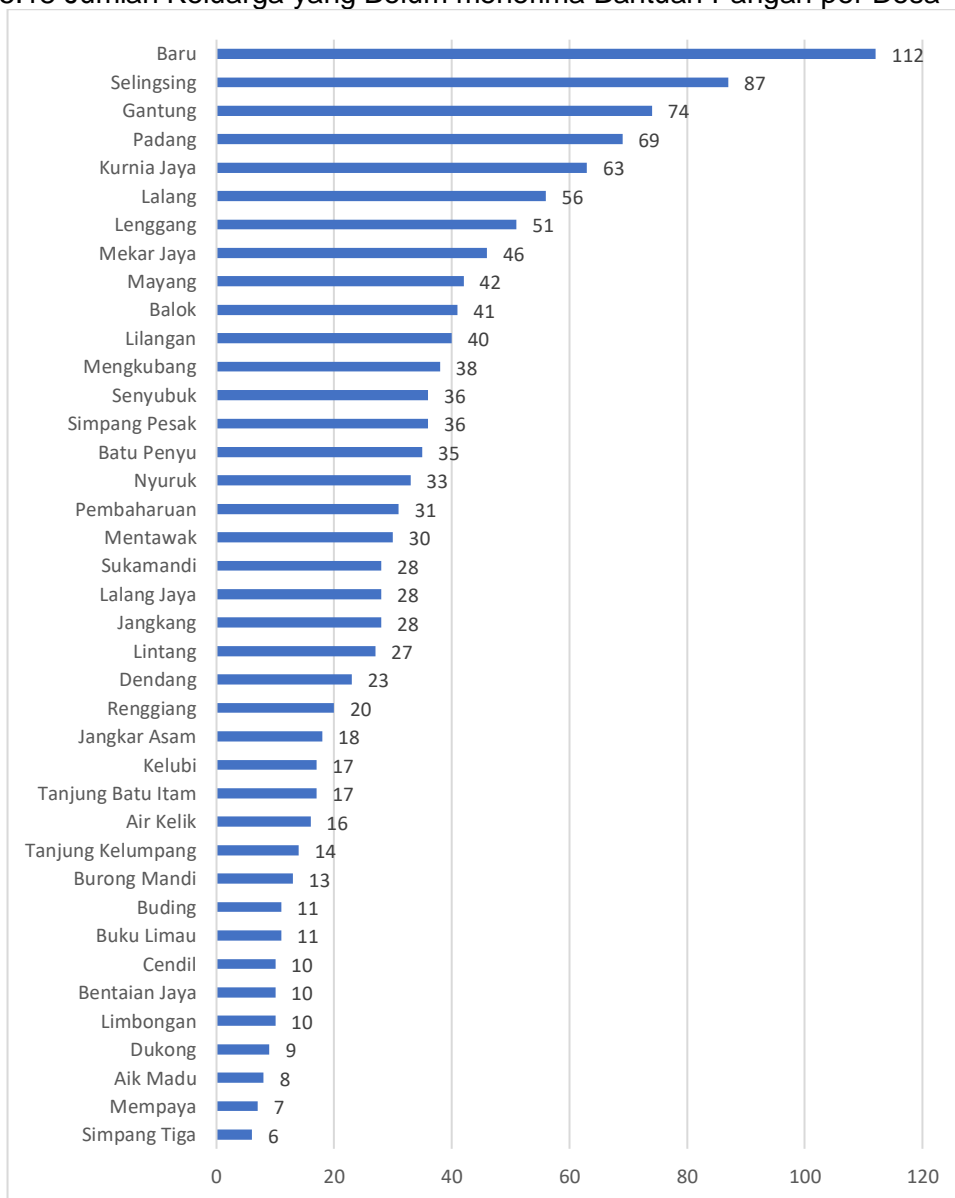
## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Gambar 5.17 Jumlah Keluarga yang Belum menerima Bantuan Pangan per Kecamatan



Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.18 Jumlah Keluarga yang Belum menerima Bantuan Pangan per Desa

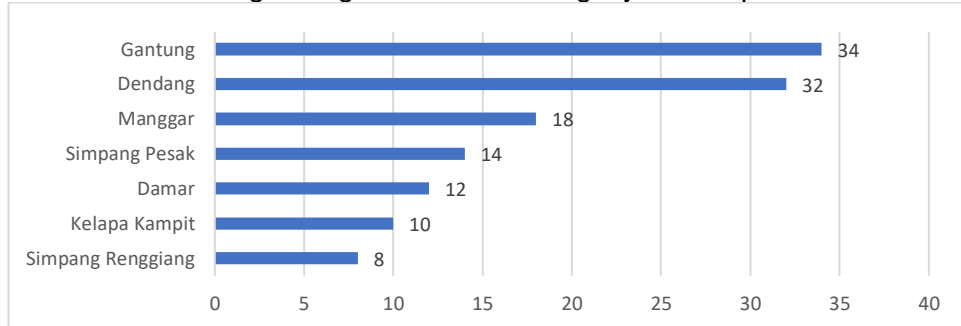


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)



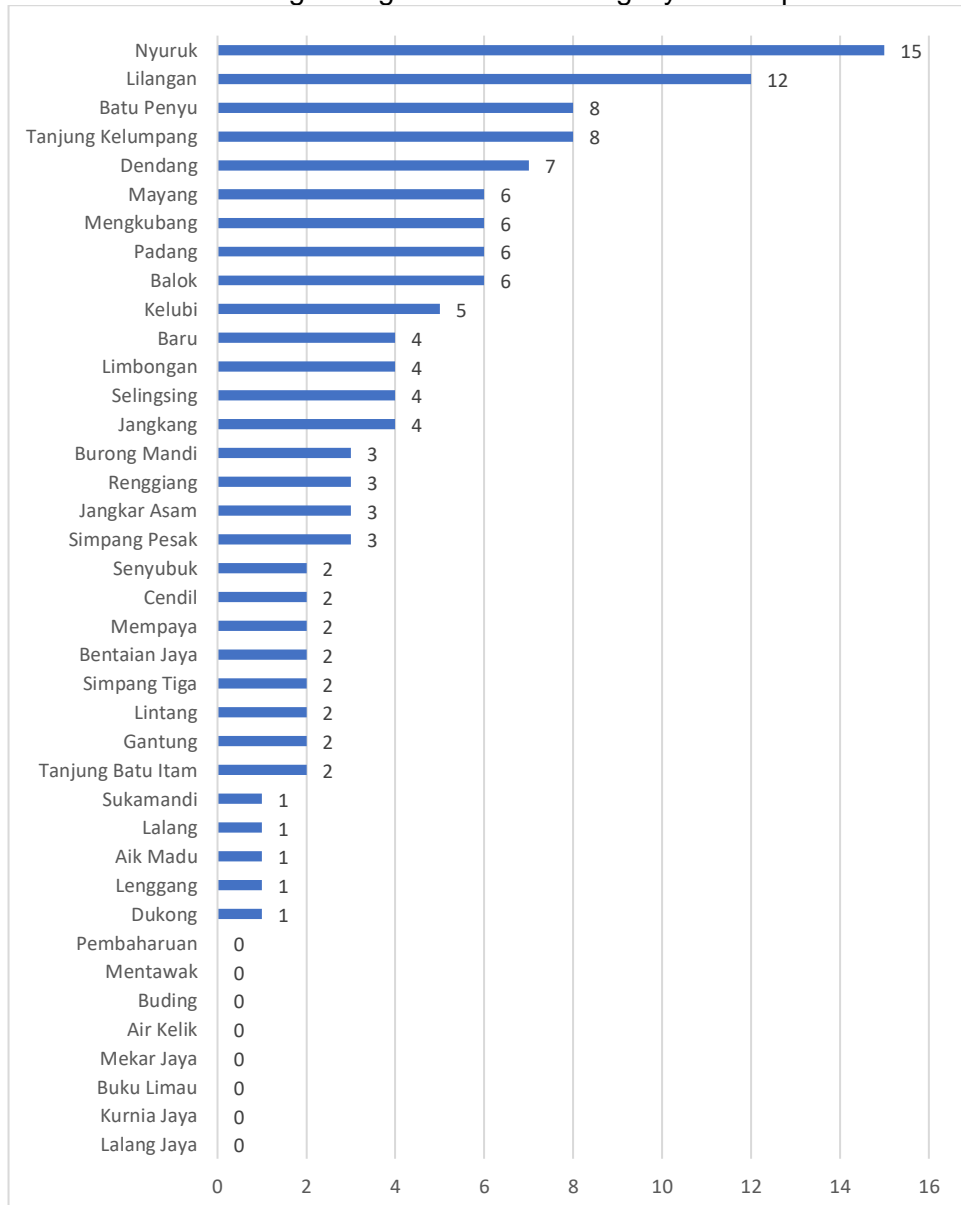
## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Gambar 5.19 Jumlah keluarga dengan Rumah Kurang layak huni per Kecamatan



Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.20 Jumlah keluarga dengan Rumah Kurang layak huni per Desa

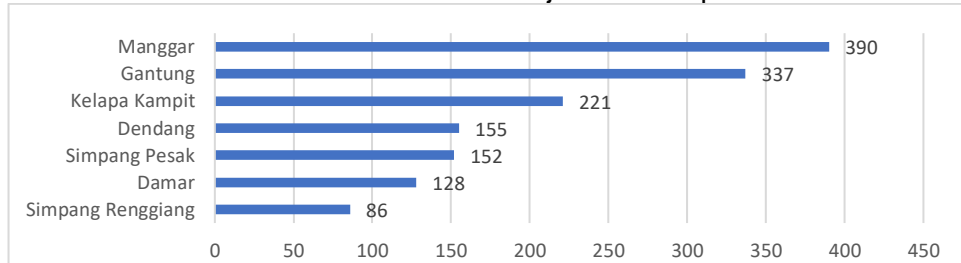




## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.21 Jumlah Usia Produktif tidak Bekerja/ Sekolah per Kecamatan

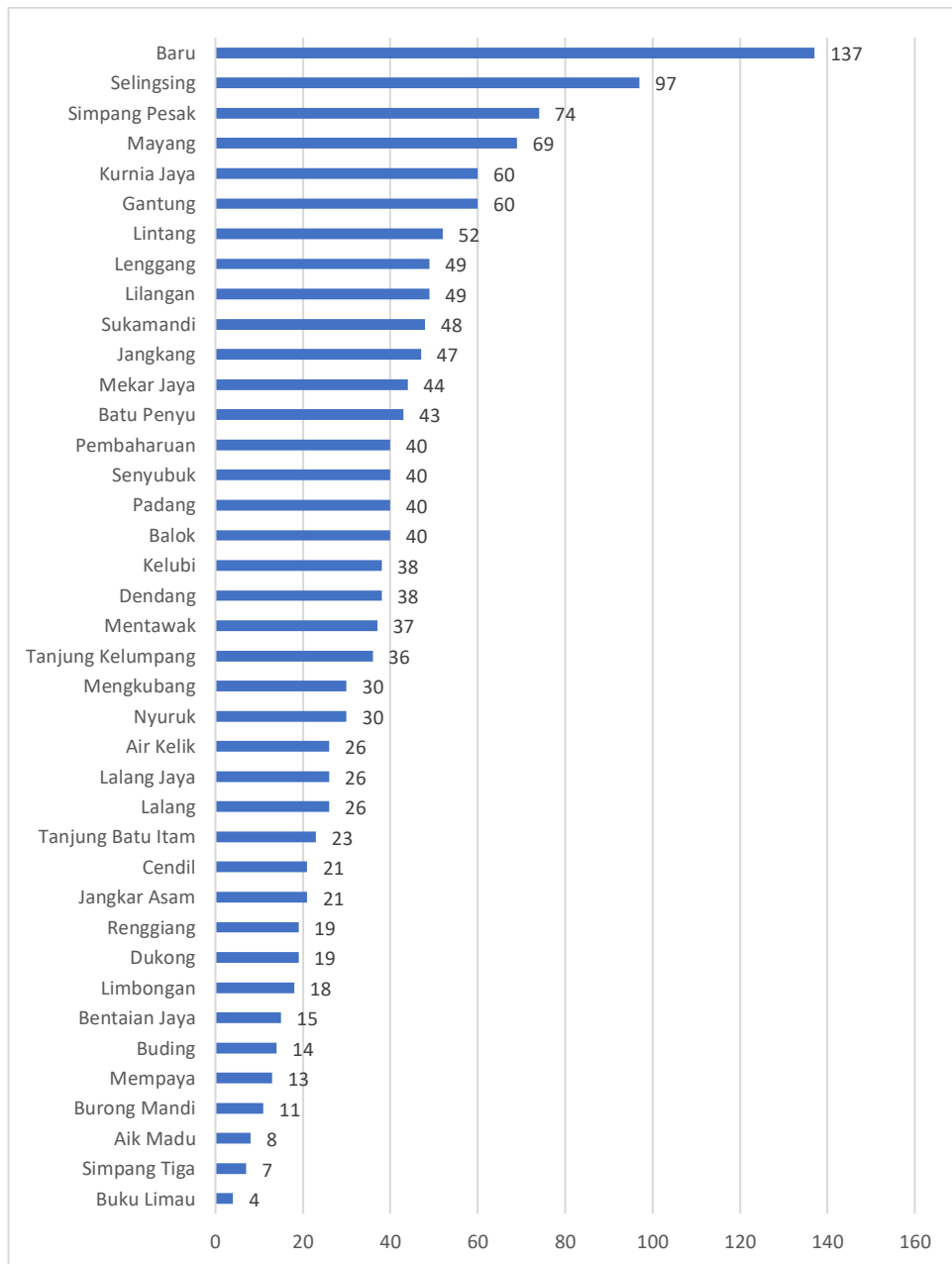


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.22 Jumlah Usia Produktif tidak Bekerja/ Sekolah per Desa

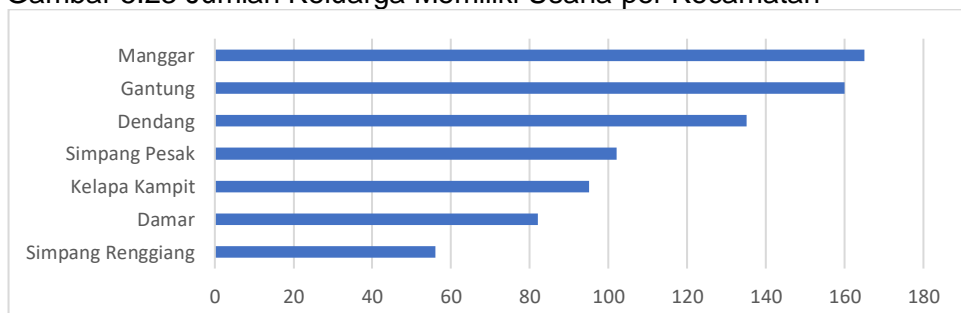


## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/  
Data : <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.23 Jumlah Keluarga Memiliki Usaha per Kecamatan

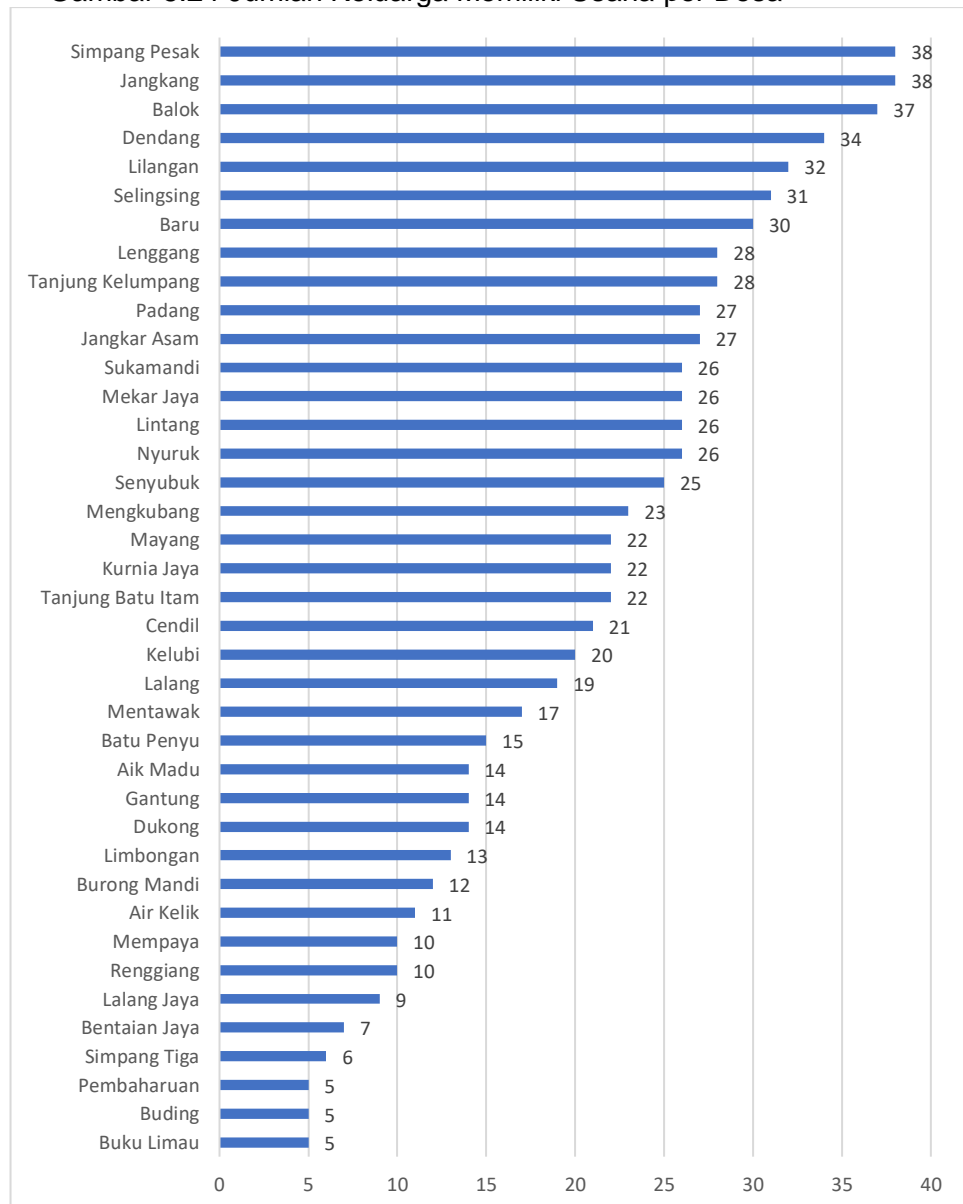




## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.24 Jumlah Keluarga Memiliki Usaha per Desa

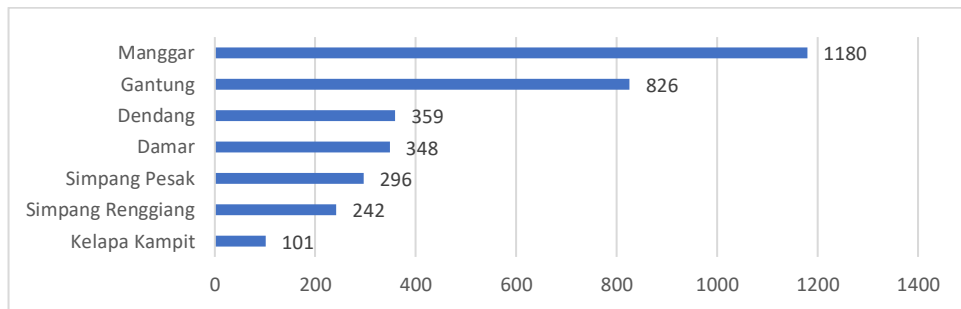


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.25 Jumlah Keluarga Tidak memiliki aset Produktif per Kecamatan

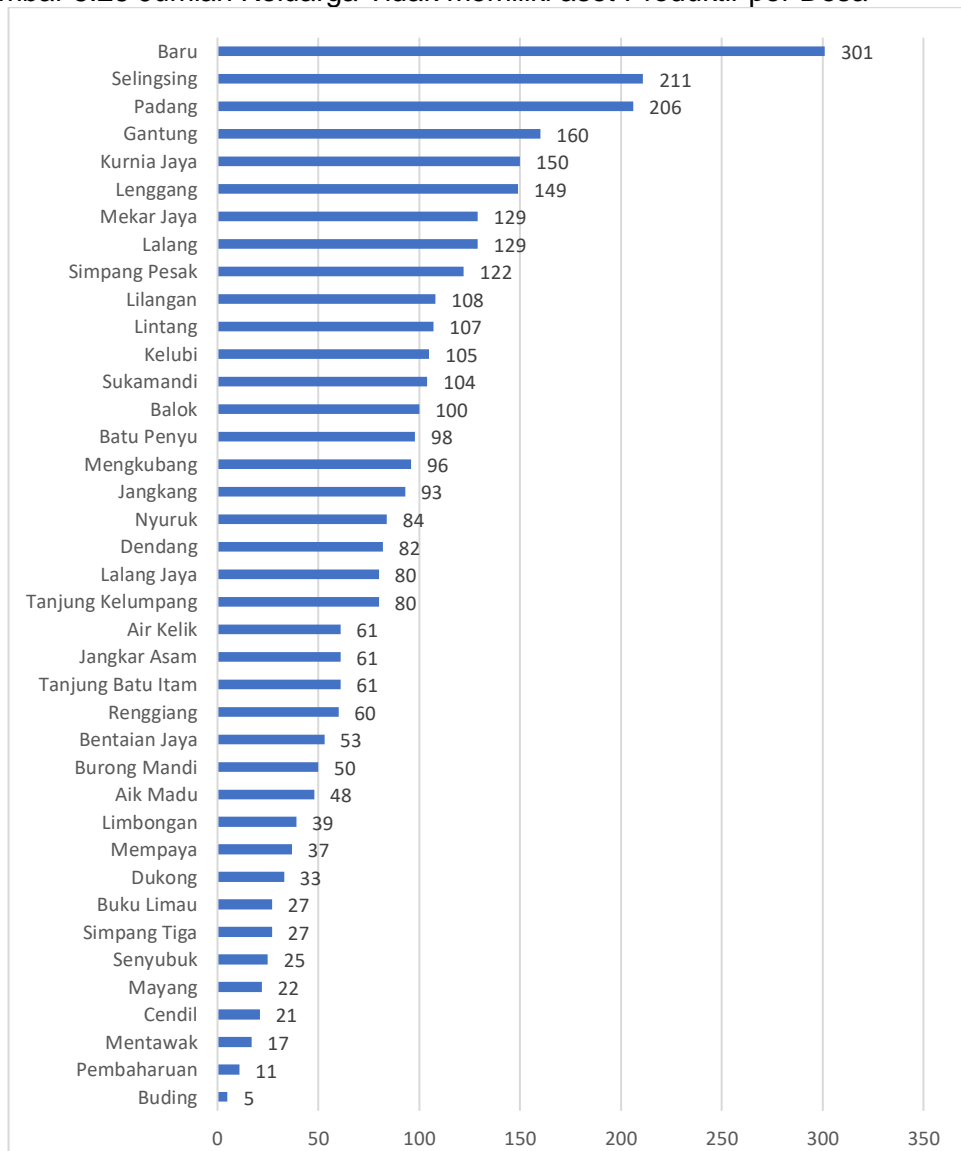


## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.26 Jumlah Keluarga Tidak memiliki aset Produktif per Desa

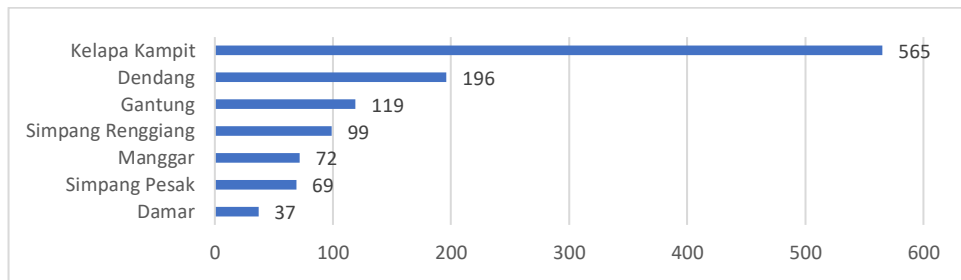


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.27 Jumlah Individu Bekerja di Sektor Pertanian per Kecamatan

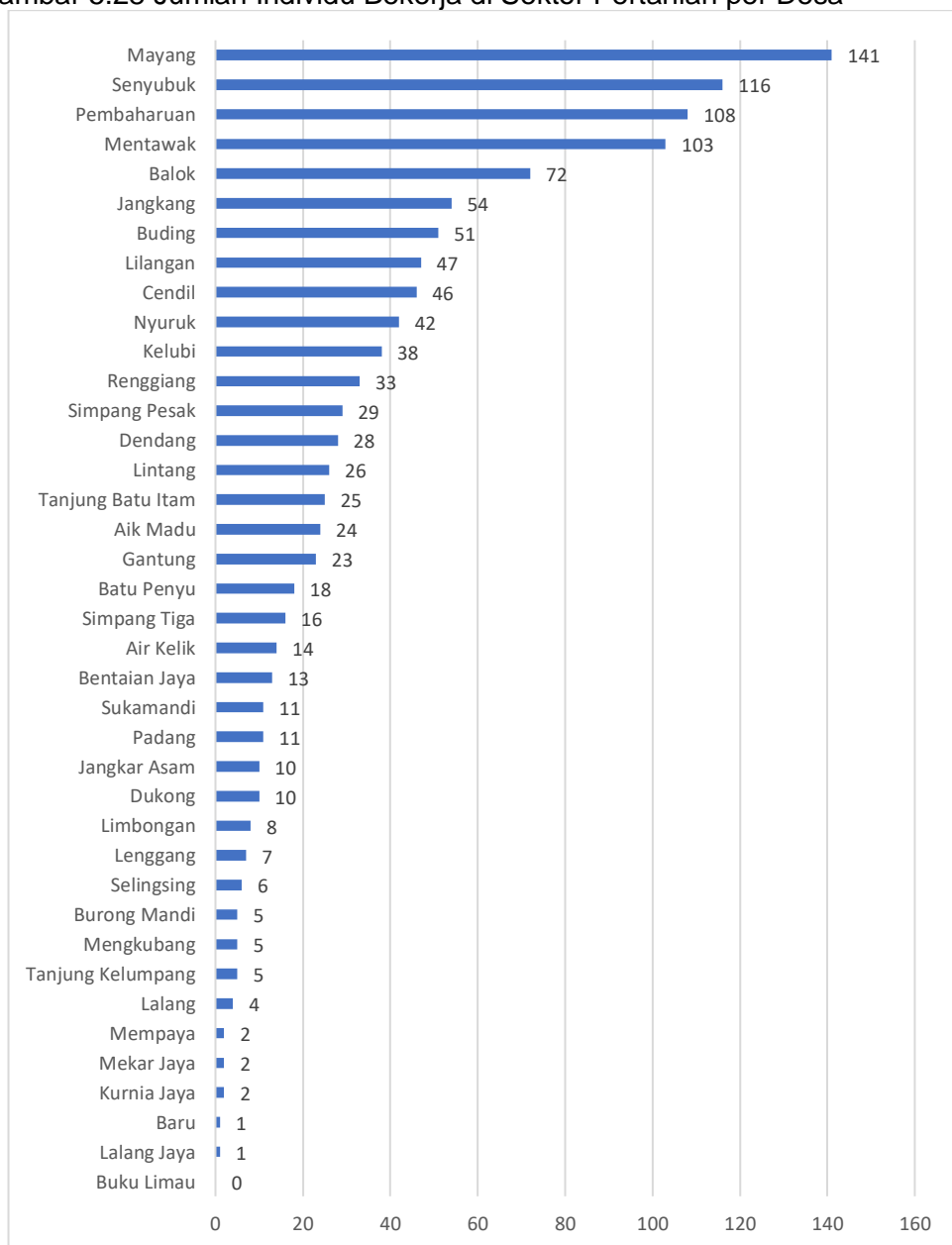


## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.28 Jumlah Individu Bekerja di Sektor Pertanian per Desa

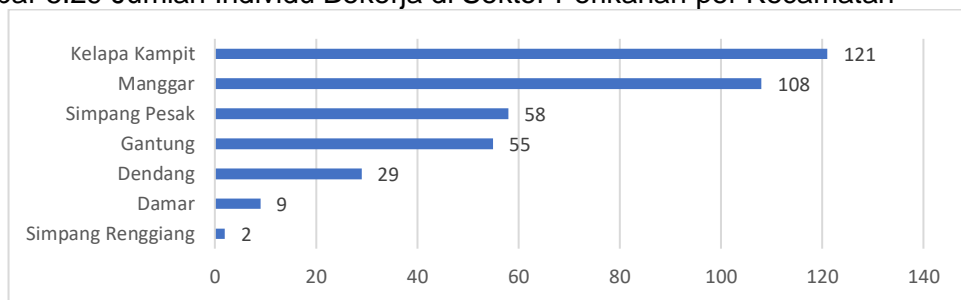


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)



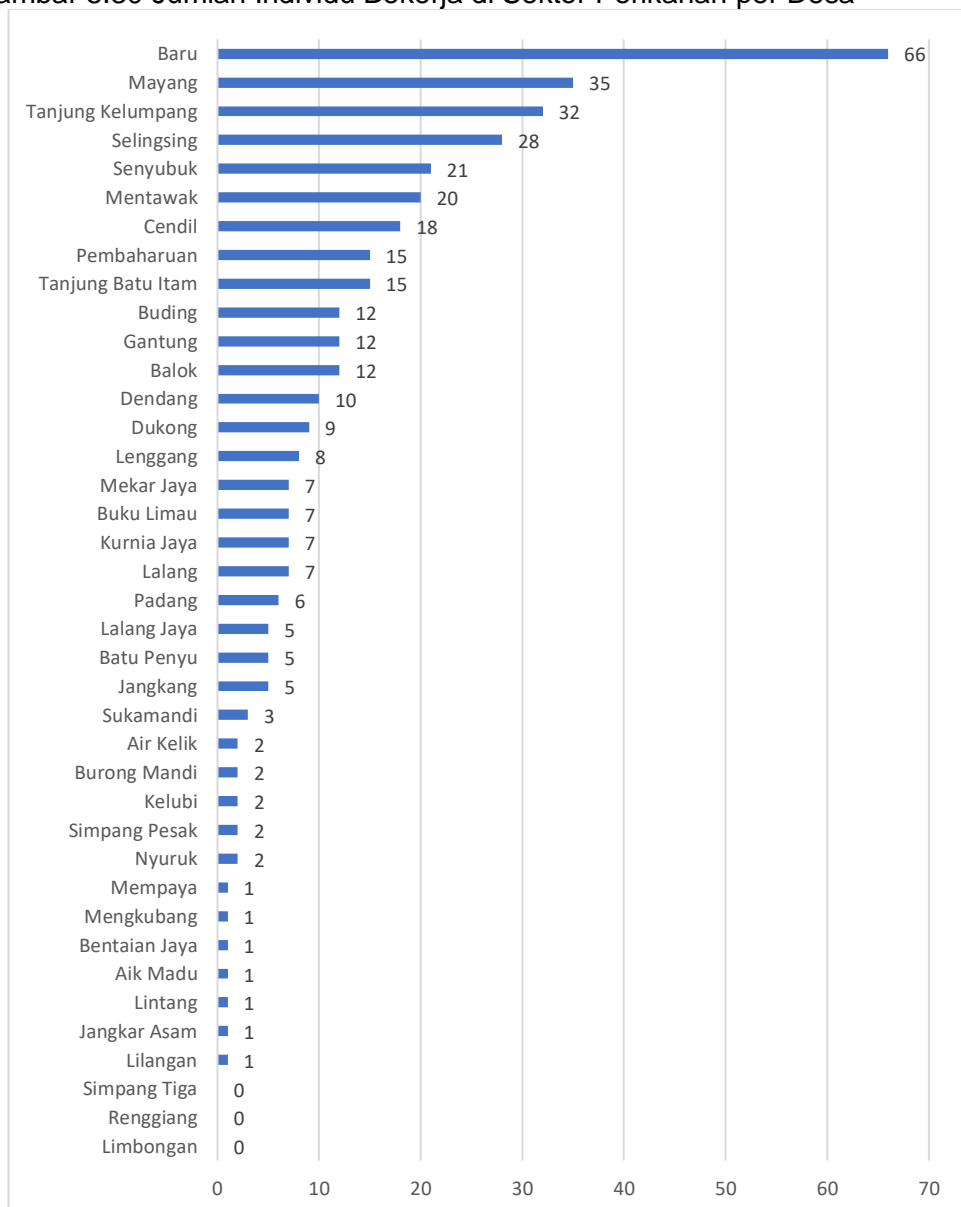
## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Gambar 5.29 Jumlah Individu Bekerja di Sektor Perikanan per Kecamatan



Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.30 Jumlah Individu Bekerja di Sektor Perikanan per Desa

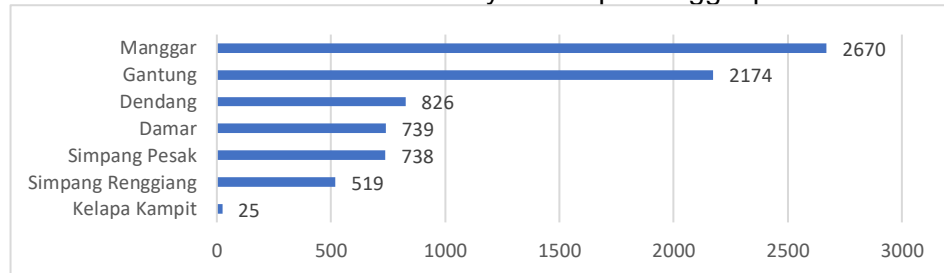


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)



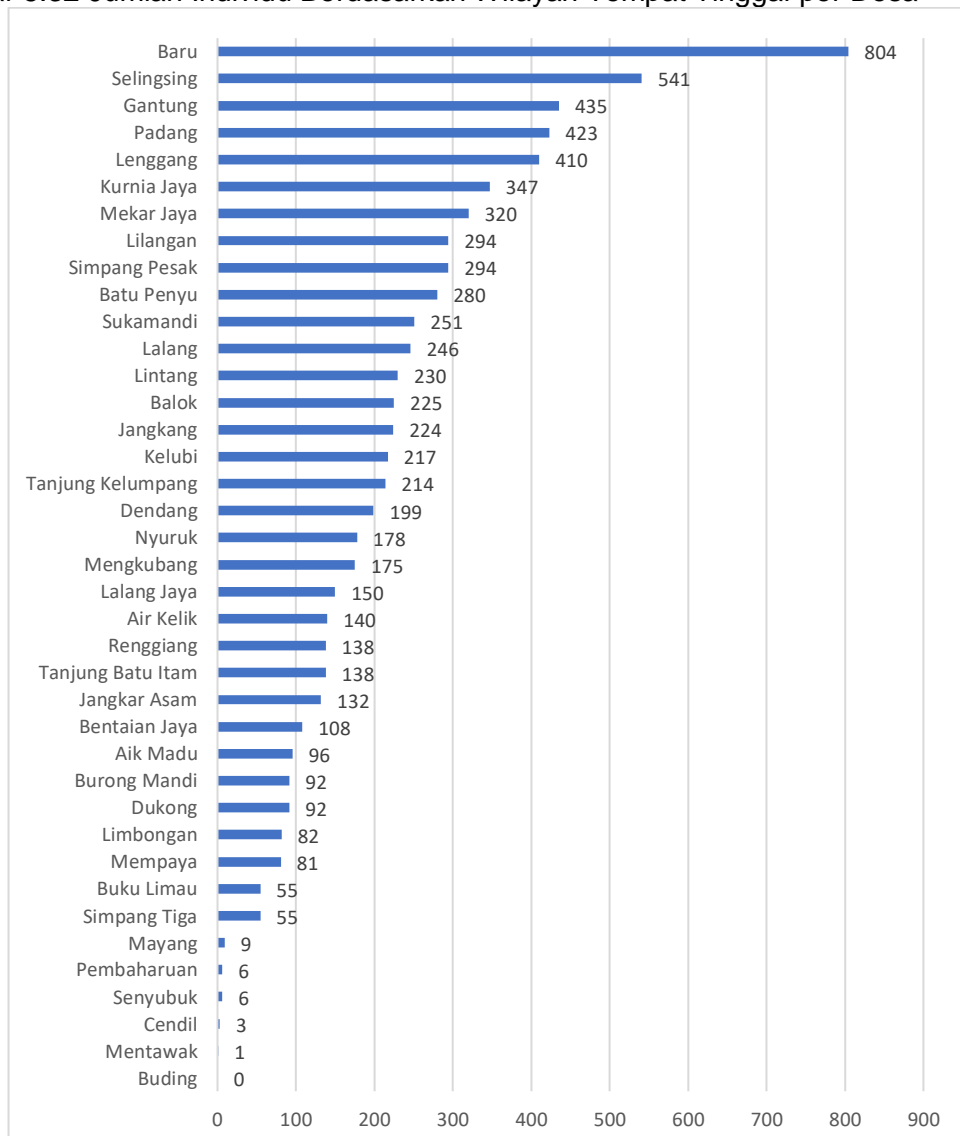
## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Gambar 5.31 Jumlah Individu Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal per Kecamatan



Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Gambar 5.32 Jumlah Individu Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal per Desa

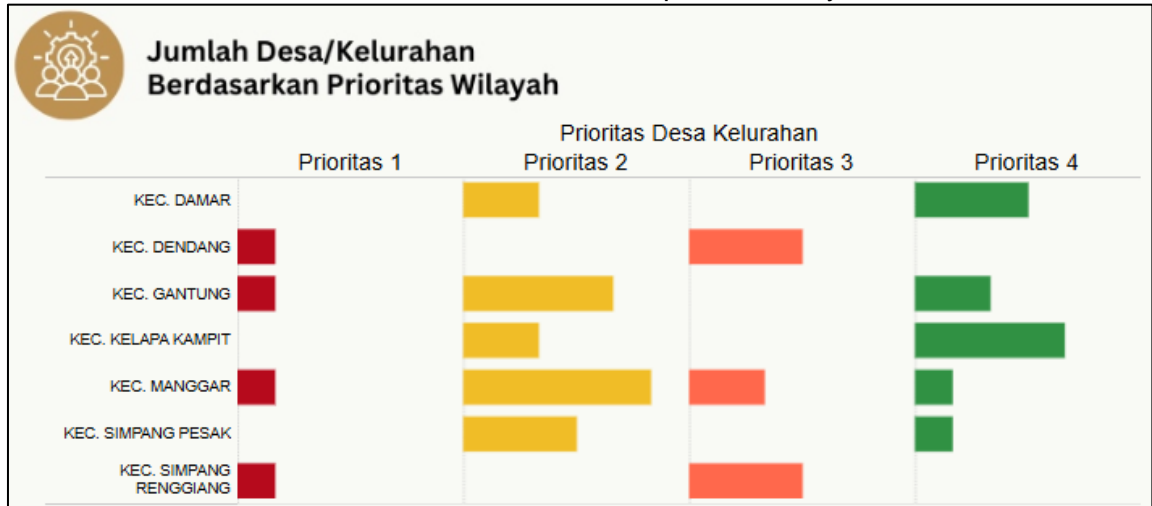


Sumber Data : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Gambar 5.32 Jumlah Desa berdasarkan prioritas wilayah

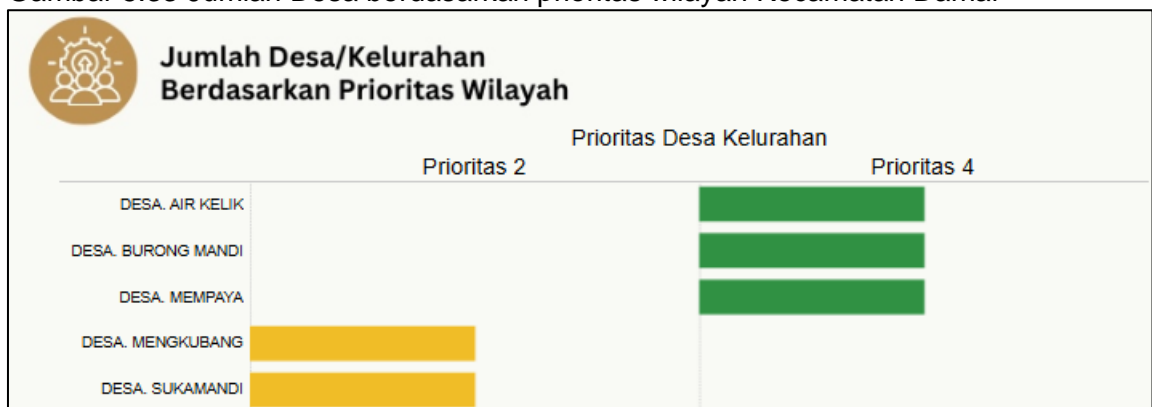


Sumber : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/  
Data : <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Keterangan: Prioritas 1–4 mengelompokkan desa/kelurahan berdasarkan perbandingan indeks kewilayahan dan kependudukan dengan rata-rata kabupaten/kota, yakni: P1 rendah pada keduanya, P2 kewilayahan tinggi namun kependudukan rendah, P3 kewilayahan rendah namun kependudukan tinggi, dan P4 tinggi pada keduanya.

- Kecamatan dengan prioritas 1 yaitu kecamatan dendang, kecamatan Gantung, kecamatan manggar dan kecamatan simpang renggiang masing-masing dengan jumlah 1 Desa
- Kecamatan dengan prioritas 2 yaitu kecamatan Damar terdapat 2 (dua) desa, kecamatan gantung terdapat 4 (empat) desa, kecamatan kelapa Kampit terdapat 2 Desa, kecamatan Manggar terdapat 5 (lima) desa dan kecamatan simpang pesak terdapat 3 (tiga) desa.
- Kecamatan dengan prioritas 3 yaitu kecamatan Dendang terdapat 3 desa, kecamatan Manggar terdapat 2 desa, dan kecamatan Simpang Renggiang terdapat 3 Desa.
- Kecamatan dengan prioritas 4 yaitu kecamatan Damar terdapat 3 desa, kecamatan Gantung terdapat 2 desa, kecamatan Kelapa Kampit terdapat 4 Desa, kecamatan manggar sebanyak 1 desa dan kecamatan simpang pesak terdapat 1 desa.

Gambar 5.33 Jumlah Desa berdasarkan prioritas wilayah Kecamatan Damar





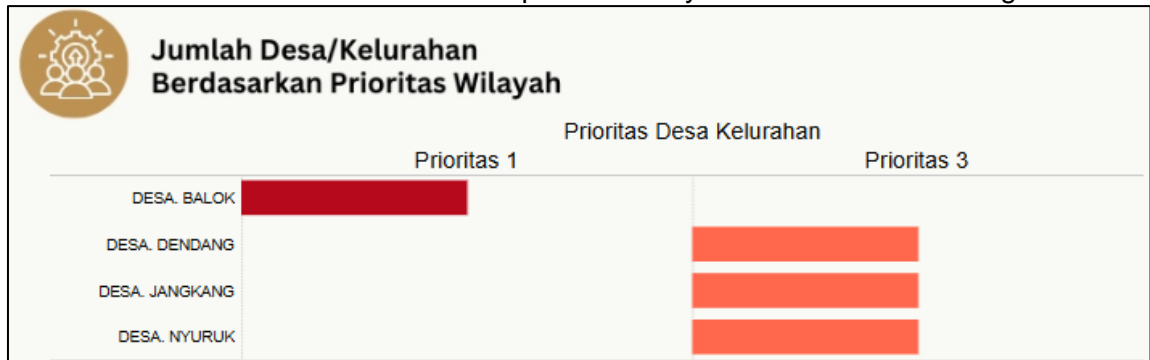
## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

Sumber : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Keterangan: Prioritas 1–4 mengelompokkan desa/kelurahan berdasarkan perbandingan indeks kewilayahan dan kependudukan dengan rata-rata kabupaten/kota, yakni: P1 rendah pada keduanya, P2 kewilayahan tinggi namun kependudukan rendah, P3 kewilayahan rendah namun kependudukan tinggi, dan P4 tinggi pada keduanya.

- Desa dengan prioritas 1 tidak ada
- Desa dengan prioritas 2 yaitu Desa mengkubang dan Desa Sukamandi dimana Indeks kewilayahan tinggi namun kependudukan rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten
- Desa dengan prioritas 3 tidak ada
- Desa dengan prioritas 4 yaitu Desa air kelik, Desa Burong mandi dan Desa mempaya dimana Indeks kewilayahan dan kependudukan tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten

Gambar 5.33 Jumlah Desa berdasarkan prioritas wilayah Kecamatan Dendang



Sumber : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

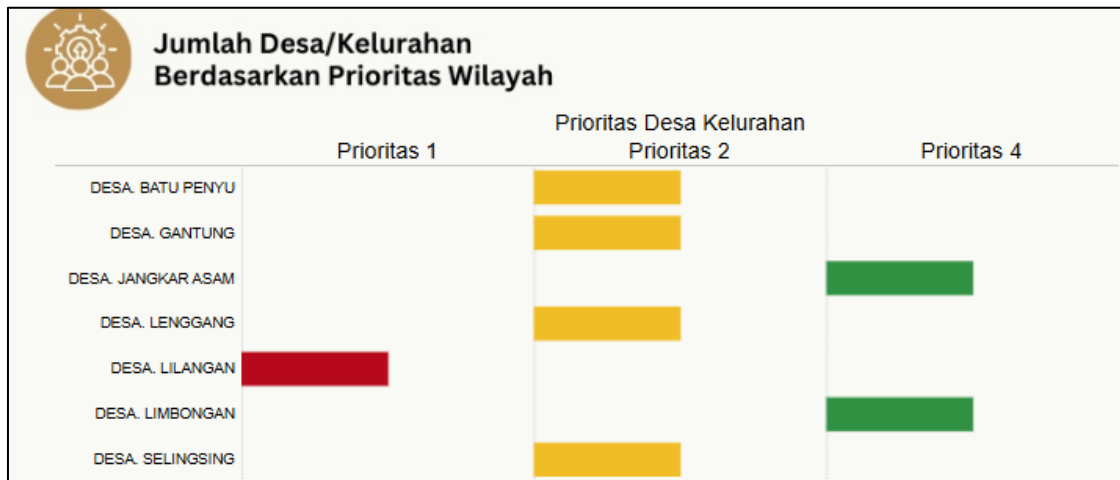
Keterangan: Prioritas 1–4 mengelompokkan desa/kelurahan berdasarkan perbandingan indeks kewilayahan dan kependudukan dengan rata-rata kabupaten/kota, yakni: P1 rendah pada keduanya, P2 kewilayahan tinggi namun kependudukan rendah, P3 kewilayahan rendah namun kependudukan tinggi, dan P4 tinggi pada keduanya.

- Desa dengan prioritas 1 yaitu Desa balok dimana Indeks kewilayahan dan kependudukan rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten
- Desa dengan prioritas 2 tidak ada
- Desa dengan prioritas 3 yaitu Desa Dendang, Desa jangkang dan Desa Nyuruk dimana Indeks kewilayahan rendah dan kependudukan tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten
- Desa dengan prioritas 4 tidak ada

Gambar 5.34 Jumlah Desa berdasarkan prioritas wilayah Kecamatan Gantung



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/  
Data : <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Keterangan: Prioritas 1–4 mengelompokkan desa/kelurahan berdasarkan perbandingan indeks kewilayahan dan kependudukan dengan rata-rata kabupaten/kota, yakni: P1 rendah pada keduanya, P2 kewilayahan tinggi namun kependudukan rendah, P3 kewilayahan rendah namun kependudukan tinggi, dan P4 tinggi pada keduanya.

- Desa dengan prioritas 1 yaitu Desa Lilangan dimana Indeks kewilayahan dan kependudukan rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten
- Desa dengan prioritas 2 yaitu Desa Batu Peny, Desa Gantung, Desa Lenggang dan Desa Selingsing dimana Indeks kewilayahan tinggi namun kependudukan rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten
- Desa dengan prioritas 3 tidak ada
- Desa dengan prioritas 4 yaitu Desa Jangkar Asam dan Desa Limbongan dimana Indeks kewilayahan dan kependudukan tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten

Gambar 5.35 Jumlah Desa berdasarkan prioritas wilayah Kecamatan Kelapa Kampit



Sumber : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/  
Data : <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Keterangan: Prioritas 1–4 mengelompokkan desa/kelurahan berdasarkan perbandingan indeks kewilayahan dan kependudukan dengan rata-rata kabupaten/kota, yakni: P1 rendah pada keduanya, P2 kewilayahan tinggi namun kependudukan rendah, P3 kewilayahan rendah namun kependudukan tinggi, dan P4 tinggi pada keduanya.

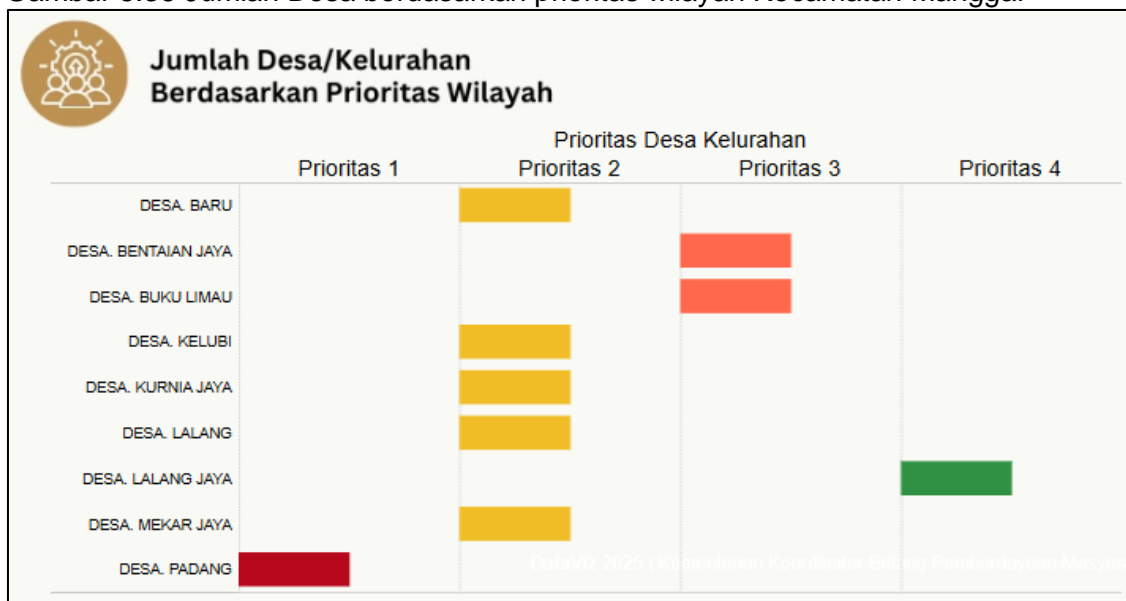
- Desa dengan prioritas 1 tidak ada



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

- Desa dengan prioritas 2 yaitu Desa Mayang dan Desa Senyubuk dimana Indeks kewilayahan tinggi namun kependudukan rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten
- Desa dengan prioritas 3 tidak ada
- Desa dengan prioritas 4 yaitu Desa Buding, Desa Cendil, Desa mentawak dan Desa Pembaharuan dimana Indeks kewilayahan dan kependudukan tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten

Gambar 5.36 Jumlah Desa berdasarkan prioritas wilayah Kecamatan Manggar



Sumber : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/  
Data : <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Keterangan: Prioritas 1–4 mengelompokkan desa/kelurahan berdasarkan perbandingan indeks kewilayahan dan kependudukan dengan rata-rata kabupaten/kota, yakni: P1 rendah pada keduanya, P2 kewilayahan tinggi namun kependudukan rendah, P3 kewilayahan rendah namun kependudukan tinggi, dan P4 tinggi pada keduanya.

- Desa dengan prioritas 1 yaitu Desa Padang dimana Indeks kewilayahan dan kependudukan rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten
- Desa dengan prioritas 2 yaitu Desa Baru, Desa Kelubi, Desa Kurnia Jaya, Desa Lalang dan Desa Mekar Jaya dimana Indeks kewilayahan tinggi namun kependudukan rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten
- Desa dengan prioritas 3 yaitu Desa Bentaian Jaya dan Desa Buku limau dimana Indeks kewilayahan rendah dan kependudukan tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

- Desa dengan prioritas 4 yaitu Desa Lalang Jaya dimana Indeks kewilayahan dan kependudukan tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten

Gambar 5.36 Jumlah Desa berdasarkan prioritas wilayah Kecamatan Simpang Pesak



Sumber : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

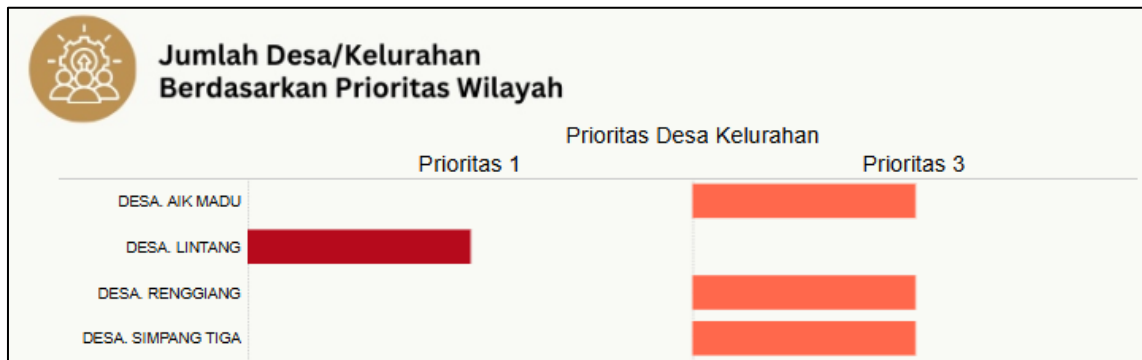
Keterangan: Prioritas 1–4 mengelompokkan desa/kelurahan berdasarkan perbandingan indeks kewilayahan dan kependudukan dengan rata-rata kabupaten/kota, yakni: P1 rendah pada keduanya, P2 kewilayahan tinggi namun kependudukan rendah, P3 kewilayahan rendah namun kependudukan tinggi, dan P4 tinggi pada keduanya.

- Desa dengan prioritas 1 tidak ada
- Desa dengan prioritas 2 yaitu Desa Simpang Pesak, Desa Tanjung Batu Itam, dan Desa Tanjung kelumpang dimana Indeks kewilayahan tinggi namun kependudukan rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten
- Desa dengan prioritas 3 tidak ada
- Desa dengan prioritas 4 yaitu Desa Dukong dimana Indeks kewilayahan dan kependudukan tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten

Gambar 5.37 Jumlah Desa berdasarkan prioritas wilayah Kecamatan Simpang Renggang



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029



Sumber : Dashboard Agregat DTSEN Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/  
Data : <https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres> / (Data DTSEN Desil 1 versi bulan Agustus 2025)

Keterangan: Prioritas 1–4 mengelompokkan desa/kelurahan berdasarkan perbandingan indeks kewilayahan dan kependudukan dengan rata-rata kabupaten/kota, yakni: P1 rendah pada keduanya, P2 kewilayahan tinggi namun kependudukan rendah, P3 kewilayahan rendah namun kependudukan tinggi, dan P4 tinggi pada keduanya.

- Desa dengan prioritas 1 yaitu Desa Lintang dimana Indeks kewilayahan dan kependudukan rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten
- Desa dengan prioritas 2 tidak ada
- Desa dengan prioritas 3 yaitu Desa Aik Madu, Desa Renggiang dan Desa Simpang Tiga dimana Indeks kewilayahan rendah dan kependudukan tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten
- Desa dengan prioritas 4 tidak ada



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Matriks Prioritas Program**

Matriks prioritas program dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur, merupakan penjabaran dari beberapa isu Strategis bidang penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam matriks. Matriks penanggulangan kemiskinan diantaranya memuat kebijakan, program, lokasi prioritas, serta pagu indikatif selama 5 tahun kedepan.



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

---



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

**Tabel 6.1**

**MATRIK RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM  
PADA DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
			1	0	0	2,				00	Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028							
1	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana, serta utilitas sekolah guna menunjang proses pembelajaran sekolah	474.460.000	250.000.000	850.000.000	900.000.000	1.000.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							
2	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Melaksanakan rehabilitasi ruang UKS sekolah	168.000.000	140.000.000	400.000.000	400.000.000	450.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							
3	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Melakukan rehabilitasi ruang perpustakaan sekolah	734.900.000	625.000.000	1.500.000.000	1.600.000.000	1.700.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							
4	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah	Melaksanakan pengadaan mebel sekolah seperti meja dan kursi siswa serta meja dan kursi guru	408.950.000	360.000.000	500.000.000	650.000.000	750.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							
5	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan perlengkapan sekolah berupa Buku Rapot peserta didik	336.024.000	275.000.000	500.000.000	500.000.000	575.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
6	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	100201	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Penyelenggaraan lomba minat, bakat dan kreativitas siswa untuk sekolah dasar		518.106.200	550.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.150.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan						
7	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	100201	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Pelaksanaan pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar untuk mendukung operasional sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.		15.626.600.000	16.374.000.000	23.840.000.000	24.044.070.695	25.674.000.000	- DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan - DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler - DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja						
8	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	100201	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Pelaksanaan pembinaan seperti bimtek atau sosialisasi tentang penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran dan administrasi sekolah guna meningkatkan efektivitas dan mutu pendidikan.		28.620.000	25.000.000	65.000.000	75.000.000	100.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan						
9	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	100201	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Pelaksanaan pengembangan konten digital pembelajaran sebagai media pendukung proses belajar mengajar		-	-	50.000.000	60.000.000	80.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan						





**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
											kepentingan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.														
13	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Fasilitasi Komunitas Belajar dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar		Memfasilitasi pembentukan dan penguatan komunitas belajar pendidik melalui kegiatan berbagi praktik baik, diskusi, dan pengembangan profesional berkelanjutan.		20.692.000	-	30.000.000	60.000.000	90.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							
14	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,01	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan kepada satuan pendidikan terkait pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi sesuai kebijakan dan standar perlindungan peserta didik.		9.200.000	42.500.000	85.000.000	110.000.000	130.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							
15	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,01	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Pemberian bantuan berupa Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan peserta didik sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kegiatan pembelajaran.		191.545.600	300.000.000	900.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Berkelanjutan	Kabupaten Belitang Timur	2025 = 200 Peserta Didik 2026 = 300 Peserta Didik 2027 = 900 Peserta Didik 2028 = 1.100 Peserta Didik 2029 =	2025 = 1.000.000/Peserta Didik 2026 = 1.000.000/Peserta Didik 2027 = 1.000.000/Peserta Didik 2028 = 1.000.000/Peserta Didik 2029 =	Perlengkapan sekolah seperti : seragam, tas, sepatu, topi, ikat pinggang, kaos kaki, dan alat tulis	1 kali dalam 1 tahun	





**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
	masyarakat	Bidang Pendidikan					Pendidikan	n Sekolah Dasar	Berkebutuhan Khusus		Berkebutuhan Khusus (ABK) guna mendukung layanan pendidikan inklusif dan pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus.						Bidang Pendidikan								
21	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana, serta utilitas sekolah guna menunjang proses pembelajaran sekolah.		-	-	750.000.000	750.000.000	800.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							
22	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sesuai standar teknis sarana pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran.		650.718.000	1.300.000.000	3.000.000.000	3.000.000.005	2.800.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							
23	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Melakukan rehabilitasi ruang perpustakaan sekolah		-	-	1.250.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							
24	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Rehabilitasi sedang/berat terhadap sarana, prasarana, dan utilitas sekolah sesuai standar teknis untuk mendukung proses pembelajaran yang aman dan nyaman.		155.714.000	200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.300.000.005	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							
25	Mengurangi beban pengeluaran	Urusan Pemerintahan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah		Melaksanakan pengadaan mebel sekolah seperti meja dan		110.426.200	280.000.000	400.000.000	400.000.000	450.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
	masyarakat	Bidang Pendidikan					Pendidikan	n Sekolah Menengah Pertama		kursi siswa serta meja dan kursi guru							Bidang Pendidikan							
26	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Pengadaan perlengkapan sekolah berupa Buku Rapot peserta didik		180.542.900	180.542.900	450.000.000	450.000.000	500.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan						
27	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Penyelenggaraan lomba minat, bakat dan kreativitas siswa untuk sekolah dasar		465.297.700	470.000.000	950.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan						
28	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Penyediaan, penataan, dan pemenuhan kebutuhan pendidik serta tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.		502.400	502.400	200.000.000	255.000.000	355.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan						
29	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Pelaksanaan pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama untuk mendukung operasional sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.		6.952.355.060	7.235.000.000	13.464.983.000	14.160.000.000	13.200.000.000	- DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan - DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler - DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja						
30	Mengurangi beban	Urusan Pemerintahan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan	Pengelolaan	Pembinaan Penggunaan		Pelaksanaan pembinaan seperti		27.478.500	25.000.000	55.000.000	65.000.000	85.000.000	DAU yang Ditetapkan						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
	pengeluaran masyarakat	ahan Bidang Pendidikan					n Pendidikan	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			bimtek atau sosialisasi tentang penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran dan administrasi sekolah guna meningkatkan efektivitas dan mutu pendidikan.						Penggunaannya Bidang Pendidikan							
31	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			Pelaksanaan pengembangan konten digital pembelajaran sebagai media pendukung proses belajar mengajar yang interaktif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta media penyalur informasi sekolah.	27.601.000	-	65.000.000	75.000.000	100.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							
32	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			Pelaksanaan pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung pembelajaran, penilaian, dan administrasi sekolah secara efektif.	27.113.000	25.000.000	55.000.000	65.000.000	85.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							
33	Mengurangi	Urusan	1	0	0	2,00	Program	Pengelolaan	Koordinasi,			Pelaksanaan						DAU yang							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
	beban pengeluaran masyarakat	Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	2	02	51	Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan pendidikan guna memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.	5.852.800	20.000.000	50.000.000	60.000.000	80.000.000	Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
34	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	2,	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan kepada satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	19.999.400	-	35.000.000	50.000.000	75.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
35	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	2,	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Memfasilitasi pembentukan dan penguatan komunitas belajar pendidik melalui kegiatan berbagi praktik baik, diskusi, dan pengembangan profesional berkelanjutan.	14.992.600	15.000.000	35.000.000	55.000.000	75.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
36	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	2,	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Sekolah Menengah	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk			Penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan kepada satuan pendidikan terkait pencegahan	30.475.200	52.500.000	82.500.000	92.500.000	102.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan								



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
											Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
		n						Pertama	pengecahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		perundungan, kekerasan, dan intoleransi sesuai kebijakan dan standar perlindungan peserta didik.																
37	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Pelaksanaan penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.		109.994.000	100.000.000	800.000.000	800.000.000	500.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
38	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan guna memenuhi kebutuhan layanan pendidikan.		-	640.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
39	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pemberian bantuan berupa Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan peserta didik sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kegiatan pembelajaran.			174.999.900	220.000.000	700.000.000	700.000.000	800.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Berkelanjutan	Kabupaten Belitang Timur	2025 = 23 Peserta Didik 2026 = 220 Peserta Didik 2027 = 700 Peserta Didik 2028 = 700 Peserta Didik 2029 = 800 Peserta Didik	2025 = 1.000.000/Peserta Didik 2026 = 1.000.000/Peserta Didik 2027 = 1.000.000/Peserta Didik 2028 = 1.000.000/Peserta Didik 2029 = 1.000.000/Peserta Didik	Perlengkapan sekolah seperti : seragam, tas, sepatu, topi, ikat pinggang, kaos kaki, dan alat tulis	1 kali dalam 1 tahun		



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
40	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Melaksanakan pembangunan ruang pusat sumber Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) guna mendukung layanan pendidikan inklusif dan pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus.	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	550.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
41	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana, serta utilitas sekolah guna menunjang proses pembelajaran sekolah	1.201.744.000	500.000.000	1.800.000.000	1.850.000.000	2.000.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
42	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Mebel PAUD	Melaksanakan pengadaan mebel sekolah seperti meja dan kursi siswa serta meja dan kursi guru	68.907.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000	2.000.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
43	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Pengadaan perlengkapan PAUD berupa Buku Rapot peserta didik	-	-	80.000.000	100.000.000	150.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
44	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Penyediaan, penataan, dan pemenuhan kebutuhan pendidik serta tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) sesuai	1.801.440.000	1.519.440.000	2.500.000.000	2.600.000.000	2.000.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan								



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
											Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
											peraturan dan ketentuan yang berlaku.																
45	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pelaksanaan pengelolaan Dana BOP PAUD untuk mendukung operasional sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.		2.058.240.000	2.058.240.000	3.200.000.000	3.300.000.000	3.400.000.000	DAK Non Fisik-BOP PAUD									
46	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pelaksanaan pembinaan seperti bimtek atau sosialisasi tentang penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran dan administrasi sekolah guna meningkatkan efektivitas dan mutu pendidikan.		-	-	70.000.000	70.000.000	90.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan									
47	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pelaksanaan pengembangan konten digital pembelajaran sebagai media pendukung proses belajar mengajar yang interaktif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta media penyalur informasi sekolah.		-	-	80.000.000	80.000.000	100.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan									



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
48	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	100200	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			Pelaksanaan pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung pembelajaran, penilaian, dan administrasi sekolah secara efektif.	-	20.000.000	80.000.000	80.000.000	100.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan						
49	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	100200	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Pelaksanaan koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan pendidikan guna memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.	15.335.600	15.000.000	65.000.000	75.000.000	100.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan						
50	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	100200	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan kepada satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	60.000.000	70.000.000	100.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan						
51	Mengurangi	Urusan	100200	Program	Pengelolaan	Fasilitasi		Memfasilitasi		-	-				DAU yang						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
	beban pengeluaran masyarakat	Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	2	03	29	Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		pembentukan dan penguatan komunitas belajar pendidik melalui kegiatan berbagi praktik baik, diskusi, dan pengembangan profesional berkelanjutan.			40.000.000	50.000.000	70.000.000	Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							
52	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan guna memenuhi kebutuhan layanan pendidikan.		600.360.000	-	2.400.000.000	2.400.000.000	2.800.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan						
53	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Pemberian bantuan berupa Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan peserta didik sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kegiatan pembelajaran.		50.130.000	60.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan						
54	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Rehabilitasi sedang/berat terhadap sarana, prasarana, dan utilitas sekolah sesuai standar teknis untuk mendukung proses pembelajaran yang aman dan nyaman.		64.850.000	171.460.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan						
55	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Pelaksanaan penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik sesuai dengan		356.400.000	450.000.000	800.000.000	850.000.000	1.000.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
		Pendidikan				Usia Dini (PAUD)		kurikulum yang berlaku.						Pendidikan								
56	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	100203	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sesuai standar teknis sarana pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran.		-	300.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.100.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan							
57	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	100204	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan, penataan, dan pemenuhan kebutuhan pendidik serta tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.	505.400	505.400	120.000.000	120.000.000	150.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
58	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	100204	00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pelaksanaan pengelolaan Dana BOP pendidikan nonformal/kesetaraan untuk mendukung operasional sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.	602.200.000	552.200.000	1.250.000.000	1.300.000.000	1.250.000.000	- DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan - DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan - DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi								
59	Mengurangi beban	Urusan Pemerintahan	100204	00	Program Pengelolaan	Pengelolaan konten digital				-	-	110.000.000	130.000.000	160.000.000	DAU yang Ditetapkan							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan			
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029										
	pengeluaran masyarakat	Bidang Pendidikan					Program Pendidikan	Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	untuk pendidikan			konten digital pembelajaran sebagai media pendukung proses belajar mengajar yang interaktif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta media penyalur informasi sekolah.						0	Penggunaannya Bidang Pendidikan								
60	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			Pelaksanaan pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung pembelajaran, penilaian, dan administrasi sekolah secara efektif.	-	-	130.000.000	150.000.000	175.000.000	0	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
61	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Pelaksanaan koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan pendidikan guna memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.	19.816.500	15.000.000	140.000.000	150.000.000	175.000.000	0	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
62	Mengurangi beban	Urusan Pemerintahan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan	Pengelolaan	Sosialisasi dan Advokasi			Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi	-	-	110.000.000	120.000.000	150.000.000	0	DAU yang Ditetapkan								



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
	pengeluaran masyarakat	ahan Bidang Pendidikan					n Pendidikan	Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kebijakan Bidang Pendidikan						0	Penggunaannya Bidang Pendidikan								
63	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan							DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
			1	0	0	2,00				Memfasilitasi pembentukan dan penguatan komunitas belajar pendidik melalui kegiatan berbagi praktik baik, diskusi, dan pengembangan profesional berkelanjutan.														
64	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pemberian bantuan berupa Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan peserta didik sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kegiatan pembelajaran.						DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Berkelanjutan	Kabupaten Belitong Timur	2025 = 208 Peserta Didik 2026 = 50 Peserta Didik 2027 = 330 Peserta Didik 2028 = 350 Peserta Didik 2029 = 370 Peserta Didik	2025 = 480.748 /Peserta Didik 2026 = 1.000.000/Peserta Didik 2027 = 1.151.515/Peserta Didik 2028 = 1.142.857/Peserta Didik 2029 = 1.216.216/Peserta Didik	Perlengkapan sekolah seperti : tas, sepatu, dan alat tulis	1 kali dalam 1 tahun		
			1	0	0	2,00					99.995.600	50.000.000	380.000.000	400.000.000	450.000.000									



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan			
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029										
65	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan guna memenuhi kebutuhan layanan pendidikan.		241.724.000	-	960.000.000	980.000.000	1.000.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan									
66	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Pengadaan perlengkapan sekolah berupa Buku Rapot peserta didik		39.805.136	25.000.000	660.000.000	660.000.000	660.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan									
67	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Rehabilitasi sedang/berat terhadap sarana, prasarana, dan utilitas sekolah sesuai standar teknis untuk mendukung proses pembelajaran yang aman dan nyaman.		-	-	600.000.000	600.000.000	650.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan									
68	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Pelaksanaan penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.		46.675.600	20.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan									
69	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Mebel Sekolah		Melaksanakan pengadaan mebel sekolah seperti meja dan kursi siswa serta meja dan kursi guru		-	-	150.000.000	170.000.000	200.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan									



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
70	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana, serta utilitas sekolah guna menunjang proses pembelajaran sekolah	-	-	550.000.000	600.000.000	650.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
71	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	0	0	2,00	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sesuai standar teknis sarana pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran.	-	-	600.000.000	600.000.000	650.000.000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan								
72	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan baru Puskesmas	-	-	-	-	0									
73	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Pustu dan Polindes	-	-	-	-	0									



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
						/Kota															
74	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	102020100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pengembangan Puskesmas		Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar		3.584.518.806	1.564.518.806	1.564.518.806	1.611.454.370	1.627.099.558	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU						
75	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	102020100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standart		9.136.990.720	1.064.329.211	1.064.329.211	1.096.259.087	1.106.902.379	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU						
76	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	102020100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan		151.467.000	149.967.000	151.467.000	156.011.010	152.981.670	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU						
77	Mengurangi beban	Urusan Pemerintahan	102020100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan		Fasilitas kesehatan lainnya yang telah		2.600.933.0	1.499.916.3	1.499.916.3	1.544.913.8	1.559.912.9	DAK Non Fisik, DAU yang						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
	pengeluaran masyarakat	ahan Bidang Kesehatan																			
78	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1020201	00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan		42.675.750	1.800.000.000	42.675.750	43.956.023	43.102.508	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU						
79	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1020201	00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara		226.819.800	226.819.000	558.819.800	233.624.394	235.892.584	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU						
80	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1020201	00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk	Pengembangan Rumah Sakit		Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis		-	-	-	-	-	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU						



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan			
											Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029										
		n						AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota			pelayanan rumah sakit																
81	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	0220123	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin				5.137.333.775	5.137.333.775	5.137.333.775	5.291.453.788	4.342.827.126	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU						
82	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	0220124	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			Kunjungan keluarga yang di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya				25.050.000	24.000.000	24.000.000	25.801.500	26.041.500	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU						
83	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	0220126	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin				98.204.100	98.204.100	98.204.100	101.150.223	102.132.264	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU						



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
											Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
							MASYARAKAT	an Daerah Kabupaten/Kota																		
84	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2	00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		cetak buku kia, cetak media kie, cetak kartu ibu dan bayi, kegiatan pertemuan deteksi dini kehamilan resiko tinggi, evaluasi pertemuan kehamilan resiko tinggi, Kegiatan PUS sebagai upaya strategis penurunan AKI dan AKB		702.731.500	702.731.500	723.813.445	745.527.848	709.758.815	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU							
85	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2	00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Cetak partograf, cetak media kie leaflet, kegiatan desiminasi hasil rekomendasi pertemuan evaluasi pencegahan dan penanganan kematian ibu		41.204.400	41.204.000	42.440.532	43.713.748	41.616.444	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU							
86	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2	00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Workshop tatalaksana bayi BBLR bagi tenaga kesehatan, pemeriksaan SHK, pemeriksaan S-HAK, pemeriksaan S-G6PD, skrining hipertiroid		72.027.000	72.027.000	74.187.810	76.413.444	72.747.270	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
87	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1020200	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Workshop pemantauan tumbuh kembang bagi kader, PAUD/TK/RA		28.676.100	28.676.100	29.536.383	30.422.474	28.962.861	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU								
88	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1020200	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Seminar kesehatan remaja, pertemuan PKPR, pertemuan skrining anak usia pendidikan dasar, pertemuan sekolah sehat dan KTR sekolah, koordinasi kekerasan terhadap anak dan perempuan, cetak buku raport kesehatan remaja.		572.960.000	572.960.000	590.148.800	607.853.264	57.869.600	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU								
89	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1020200	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		pengadaan stik kolesterol, asam urat, glukosa. BMHP SHK, TCM		410.697.500	410.697.500	423.018.425	435.708.978	414.804.475	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU								
90	Mengurangi beban	Urusan Pemerintahan	1020200	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		pengadaan stik kolesterol, asam urat,		564.920.400	564.920.400	581.868.012	599.324.052	570.569.60	DAK Non Fisik, DAU yang								



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan			
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029										
	pengeluaran masyarakat	ahan Bidang Kesehata n					N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Kesehatan pada Usia Lanjut		glukosa. seminar kit, cetak raport kesehatan lansia, seminar pelayanan kesehatan lansia dan geriantri bagi petugas kesehatan						4	ditentukan bidang kesehatan, DAU									
91	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehata n	1	0	0	2, 00	PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT	Penyediaa n Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		pertemuan lintas sektor persiapan pembentukan desa peduli hipertensi						32.479.200	32.479.200	33.453.576	34.457.183	32.803.992	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU					
92	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehata n	1	0	0	2, 00	PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT	Penyediaa n Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		kegiatan pemberdayaan masyarakat (pembinaan kader) dan peningkatan kapitas petugas program diabetes melitus						337.497.700	297.497.700	347.622.631	358.051.310	340.872.677	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU					
93	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehata n	1	0	0	2, 00	PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT	Penyediaa n Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		pengadaan modul buku saku kesehatan jiwa, workshop peningkatan tim TPKJM, kegiatan manajemen stres, OJT						239.923.000	239.923.000	247.120.690	254.534.311	242.322.230	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU					



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan						
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029													
		n					AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota			jiwa dan napza, pelatihan comunity mental healt nurshing, kegiatan kelas manajemn stres.																			
94	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		advokasi pembentukan desa siaga TBC, rapat koordinasi tim percepatan penanggulangan TB tingkat kabupaten, in house training peningkatan kapasitas pengelola TB		130.566.800	170.566.800	124.483.804	128.518.218	121.872.468	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU												
95	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		pengadaan RDT HIV/shypilis, kampanye peringatan hari AIDS, monitoring evaluasi dan rapat kerja pemetaan populasi kunci		87.675.300	87.675.300	90.305.559	93.014.726	88.552.053	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU												
96	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		kegiatan investigasi kasus suspek KLB/wabah, kegiatan penguatan jejaring dan koordinasi lintas sektor		55.807.600	55.807.600	57.481.828	59.206.283	56.365.676	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU												



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan			
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029										
							MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota																			
97	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		kegiatan rencana kontigensi tahunan, kegiatan tenaga kesehatan infeksi emergin		109.780.300	109.780.300	113.073.709	116.465.920	110.878.103	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU									
98	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		penguatan kelompok pendukung ASI, pertemuan evaluasi intervensi spesifik kabupaten, evaluasi tatalaksana penanganan kasus ibu hamil KEK, pelacakan gizi		1.268.895.910	1.268.895.910	1.306.962.787	1.346.171.671	1.281.584.869	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU									
99	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		pembinaan GP2SP, pengukuran kebugaran jasmani ASN, kegiatan pembinaan pos UKK		96.187.000	87.612.000	99.072.610	102.044.788	97.148.870	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU									



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
100	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2	00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	belanja BMHP kesehatan lingkungan, sanitarian KIT		365.088.600	365.088.600	376.041.258	387.322.496	368.739.486	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU								
101	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2	00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	kegiatan peningkatan kapasitas kader, pembekalan kesehatan calon jemaah haji		192.909.700	192.909.700	198.696.991	204.657.901	194.838.797	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU								
102	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2	00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		-	26.100.000	-	-	-	-	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU								
103	Mengurangi beban pengeluaran	Urusan Pemerintahan	1	0	0	2	00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa		26.100.000	-	26.883.000	27.689.490	26.361.000	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan									



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
	masyarakat	Bidang Kesehatan		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan NAPZA									bidang kesehatan, DAU						
104	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1020202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		kegiatan foding focus,desiminasi hasil pelaksanaan POPM filariasis, kegiatan pemantauan jentik		855.962.900	855.962.900	881.641.787	908.091.041	864.522.529	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU						
105	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1020202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3, belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3		15.773.482.600	24.832.332.000	26.465.292.000	28.098.252.000	29.731.221.000	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU	tidak berkelanjutan	Kab. Belitong Timur	jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 : 644.172 jiwa bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 : 667.934 jiwa	jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 : 35.000 bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 : 2800	bantuan iuran jaminan kesehatan	setiap bulan



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
106	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		kegiatan kabupaten kota sehat, kegiatan advokasi STBM		69.700.300	67.700.300	71.791.309	69.054.306	69.744.849	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU							
107	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				16.200.000	16.200.000	16.686.000	16.524.000	16.689.240	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU							
108	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV				-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU							
109	Mengurangi beban pengeluaran	Urusan Pemerintahan	1	0	0	2,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan		pengadaan larvasida malaria		-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
	masyarakat	Bidang Kesehatan					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Malaria									bidang kesehatan, DAU							
110	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1020200	02	02	44	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				152.725.000	152.725.000	157.306.750	155.779.500	157.337.295	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU							
111	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1020200	02	02	46	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	supervisi fasilitatif layanan dan program gizi KIA kespro, pertemuan AMPSR, kegiatan pertemuan evaluasi puskesmas dan rumah sakit dalam penanganan penyebab utama kematian ibu dan bayi				229.233.000	229.233.000	236.109.990	233.817.660	236.155.837	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU						
112	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1020200	02	02	47	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan				71.720.000	71.720.000	73.871.600	73.154.400	73.885.944	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
							UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota																
113	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,00	PROGRAM Peningkatan KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota	Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	insentif dokter intersip														
114	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,01	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin dan Kesehatan Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan, dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)															
115	Mengurangi beban pengeluaran	Urusan Pemerintahan	1	0	0	2,04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI,	Penerbitan Sertifikat Laik	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	kegiatan movev kesehatan lingkungan														



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
	masyarakat	Bidang Kesehatan					ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							bidang kesehatan, DAU										
116	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2,06	00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Rumah yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						5.999.100	6.328.869	6.461.731	6.461.731	6.461.731	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU					
117	Mengurangi jumlah kantong-kantong	Urusan Pemerintahan Bidang	1	0	0	2,01	00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Advokasi, Pemberdayaan, Kesehatan, Kemitraan, Advokasi,	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,						23.827.800	23.827.800	34.900.500	34.900.500	24.066.078	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang					



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
	kemiskinan	Kesehatan					AT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									kesehatan, DAU							
118	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2	00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				68.903.400	87.655.066	87.655.000	97.655.000	69.592.434	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU						
119	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	0	0	2	00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				237.916.000	237.916.000	237.325.332	238.121.757	240.295.160	DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan bidang kesehatan, DAU						
120	Mengurangi jumlah	Urusan Pemerintahan	1	0	0	2	00	PROGRAM PENGELOLAAN SDA dan	Normalisasi/Restorasi Sungai				-	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE			Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
									Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
	kantong-kantong kemiskinan	Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				PROGRAM SUMBER DAYA AIR (SDA)	Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota																	
121	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	103	02	2,01	0102	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Breakwater															
122	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	103	02	2,01	0107	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	Pembangunan Unit Air Baku															



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
							(Satu) Daerah Kabupaten /Kota																	
123	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	0	0	2,01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai			Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	-	-	100.000.000	200.000.000	-	APBD						
124	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	0	0	2,01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku			Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	-	-	100.000.000	200.000.000	-	APBD						
125	Mengurangi jumlah kantong-kantong	Urusan Pemerintahan Bidang	1	0	0	2,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				-	-	-	1.700.000.000	1.500.000.000	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan			
											Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029										
	kemiskinan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						DAYA AIR (SDA)	Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota																			
126	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	0	0	2,	00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak		Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak			-	-	800.000.000		-		APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
127	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10320200	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		-	-	-	1.700.000.000	1.500.000.000	APBD							
128	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10320200	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa		Penyusunan Dokumen Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa untuk perencanaan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sumber daya air		-	-	100.000.000	-	-	APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
							(Satu) Daerah Kabupaten /Kota																		
129	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1030200	0301	00	ROGRAM PENGELOLAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	engelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Penyusunan dokumen Rencana, kebijakan strategis dan aspek Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		-	250.000.000		-	-	-		APBD					
130	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1030200	0301	00	ROGRAM PENGELOLAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	engelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Peningkatan kapasitas jaringan perpipaan SPAM			375.285.600		-	-	-		APBD						
131	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1030200	0301	00	ROGRAM PENGELOLAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	engelolaan dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Pengoperasian dan pemeliharaan sistem SPAM			487.962.000	488.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000		APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
											Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
		Ruang						MINUM	(SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota																		
132	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1030200	0301	31	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	engelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				399.127.500	250.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD									
133	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1030200	0301	32	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	engelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				641.229.000	112.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD									
134	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan	1030200	0305	01	19	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				-	200.000.000	-	-	-	APBD									



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan			
											Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029										
		Ruang						Daerah Kabupaten /Kota																				
135	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1030200	0350144			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	Penyediaan pengolahan setempat	Unit	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual/komunal				-	1.000.000.000	650.000.000	550.000.000	600.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kabupaten Belitong Timur	2026 : 113 Orang 2027 : 60 Orang 2028 : 48 Orang 2029 : 63 Orang	2026 : 113 Orang 2027 : 60 Orang 2028 : 48 Orang 2029 : 63 Orang	Bantuan Tangki Septik	1 kali		
136	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1030200	0350145			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Penyusunan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				-	-	100.000.000	200.000.000	-	APBD								
137	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1030200	0360112			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		Pembangunan Saluran Drainase Primer				599.472.000	200.000.000	250.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD								



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
							dalam Daerah Kabupaten /Kota																	
138	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	103	002	0019	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		Rehabilitasi Saluran Drainase Primer		299.752.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD							
139	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	103	002	0028	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Rehabilitasi Saluran Drainase wilayah perkotaan		449.757.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD							
140	Mengurangi jumlah	Urusan Pemerintahan	103	002	0029	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Pembangunan Sistem Drainase		Pembangunan Sistem Drainase di wilayah		3.799.357.000	1.500.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
	kantong-kantong kemiskinan	ahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					AN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM DRAINASE	Pengemba ngan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Perkotaan		Perkotaan		00	00											
141	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintah ahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	0	0	2,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN ANNANYA	Penyeleng garaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten /Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota		Penataan taman		-	250.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD							
142	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintah ahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	0	1	2,00	PROGRAM PENYELENG GARAAN JALAN	Penyeleng garaan Rencana, Jalan Kabupaten dan Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			Penyusunan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	-	-	200.000.000	-	-	APBD							
14	Mengurangi	Urusan	1	0	1	2,00	PROGRAM	Penyeleng	Survey Kondisi		pelaksanaan survei							APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
3	jumlah kantong-kantong kemiskinan	Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3010143	PENYELENGGARAAN JALAN	garaan Jalan Kabupaten /Kota	Jalan/Jembatan			dan pendataan kondisi jalan dan jembatan	496.598.460	496.598.460	496.598.460	496.598.460	496.598.460							
144	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1030120051	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan		Pemeliharaan rutin berupa perbaikan ringan, penambalan jalan, perbaikan drainase		1.053.426.000	-	-	-	-	APBD						
145	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1030120055	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Rehabilitasi Jalan		perbaikan dan peningkatan kondisi struktur dan perkerasan jalan		-	1.152.195.180	1.155.188.840	-	-	APBD						
146	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1030120056	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan		Pemeliharaan dan perawatan berkala jalan		-	-	-	1.132.145.940	1.086.867.180	APBD						
14	Mengurangi	Urusan	10301200	PROGRAM	Penyeleng	Rekonstruksi Jalan		Peningkatan kapasitas							APBD, DBH						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
7	jumlah kantong-kantong kemiskinan	Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	300159	PENYELENGGARAAN JALAN	garaan Jalan Kabupaten /Kota			jalan		3.000.000.000	2.552.195.180	1.155.188.700	1.132.145.800	1.086.867.180	SAWIT						
148	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1030120067	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Pemeliharaan dan perbaikan Jembatan		-	-	152.500.000	-	-	APBD						
149	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1030120068	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar		Penambahan lebar bahu jalan		-	1.148.195.180	-	1.151.145.800	1.096.867.180	APBD						
150	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1030120010	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	penyelenggaraan fasilitasi dan pendampingan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi kualifikasi operator, teknisi, atau analis			230.958.700	100.000.000	80.000.000	60.000.000	50.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kabupaten Belitang Timur	2026 : 30 Orang 2027 : 30 Orang 2028 : 30 Orang 2029 : 25 Orang	2026 : 30 Orang 2027 : 30 Orang 2028 : 30 Orang 2029 : 25 Orang	pelatihan tenaga Kerja Kontruksi	1 Kali



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
15	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	103	012	0011	PROGRAM PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi		Pembinaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi				25.000.000	10.000.000	APBD					Orang			
15	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	103	012	0016	PROGRAM PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				193.273.100	100.000.000	75.000.000	60.000.000	50.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kabupaten Belitong Timur	2026 : 80 Orang 2027 : 30 Orang 2028 : 30 Orang 2029 : 30 Orang	2026 : 80 Orang 2027 : 30 Orang 2028 : 30 Orang 2029 : 30 Orang	Pelatihan Ketenagakerjaan	1 Kali
15	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	103	022	0003	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		merumuskan dan menetapkan kebijakan penataan ruang untuk pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang				50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD						
15	Mengurangi jumlah	Urusan Pemerintahan	103	022	0006	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penetapan Rencana	Pelaksanaan Persetujuan		Penilaian dan pengesahan			127.911.300	900.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE			Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
									Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
	kantong-kantong kemiskinan	ahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					GARAAN PENATAAN RUANG	Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	Substansi RDTR Kabupaten/Kota						0										
155	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	103	12	202	0005	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						950.000.000	950.000.000	950.000.000	0	APBD						
156	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	103	12	203	0003	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						212.375.000	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	APBD				
157	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum	103	12	203	0005	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						212.375.000	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	APBD				





**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPK	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan				
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029											
								Kabupaten/Kota																				
161	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	104203	00	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	penyediaan rumah layak huni bagi warga yang terdampak relokasi akibat proyek pembangunan atau kebijakan pemerintah								-	120.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kab Belitong Timur	Tahun 2026 : 2 Unit, Tahun 2027 : 3 Unit, Tahun 2028 : 3 Unit, Tahun 2029 : 3 Unit	Tahun 2026 : Rp 60,000,000 (1 Unit Rumah), Tahun 2027 : Rp 70,000,000 (1 Unit Rumah)			
162	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	104302	00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Pendataan Kumuh, Penambilan Data Spasial Wilayah	253.441.600	101.000.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000	APBD													
163	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	104303	00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Pembangunan Baru Rumah Layak Huni pada Kawasan Kumuh Kabupaten								-		210.000.000	210.000.000	210.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kawasan Kumuh Kabupaten Belitong Timur	3 Unit	Rp.70.000.000	Bantuan Rumah	1 kali	



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
		an						(Sepuluh) Ha	(Sepuluh) Ha															
164	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	0	0	2	00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni		3.278.198.200	6.784.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	APBD	Tidak berkelanjutan	Kabupaten Belitong Timur	Tahun 2025 : 70 Unit, Tahun 2026 : 118 Unit, Tahun 2027 -2029 : 250 Unit	Peningkatan Kualitas : Rp.30.000.000		
165	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	0	0	2	00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Melaksanakan gelarpasukan peringatan HUT SATPOL PP dan SATLINMAS		35.246.200	-	35.246.200	35.246.200	35.246.200	APBD						
166	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1	0	0	2	00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan	Melaksanakan patroli gabungan pencegahan gangguan TRANTIBUMLINMAS		92.789.200	-	92.789.200	92.789.200	92.789.200	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
		Serta Perlindungan Masyarakat						(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketertiban Umum																	
167	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	0	0	2	00	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Sosialisasi mengenai kebencanaan dilingkungan sekolah yang diikuti peserta didik dan guru		24.828.800	24.828.800	24.828.800	24.828.800	24.828.800	APBD							
168	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	0	0	2	00	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Melaksanakan penyusunan dokumen KRB mulai dari Tahap Persiapan dan sosialisasi, Tahap Analisis Bahaya, Tahap Analisis Kerentanan, Tahap Analisis Kapasitas, Tahap Analisis Risiko dan Penyusunan Dokumen		399.987.700	-	-	-	-	APBD							
169	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman	1	0	0	2	00	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Identifikasi risiko, analisis risiko, pengembangan strategi mitigasi, pengembangan rencana tanggap		49.130.900	49.130.900	49.130.900	49.130.900	49.130.900	APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
		man Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				Terhadap Bencana		darurat, pelatihan dan simulasi, serta monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan risiko bencana														
170	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	105302	002,00	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Identifikasi kebutuhan, pengadaan peralatan, penyiapan dan pemeliharaan, pelatihan penggunaan peralatan, evaluasi dan pembaruan terkait peralatan dalam sistem penyimpanan		152.627.700	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD							
171	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	105302	0018	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Melakukan simulasi, evakuasi dan evaluasi terkait kesiapsiagaan dan kemampuan Tim klaster dalam menghadapi bencana		19.388.700	19.388.700	19.388.700	19.388.700	19.388.700	APBD							
172	Mengurangi beban	Urusan Pemerintahan	105302	0019	PROGRAM PENANGGU	Pelayanan Pencegahan	Pelatihan Keluarga Tanggap	Peningkatan Kapasitas, kesadaran dan					50.000.000		APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
	pengeluaran masyarakat	ahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					LANGGAN BENCANA	n dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Bencana Alam		keterampilan simulasi dan evakuasi mandiri untuk meminimalkan risiko bencana, pelatihan ini melibatkan kader PPK dan masyarakat														
173	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	0	0	2,00	PROGRAM PENANGGU LANGGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Sosialisasi, edukasi dan simulasi serta tindakan mitigasi, penyusunan tas siaga sampai kepada penguatan lembaga desa/kawasan				50.000.000		APBD								
174	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	0	0	2,00	PROGRAM PENANGGU LANGGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas serta pengembangan sistem untuk Tim Reaksi Cepat (TRC)			79.516.000	79.516.000	79.516.000	79.516.000	79.516.000	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
		at																			
175	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100200	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota			Tahap Persiapan dan inisiasi, Tahap Analisis Risiko, Tahap Pengembangan Rencana, Tahap Pengesahan dan sosialisasi, Tahap Review dan tindaklanjut	-	-	100.000.000	-	-	APBD						
176	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100200	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			Tahap Persiapan dan koordinasi, Tahap Analisis Risiko dan Kebutuhan, Tahap Penyusunan Dokumen, Tahap Ujicoba dan Finalisasi, Sosialisasi dan Penyimpanan	-	-	100.000.000	-	-	APBD						
177	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta	100200	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			Melakukan Koordinasi terkait penyediaan sarana prasarana, pelatihan, simulasi, monitoring dan evaluasi	875.654.600	567.092.290	567.092.290	567.092.290	567.092.290	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan				
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029											
		Perlindungan Masyarakat																										
178	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	0	0	2,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			
									Tahap Persiapan, Pengkajian Risiko Bencana, Perumusan Strategi dan Aksi, Diskusi Publik dan Konsultasi, Penetapan Dokumen																			
179	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	0	0	2,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																			
									Identifikasi kebutuhan, desain pelatihan, penyusunan materi, pemilihan fasilitator, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi tentang pencegahan dan mitigasi bencana																			
180	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan	1	0	0	2,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
									Layanan penanganan bencana terhadap korban terdampak																			



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan				
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029											
		Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																							
181	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	10530200	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota							20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD									
182	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	10530300	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pengadaan dan distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi terhadap Korban Bencana Kabupaten/Kota							115.620.400	150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	Langsung	Kabupaten Belitong Timur	2025= 100 Orang, 2026 = 130 Orang,, 2027= 100 Orang, 2028=100 Orang, 2029=100 Orang	2025= 816.604, 2026=694.630, 2027=800.000, 2028=800.000, 2029=800.000	Belanja Barang untuk diserahkan ke masyarakat korban bencana berupa = beras, biskuit, kornet, gula, ikan kaleng, kopi, mie instans, atap seng, paku,	Saat Tanggap Darurat 1 x 24 jam



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
183	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	105	03	204	0007	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Pelatihan Teknis, Simulasi dan Latihan, Peningkatan Kapasitas aparatus Desa/Kecamatan, Pemanfaatan Peralatan dan Teknologi Kebencanaan			20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD						terpal	
184	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	105	03	204	0008	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota		Pelatihan Penyusunan Jitupasna, Penyusunan R3P, Bintek Manajemen Logistik dan Keuangan, Simulasi Penggunaan Aplikasi Data Bencana			50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD							
185	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta	105	03	204	0010	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Penyusunan R3P, Pemulihan Infrastruktur, Perumahan dan Pemukiman, Pemulihan Ekonomi dan sosial, Koordinasi antar lembaga		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
		Perlindungan Masyarakat																								
186	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	105	03	204	0011	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD							
187	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	105	03	204	0015	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota							50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD							
188	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	105	04	201	0001	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN,	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						-	-	5.000.000	10.000.000	15.000.000	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
		Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			ATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															
189	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100201	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN ATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Melakukan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran	199.205.000	126.432.500	139.076.000	152.985.000	168.282.000	APBD						
190	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan	100201	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAM	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Non Kebakaran			Melakukan penyelamatan dan evakuasi terhadap binatang berbisa, liar, dan berbahaya	-	-	25.000.000	30.000.000	32.000.000	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
		Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					ATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
191	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	0	0	2,	00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, ATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000	25.000.000	30.000.000	APBD							
192	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan	1	0	0	2,	00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAM	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Standarasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan				25.000.000	32.000.000	34.000.000	APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
		Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					ATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Alat Pelindung Diri			pelindung diri													
193	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	0	0	2,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN ATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)			Mengelola sistem komunikasi dan informasi layanan pemadaman kebakaran			-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	APBD					
194	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan	1	0	0	2,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAM	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan			Membuat Dokumen rencana induk sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan			-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	APBD					



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
		Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		ATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Penyelamatan (RISPKP)															
195	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100200	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga		Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran di tingkat rumah tangga			25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD							
196	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan	100200	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAM	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan	Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan					7.000.000	7.000.000	7.000.000	APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
		Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					ATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	(RISPKP)			(RISPKP)													
197	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	0	0	2,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN ATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			Menyelenggarakan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	APBD							
198	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan	1	0	0	2,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAM	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Melakukan sosialisasi terhadap Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	-	-	25.000.000	25.000.000	30.000.000	APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
		Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		ATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota													
19	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1002,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN ATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			Membuat Dokumen pemutakhiran rencana induk sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	APBD						
20	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan	1002,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAM	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Melakukan sosialisasi kepada organisasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran		-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
		Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					ATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																
201	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	0	0	2,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran															
			5	4	04	00			Melakukan Pembinaan relawan pemadam kebakaran pada 39 desa															
202	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	0	0	2,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran															
			5	4	04	00			Melakukan sosialisasi pelatihan keluarga tanggap dan siaga kebakaran di kecamatan manggar															
203	Mengurangi jumlah kantong-kantong-	Urusan Pemerintahan	1	0	0	2,00	PROGRAM PENCEGAHAN,	Pemberdayaan Masyarakat	Pembentukan dan Pembinaan Relawan															
			5	4	04	00			Melakukan sosialisasi kepada organisasi pemuda dalam															



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE			Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
									Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
	kantong kemiskinan	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	t dalam Pencegahan Kebakaran	Pemadam Kebakaran		pencegahan dan penanggulangan kebakaran														
204	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	0	0	2,00	005405	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Pengadaan alat pelindung diri untuk penanganan hewan berbisa		149.944.100	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	APBD					
205	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	0	0	2,00	005406	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Melakukan penyelamatan dan evakuasi terhadap binatang berbisa, liar, dan berbahaya		-	-	25.000.000	30.000.000	32.000.000	APBD					



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
206	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	10620200	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Rapat dan sosialisasi( Monitoring Lapngan)	Mamin Lapangan		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	APBD		Kab. Belitim				
207	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	10620300	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Sosialisasi/Pelatihan PSKS			9.000.000	-	400.000	400.000	400.000	APBD		Kab. Belitim				
208	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	10620304	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Sosialisasi/ Pelatihan PSKS Kelembagaan Masyarakat			-	-	300.000	300.000	300.000	APBD		Kab. Belitim				
209	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	10620310	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan	Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan		- Persiapan Peringatan Upacara Hari Pahlawan - Persiapan Santunan Pada HUT RI dan Hari Pahlawan		-	54.474.900	102.474.900	102.474.900	102.474.900	APBD	Berkelanjutan	Kab. Belitim	2025=14 2026=16 2027=17 2028=17 2029=18	2025=3jt/org 2026=3jt/org 2027=5jt/org 2028=5jt/org 2029=5jt/org	Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga	2 Kali



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
								dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan															Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
210	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	106	02	203	0012	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Rapat Internal dan Penanganan Kasus Sosial Keluarga	Tali asih Anggota LK3	-	14.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000	APBD						
211	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	106	02	203	0014	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		rapat PSM dan Laporan Data Bulanan PSM	Tali Asih PSM	-	57.000.000	489.000.000	489.000.000	489.000.000	APBD						
212	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	106	02	203	0015	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan	Peberian Bantuan kelangsungan hidup dan pemberdayaan ekonomi	Pendataan dan assesment penerima manfaat		-	1.966.000.000	1.028.000.000	1.028.000.000	992.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab. Belitim	2025=0 2026=983 2027=514 2028=514 2029=514	2025= 0 2026= 2jt/ kk 2027=2jt/ kk 2028=2jt/ kk 2029=2jt/ kk	Bantuan kelangsungan 2 juta/kk	1 Kali



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
213	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	106	02	03	00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Ekonomi	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Rakor lintas sektor, Monitoring Lapangan,	SarPras, SPPD Ke Pusat, SK TIM Lintas Sektor, Molin Ke Desa	-	-	242.307.026	242.307.026	342.307.026	APBD		Kab. Belitung					
214	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	106	02	03	00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia	Sosialisasi/Pelatihan Sumber Daya Manusia	Sumber Kesejahteraan Sosial		-	-	300.000	300.000	300.000	APBD		Kab. Belitung	2025=0 2026=0 2027=40 2028=40 2029=40				
215	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	106	04	01	00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan untuk Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			71.630.000	72.046.000	72.046.000	72.046.000	72.046.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Belitung Timur	2025= 150 2026=150 2027=150 2028=150 2029=150	450.000 /Orang		1 Kali	



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
216	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang untuk Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						APBD	Berkelanjutan	Kab Belitung Timur	2025= 120 2026=120 2027=120 2028=120 2029=120	412.400/orang		1 Kali		
217	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2,03	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu untuk Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						APBD	Berkelanjutan	Kab Belitung Timur	2025= 20 2026=27 2027=27 2028=27 2029=27	2000.000/Orang		1 Kali		



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
218	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga untuk Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						APBD	Berkelanjutan	Kab Belitong Timur	2025= 0 2026= 0 2027=7 2028=7 2029=7	1.200.000/Orang		1 Kali		
219	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial untuk Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						APBD		Kab Belitong Timur						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
							Sosial																	
220	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Lanjut Usia Terlantar, serta Pengemis dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		24.786.300	24.786.300	24.786.300	24.786.300	24.786.300	APBD	Berkelanjutan	Kab Belitung Timur	2025= 250 2026= 250 2027=250 2028=250 2029=250				
221	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar untuk Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Belitung Timur	2025= 0 2026= 0 2027=3 2028=3 2029=3				



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
22	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan untuk Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						APBD	Berkelanjutan	Kab Belitong Timur	2025= 0 2026= 0 2027=5 2028=5 2029=5					
23	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan untuk Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						APBD	Berkelanjutan	Kab Belitong Timur	2025= 0 2026= 0 2027=10 2028=10 2029=10					



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
							Sosial																	
224	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Belitung Timur	2025= 0 2026= 0 2027=5 2028=5 2029=5					
225	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan untuk Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Belitung Timur	2025= 0 2026= 0 2027=5 2028=5 2029=5					



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
							Sosial																			
226	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kabupaten/Kota	Memberikan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kabupaten/Kota			1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Belitong Timur	2025= 0 2026= 0 2027=3 2028=3 2029=3							
227	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan						10.290.000	10.290.000	10.290.000	10.290.000	10.290.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Belitong Timur	2025= 10 2026= 10 2027=10 2028=10 2029=10			
22	Mengurangi	Urusan	1	0	0	2,00	PROGRAM	Rehabilitasi	Penyediaan						-	-			APBD	Berkelanjutan	Kab	2025= 0	8000/		1 Kali	



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
8	beban pengeluaran masyarakat	Pemerintahan Bidang Sosial	6	4	02	03	REHABILITASI SOSIAL	i Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Permakanan				400.000	400.000	400.000		tan	Belitong Timur	2026= 0 2027=50 2028=50 2029=50	orang				
229	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang				-	-	200.000	200.000	200.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Belitong Timur	2025= 0 2026= 0 2027=50 2028=50 2029=50	4000/Orang		1 Kali
230	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah	Penyediaan Alat Bantu				-	-	200.000	200.000	200.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Belitong Timur	2025= 0 2026= 0 2027=15 2028=15 2029=15	13.000/orang		1 Kali



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
							Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																		
231	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2	00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti			200.000	200.000	200.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Belitong Timur	2025= 2026= 2027=10 2028=10 2029=10						
232	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1	0	0	2	00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Belitong Timur	2025= 0 2026= 0 2027=5 2028=5 2029=5						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
					Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																
233	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	100200	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Belitong Timur	2025= 7 2026= 7 2027=5 2028=5 2029=5			
234	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	100200	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Pemberian Layanan Rujukan				14.134.000	14.134.000	13.134.000	13.134.000	13.134.000	APBD	Berkelanjutan	Kab Belitong Timur	2025= 5 2026= 5 2027=5 2028=5 2029=5			





**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
	kantong-kantong kemiskinan	ahan Bidang Sosial					AN BENCANA	Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						0				2027=70 2028=70 2029=70							
241	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2	0	0	2,01	00 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro						40.000.000				APBD		Kab. Belitong Timur				
242	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2	0	0	2,03	00 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						35.000.000		33.000.000		APBD		Kab. Belitong Timur				
243	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2	0	0	2,03	00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Melaksanakan Kegiatan Pelatihan dan Keterampilan Kerja						258.000.000	1.070.032.632	1.255.188.151	1.303.856.776		APBD		Kab. Belitong Timur			
244	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2	0	0	2,06	00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan	Koordinasi Antar Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta						52.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000		APBD					



## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE			Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
									Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
						KERJA	si	Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas															
245	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	207	004	2,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten /Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Melaksanakan Unit Layanan Disabilitas							APBD		Kab. Belitong Timur					
246	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	207	004	2,03	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Mengadakan Job Fair							APBD		Kab. Belitong Timur					
247	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	207	005	2,01	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan Pencegahan Perselisihan							APBD							
248	Meningkatkan	Urusan Pemerintahan	207	005	2,02	PROGRAM HUBUNGAN	Pencegahan dan Penyelesaian	Penyelesaian Perselisihan	Melakukan Penyelesaian Perkara Perselisihan							APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan			
											Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029										
	pendapatan masyarakat	ahan Bidang Tenaga Kerja						N INDUSTRIAL	Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok dan Penutupan Hubungan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hubungan Industrial, Mogok dan Penutupan Hubungan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
249	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2	0	0	2	00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Melaksanakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja / Pekebun agar Mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan						339.390.000	339.390.000	339.390.000	339.390.000	339.390.000	APBD		Kab. Belitong Timur	2025 : 1650 Pekerja 2026 : 500 Pekerja 2027 : 500 Pekerja 2028 : 500 Pekerja 2029 : 500 Pekerja	Mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 2 program (kecelakaan kerja dan kematian)	Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan	7 Bulan
250	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan	2	0	0	2	00	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDA	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Rakor, Bimtek/Pelatihan PUG dan Monev Lapangan						14.577.100	14.577.100	49.723.150	54.324.790	60.177.100	APBD		Kab. Belitong Timur				



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
		Perempuan Dan Perlindungan Anak					YAAN PEREMPUN	pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
251	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	208202	00	08	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN	Pemberdayaan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	500.000	1.000.000	500.000	APBD		Kab. Belitim						
252	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	208203	00	07	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenang	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	500.000	4.000.000	500.000	APBD		Kab. Belitim						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
253	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	208	002	001	006	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				60.032.000	60.032.000	60.032.000	60.032.000	60.032.000	APBD		Kab. Belitim						
254	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	208	002	002	008	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan dan Mediasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				136.482.200	136.482.200	136.482.200	136.482.200	136.482.200	APBD		Kab. Belitim						
255	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan	208	003	003	007	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan				-	-	-	-	-									



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE			Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan			
									Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029										
		Perempuan Dan Perlindungan Anak					Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota																		
256	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	208	002	003	006	PROGRAM Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota						48.727.600	48.727.600	48.727.600	48.727.600	83.725.600	APBD	Berkelanjutan	Kab. Belitong	2025= 50 2026= 50 2027=50 2028=50 2029=50			
257	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	208	002	007	007	PROGRAM Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Advokasi dan sosialisasi kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota						69.968.000	69.968.000	69.968.000	69.968.000	69.968.000	APBD		Kab. Belitong				
25	Mengurangi	Urusan	208	002	000	000	PROGRAM	Penyediaan Layanan	Layanan Pengaduan atau										APBD		Kab.					



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
8	beban pengeluaran masyarakat	Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8	7	02	08	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	n Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				150.807.800	150.807.800	150.807.800	150.807.800	150.807.800			Belitim				
259	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2	0	0	2, 00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan sarana pendukung kemandirian pangan				-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD						
260	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2	0	0	2, 00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				-	44.521.600	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE			Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan				
									Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029											
						MASYARAKAT	Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																				
261	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2	0	0	2	00	PROGRAM Peningkatan DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						20.519.000	20.519.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000	APBD						
262	Mengurangi beban pengeluaran	Urusan Pemerintahan	2	0	0	2	00	PROGRAM Peningkatan Keseimbangan	Pengelolaan dan Keseimbangan	Pengadaan Cadangan Pangan						30.172.200	30.172.200	-	-	-	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
	masyarakat	Bidang Pangan					DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	gan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota																
263	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	209	002	0206	00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	penyelenggaraan cadangan pangan	-	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD									
264	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	209	004	0204	00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sosialisasi kegiatan ketahanan pangan	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD									
265	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	209	001	0201	00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	7.632.600	7.632.600	12.000.000	14.000.000	15.000.000	APBD									



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
266	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2102,001501	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan teknis penyimpanan sementara limbah B3		Melaksanakan pembinaan dan pemantauan penyimpanan Limbah B3 melalui kegiatan verifikasi lapangan kepada pelaku usaha, meliputi pemeriksaan kesesuaian fasilitas, prosedur, dan pencatatan Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan, guna mencegah pembuangan Limbah B3 yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.		8.863.200	8.863.200	50.000.000	62.969.314	68.000.000	APBD							
267	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2112,001101	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah kepada masyarakat Kabupaten Belitong Timur melalui kegiatan tatap muka, praktik langsung pemilahan sampah dari sumber, pengomposan sampah organik, dan pengelolaan sampah anorganik bernilai guna, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah		5.994.300	5.994.300	50.000.000	-	APBD	APBD							
26	Mengurangi	Urusan	2112,001101	PROGRAM	Pengelolaan	Penyediaan		Melaksanakan			-		-	APBD								



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
			1	2	3	4				Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
8	jumlah kantong-kantong kemiskinan	Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	1	1	01	07	PENGELOLAN PERSAMPAHAN	n Sampah	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Belitong Timur melalui pengadaan kontainer sampah, tempat sampah terpilah, armada pengangkut, serta peralatan pendukung operasional guna meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan persampahan.		2.160.000		100.000.000		100.000.000									
26	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2	1	1	2,00	PROGRAM PENGELOLAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah		Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala sarana dan prasarana pelayanan persampahan di Kabupaten Belitong Timur melalui kegiatan pemeriksaan, perbaikan, dan penggantian komponen armada pengangkut, kontainer sampah, TPS/TPST, serta peralatan operasional guna menjamin kelancaran, keselamatan, dan kontinuitas pelayanan persampahan		-	-	1.245.998.000	1.245.998.000	1.245.998.000	APBD								
27	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang	2	1	0	2,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas				49.717.300	10.000.000	244.881.407	190.592.879	178.359.418	APBD								



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
		Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																			
271	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2102,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			Pelayanan jemput bola di lapangan			10.000.000	10.000.000		APBD						
272	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2103,01	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			Penerbitan dokumen pencatatan sipil	160.020.700	10.000.000	18.000.000	22.233.461	10.000.000	APBD						
273	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2104,01	PROGRAM PENGELOLAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			kerja sama dengan OPD untuk memanfaatkan data kependudukan			15.000.000			APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
274	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	210200	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		Pembinaan terhadap pelaksanaan administrasi BUM Desa		-	-	70.000.000	40.000.000	40.000.000	APBD						
275	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	210200	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Pembinaan Kader Tim Penggerak PKK Se-Kabupaten Belitong Timur		77.000.000	77.000.000	320.000.000	306.000.000	354.000.000	APBD						





**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan			
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029										
		Keluarga Berencana						si serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota																			
279	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2	1	0	2	00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas						100.800.000	100.800.000	100.800.000	100.800.000	100.800.000	APBD & DAK NON FISIK BOKKB-BOKB						
280	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	1	0	2	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Seperti Lampu PJU, Rambu Lalu Lintas, Marka						1.700.853.000	846.791.000	200.000.000	380.000.000	568.000.000	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
							(LLAJ)																		
281	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	1	0	2	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan															
			5	2	02	03						3.252.446.800	3.852.445.800	3.549.540.000	3.685.040.000	3.817.340.000	APBD								
282	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	1	0	2	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan															
			5	2	02	04						3.252.446.800	3.852.445.800	3.549.540.000	3.685.040.000	3.817.340.000	APBD								
283	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	1	0	2	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)															
			5	2	03	07						-	-	105.000.000	120.000.000	120.000.000	APBD								
284	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	1	0	2	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)															
			5	2	03	11						86.707.400	80.707.400	-	-	-	APBD								
285	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan	2	1	0	2	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyediaan Angkutan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa															
			5	2	09	03						429.730.800	670.502.000	704.492.000	704.992.000	736.492.000	APBD								



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
	kantong kemiskinan	Bidang Perhubungan					LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kecamatan Damar dan Kecamatan Kelapa Kampit														
286	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	1	0	2,	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Dokumen Jaringan Trayek Kabupaten			100.000.000					APBD						
287	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	1	0	2,	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan/atau Barang Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Fasilitas Penunjang Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan/atau Barang Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Penyediaan Data Trayek Angkutan Umum					20.000.000		APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
											Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
								(Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Terintegrasi Secara Elektronik																		
288	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	1	0	2	00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpalan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpalan Lokal			Penyediaan Dokumen Persyaratan Pembangunan Pengumpalan Lokal	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD								
289	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	1	0	2	00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			Penyediaan Dokumen Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD								
290	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	1	0	2	00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			Penyediaan Lampu Penuntun Alur, Pelaksanaan Rehab Kapal dan Pelabuhan, dan Pemeliharaan Ruang Tunggu Pelabuhan	316.577.200	316.577.200	325.000.000	345.232.650	384.558.460	APBD								



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan			
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029										
								Danau																			
291	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	2102	02	01	00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Konten	Advertorial media cetak						122.233.800	125.833.800	25.000.000	25.500.000	26.000.000	APBD		Kabupaten Belitong Timur				
292	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	2103	02	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-governmen di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Penyediaan Akses Internet						127.500.000	294.807.355	25.000.000	30.000.000	35.000.000	APBD		Kabupaten Belitong Timur				
293	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	2103	02	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-governmen di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota							-	-	-	-	-	-						
294	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	2103	02	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-governmen di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan							-	-	-	-	-	-						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
		ka				Kabupaten/Kota	UMKM														
295	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	210300	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-governmen di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital		-													
296	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	210400	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-governmen di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota		-													
297	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	210400	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-governmen di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM		-													
298	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	210300	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-governmen di Lingkup Pemerintah Daerah	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital		-													



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
		ka				Kabupaten /Kota															
29	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	210200	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Kabupaten/Kota		Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi		-	-	150.000.000	169.338.357	175.000.000	APBD						
30	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	210200	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan Anggota Koperasi		-	75.000.000	200.000.000	250.000.000	275.000.000	APBD						
30	Meningkatkan	Urusan Pemerintahan	210200	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Pemberdayaan	Pemberdayaan Melalui		Melaksanakan Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro		32.460.700	-	85.000.000	85.000.000	85.000.000	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
	pendapatan masyarakat	ahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah					YAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kemitraan Usaha Mikro															
302	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	210200	17701	0004	PROGRAM PEMBERDAYAAN YAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Melaksanakan Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	-	-	150.000.000	150.000.000	170.000.000	0	APBD								







**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE					Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
											Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
								dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota																		
308	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	2	1	0	2	00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Survey lapangan terhadap kesesuaian perizinan berusaha		18.237.500	22.950.200	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD							
309	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	2	1	0	2	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota		Pelatihan dan Lomba Wirausaha Muda Pemula		77.604.400	65.987.400	60.500.200	73.450.000	75.250.000	APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE			Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
									Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
							Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota																
310	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	2	1	0	2,00	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota		Penyelenggaraan Kegiatan Sekolah Khusus Olahraga/ Kelompok Berlatih Olahraga		37.631.800	37.631.800	36.500.000	35.000.000	35.000.000	APBD					
311	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	2	1	0	2,00	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,		Pemeliharaan sarana dan Prasarana Olahraga		1.270.519.500	250.036.300	225.000.000	185.000.000	220.000.000	APBD					



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
							n yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																
312	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	2102	02	00	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.065.004.000	300	-	253.550.000	-	APBD									
313	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2202	03	00	PROGRAM PENGEMBA NGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	melaksanakan pelatihan kesenian daerah			-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD	Tentatif	Kabupaten Belitang Timur	2027=20 orang 2028= 20 orang 2029= 20 orang	2027=20 orang/pelatihan 2028= 20 orang/pelatihan 2029= 20 orang/pelatihan	pemberian pelatihan kepada anggota sanggar	1 kali pelaksanaan pelatihan		
314	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2202	03	00	PROGRAM PENGEMBA NGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	melaksanakan pembinaan sanggar kesenian/ lembaga kebudayaan			-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	APBD								
31	Mengurangi	Urusan	2202	02	00	PROGRAM	Pembuday	Pengembangan							APBD									



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
			3	2	0	2				Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
5	jumlah kantong-kantong kemiskinan	Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3	2	02	07	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	aan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bagi Pengelola Perpustakaan Desa		17.914.800	17.000.000	23.000.000	20.000.000	17.000.000								
316	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	2	0	2,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan mobil perpustakaan keliling dan pemeliharaan PC dan AC di ruang pelayanan perpustakaan		13.984.400	-	-	-	-	DAK NON FISIK (2025) / APBD (2026-2029)							
317	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penyelenggaraan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana nelayan seperti Shelter Nelayan		199.700.000	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
							/ Kota																	
318	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Memberikan bantuan berupa sarana penangkapan ikan untuk Nelayan Kecil Seperti Perahu <3 GT, Alat Tangkap Ramah Lingkungan, Mesin kapal, dan Bahan Pembuatan Kapal		1.779.542.700	1.600.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	2.200.000.000	APBD							
319	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Memberikan pelatihan untuk menunjang pengembangan keterampilan Nelayan		-	135.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kabupaten Belitong Timur	2025 : - 2026 : 30 Nelayan 2027 : 50 Nelayan 2028 : 50 Nelayan 2029 : 50 Nelayan	2025 : - 2026 : 135.000 2027 : 250.000 2028 : 300.000 2029 : 300.000	Pelatihan Keterampilan Nelayan	1 Kali dalam 1 Tahun	



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
320	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Memberikan Pendampingan dan pembinaan kepada Kelompok Nelayan				53.985.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kabupaten Belitong Timur	2025 : 10 Kelompok Nelayan 2026 : 12 Kelompok Nelayan 2027 : 14 Kelompok Nelayan 2028 : 16 Kelompok Nelayan 2029 : 18 Kelompok Nelayan	2025 : Kurang Lebih 2.000.000/Kelompok Nelayan 2026 : Kurang Lebih 2.000.000/Kelompok Nelayan 2027 : Kurang Lebih 2.000.000/Kelompok Nelayan 2028 : Kurang Lebih 2.000.000/Kelompok Nelayan 2029 : Kurang Lebih 2.000.000/Kelompok Nelayan	Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Nelayan	6 Kali dalam 1 Tahun (Pembinaan dilakukan selama kurang lebih 6 kali dalam 1 tahun untuk 1 kelompok)
321	Meningkatkan pendapatan	Urusan Pemerintahan	3	2	0	2,00	PROGRAM PENGELOLAAN	Pemberdayaan Nelayan	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan	Memberikan sosialisasi terkait bantuan pendanaan dan				-		50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
	masyarakat	Bidang Kelautan Dan Perikanan					PERIKANAN TANGKAP	Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota	Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		pembiayaan untuk Nelayan Kecil													
322	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Melaksanakan penyusunan SOP Prosedur Penyelenggaraan TPI	-		20.000.000		20.000.000		APBD						
323	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Melaksanakan pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan	-	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		APBD						
324	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Melaksanakan Penyusunan SOP Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	-		20.000.000				APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
							yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota																	
325	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi BPKP Kapal Nelayan	6.381.500	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD							
326	Meningkatkan pendapatan	Urusan Pemerintahan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	Penerbitan Izin Usaha Perikanan	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan	Melaksanakan Penyusunan dan pengarsipan dokumen perizinan	-	-	50.000.000	50.000.000	70.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kabupaten Belitong Timur					



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan				
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029											
	masyarakat	Bidang Kelautan Dan Perikanan					PERIKANAN BUDIDAYA	di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			usaha perikanan budidaya.  Melaksanakan Pengelolaan data dan sistem informasi perizinan perikanan.  Melaksanakan Penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perikanan budidaya.																
327	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelatihan Teknis Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan (Pembuatan Pakan, Kualitas Air, Kesehatan ikan dan Pembenihan Ikan)						7.627.800	7.627.800	40.000.000	40.000.000	60.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kabupaten Belitang Timur	2025 : 5 Kelompok 2026 : 4 Kelompok 2027 : 2 Kelompok 2028 : 2 Kelompok 2029 : 2 Kelompok	2025 : 1.000.000 - 2.000.000 per Kelompok 2026 : 2.000.000 - 4.000.000 per Kelompok 2027 : 3.000.000 -	Pelatihan Teknis, Bimtek untuk Pembudidaya Ikan Lanjutan dilengkapi dengan sarana (Pembenihan Ikan, Alat Kualitas Pembuatan Pakan	April - Oktober Per Siklus Tahunan



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE			Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
									Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
								Lapangan/Demplot Budidaya Ikan Kecil											6.000.000 per Kelompok 2028 : 4.000.000 - 8.000.000 per Kelompok 2029 : 5.000.000 - 10.000.000 per Kelompok	Ikan, dan Pemijahan (Ikan)			
328	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Identifikasi dan verifikasi calon kelompok pembudi daya Koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa Evaluasi kinerja kelembagaan kelompok			20.000.000	25.000.000	35.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kabupaten Belitong Timur	2025 : 20 Kelompok 2026 : 10 Kelompok 2027 : 10 Kelompok 2028 : 10 Kelompok 2029 : 10 Kelompok	2025 : 0 - 500.000 per Kelompok 2026 : 0 - 500.000 per Kelompok 2027 : 0 - 500.000 per Kelompok 2028 : 0 - 500.000	Pendampingan Penerbitan SK dan Peningkatan Kelas Kelompok	Januari - Desember



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE			Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
									Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
329	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Koordinasi dengan lembaga keuangan dan mitra usaha Verifikasi calon penerima bantuan Monitoring pemanfaatan bantuan pendanaan	-	-	30.000.000	30.000.000	50.000.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kabupaten Belitong Timur	2025 : - Kelompok 2026 : 1 Kelompok 2027 : 1 Kelompok 2028 : 1 Kelompok 2029 : 1 Kelompok	2025 : 0 - 500.000 per Kelompok 2026 : 0 - 500.000 per Kelompok 2027 : 0 - 500.000 per Kelompok 2028 : 0 - 500.000 per Kelompok 2029 : 0 - 500.000 per Kelompok	Pendampingan Permohonan Peminjaman Dana Kredit Usaha	Januari - Desember



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan			
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029										
330	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pendampingan teknis usaha budidaya secara berkelanjutan				21.652.400	21.652.400	50.000.000	60.000.000	75.000.000	APBD	Berkelanjutan	Kabupaten Belitong Timur	2025 : 15 Kelompok 2026 : 10 Kelompok 2027 : 6 Kelompok 2028 : 6 Kelompok 2029 : 6 Kelompok	2025 : 1.000.000 - 2026 : 2.000.000 per kelompok 2027 : 2.000.000 - 2028 : 2.000.000 - 2029 : 3.000.000 - 3.000.000 per kelompok 2027 : 2.000.000 - 2028 : 3.000.000 - 2029 : 3.000.000 - 4.000.000 per kelompok 2027 : 2.000.000 - 2028 : 3.000.000 - 2029 : 3.000.000 - 4.000.000 per kelompok	Pelatihan pembudidaya Ikan Pada Tingkat Pemula pelatihan Dasar Pembesaran Pembudidaya Ikan	April - Oktober per Siklus Tahunan	
331	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya	Pemberian Fasilitas Tanda Daftar bagi pembudidaya Ikan kecil				-	-	20.000.000	20.000.000	25.000.000	APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE			Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
									Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
		Kelautan Dan Perikanan				BUDIDAYA	Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
332	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	354	204	001	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								APBD							
								Pendataan pembudidayaan ikan dan unit usaha budidaya Pengumpulan data produksi, sarana prasarana, dan komoditas budidaya Verifikasi dan validasi data pembudidayaan ikan di lapangan Pengolahan dan analisis data pembudidayaan ikan Pemutakhiran database perikanan budidaya daerah Koordinasi dengan penyuluh perikanan dan perangkat daerah terkait		-	-	20.000.000	20.000.000	30.000.000									
333	Meningkatkan pendapatan	Urusan Pemerintahan	354	204	002	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Prasarana Pembudidayaan	Penyediaan Prasarana pendukung budidaya ikan Unit Balai		Pembangunan/rehabilitasi prasarana pendukung budidaya ikan Unit Balai						APBD							
											269.994.200	320.000.000	600.000.000	650.000.000	650.000.000								



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan			
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029										
	masyarakat	Bidang Kelautan Dan Perikanan					PERIKANAN BUDIDAYA	ayaan Ikan	Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Perikanan Budidaya Pendampingan pemanfaatan prasarana budidaya ikan Penyediaan Kebutuhan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dokumentasi dan pelaporan kegiatan																
334	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2,	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan dan penyaluran sarana pembudidayaan ikan kepada pembudi daya Fasilitasi pemanfaatan sarana pembudidayaan ikan Pendampingan penggunaan sarana pembudidayaan ikan		688.091.800	688.091.800	600.000.000	600.000.000	900.000.000	APBD								
335	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2,	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Penyusunan dokumen perencanaan dan peta lahan Administrasi dan pengarsipan data lahan pembudidayaan Dokumentasi dan pelaporan kegiatan		-	-	25.000.000	25.000.000	30.000.000	APBD								
336	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang	3	2	0	2,	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan		Administrasi pengadaan dan serah terima sarana prasarana		-	-	20.000.000	20.000.000	30.000.000	APBD								



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan				
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029											
		Kelautan Dan Perikanan					BUDIDAYA		dan Lingkungan			Penyusunan laporan kegiatan dan pemeliharaan aset  Dokumentasi kegiatan																
337	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		Melaksanakan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan pada Pelaku Usaha di Wilayah Perikanan Kabupaten/Kota			25.000.000	25.000.000	30.000.000	APBD										
338	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Kapal Perikanan yang dirawat		Melaksanakan perawatan kapal pengawas		36.040.000	55.000.000				APBD									



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE			Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
									Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
							Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota																	
339	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota		Melakukan Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan			50.000.000	50.000.000	60.000.000	APBD							
340	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko		9.196.000	120.000.000	1.050.000.000	1.200.000.000	350.000.000	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan				
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029											
341	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						31.260.300	112.000.000	290.000.000	300.000.000	350.000.000	APBD							
342	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						217.633.100	257.600.000	400.000.000	415.000.000	500.000.000	APBD							
343	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Bantuan berupa peralatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan						320.962.000	93.500.000	390.000.000	400.000.000	550.000.000	Dana Insentif Fiskal	Berkelanjutan	Kab. Belitong Timur	2025 = 43 Pelaku Usaha 2026 = 50 Pelaku Usaha 2027 = 51 Pelaku Usaha 2028 = 51 Pelaku	2025 : Rp2.000.000 sd Rp8.000.000 / pelaku 2026 : Rp2.000.000 sd Rp8.000.000	Chest Freezer, Cool Box, Food Processor, Wajan, Vacuum Sealer, Hand Sealer, Kompor,	1 Tahun 1 Kali (triwulan IV)



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE			Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
									Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
							Daerah Kabupaten / Kota												Usaha 2029 = 52 Pelaku Usaha	.000 / pelaku usaha 2027 : Rp2.000.000 sd Rp8.000.000 / pelaku usaha 2028 : Rp2.000.000 sd Rp8.000.000 / pelaku usaha 2029 : Rp2.000.000 sd Rp8.000.000 / pelaku usaha	Showcase, Dandang		
344	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	2	0	2,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan destinasi pariwisata kabupaten	-	-	-	94.036.779	-	APBD							
345	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	2	0	2,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	melakukan pengembangan destinasi pariwisata sesuai tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	28.173.200	-	296.630.330	322.046.513	310.036.901	APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan	
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029								
346	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	2	0	2	00	PROGRAM Peningkatan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di destinasi wisata		454.542.100	404.542.100	408.369.670	408.360.000	408.360.000	APBD							
347	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	melaksanakan pembinaan ke masyarakat pelaku pariwisata		-	75.540.600	-	90.000.000	-	APBD	tentatif	Kabupaten Belitong Timur	2026=20 orang 2028=20 orang	2026=20 orang/kegiatan 2028=20 orang/kegiatan	pemberian pelatihan kepada anggota Pokdarwis	1 kali pelaksanaan pelatihan	
348	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD							



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
							Dasar																	
349	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	2	0	2	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan ekonomi kreatif							APBD	tentatif	Kabupaten Belitong Timur	2026=20 orang 2027=40 orang 2028=40 orang 2029=40 orang	2026=20 orang/kegiatan 2027=40 orang/pelatihan 2028=40 orang/pelatihan 2029=40 orang/pelatihan	pemberian pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif	1 kali pelaksanaan pelatihan
350	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3	2	0	2	00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengadaan sarana pendukung pertanian	846.155.000	931.332.056	3.177.179.560	4.207.143.200	4.542.351.040	APBD							
351	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3	2	0	2	00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Penyediaan benih sawit		696.000.000	978.000.000	850.000.000	1.100.000.000	APBD							
352	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3	2	0	2	00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Penyediaan HPT, bahan pakan/pakan				33.000.000	35.000.000	38.000.000	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE			Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
									Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
						PERTANIAN	Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota																
353	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3	2	0	2,00	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan benih/bibit ternak	-	305.970.000	255.820.000	320.000.000	326.000.000	APBD						
354	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3	2	0	2,00	08	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	-	-	500.000.000	750.000.000	300.000.000	APBD						
355	Mengurangi jumlah	Urusan Pemerintahan	3	2	0	2,00	09	PROGRAM PENYEDIAAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Kegiatan Pembangunan,	-	2.500.000	1.000.000.0	-	-	APBD						



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan												
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029																			
	kantong-kantong kemiskinan	ahan Bidang Pertanian					PROGRAM DAN PENGEMBA NGAN PRASARAN A PERTANIAN	Prasarana Pertanian	Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			00																								
356	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3	2	0	2	00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARAN A PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan						120.000.000	150.000.000	150.000.000	0	APBD																
357	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3	2	0	2	00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa										6.300.000	6.300.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	APBD										
358	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3	2	0	2	00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa										2.250.000	2.250.000	200.000.000	250.000.000	150.000.000	0	APBD										
359	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3	2	0	2	00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																150.000.000	200.000.000	200.000.000	0	APBD						
360	Meningkatkan pendapatan	Urusan Pemerintahan	3	2	0	2	00	PROGRAM PENYULUHAN	Pelaksanaan Penyuluhan	Pembentukan dan Penyelenggaraan																		100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	APBD				



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan		
										Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029									
	masyarakat	Bidang Pertanian					PERTANIAN	n Pertanian	Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			sekolah lapang kelompok tani														
361	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Sekretariat Daerah	401	002	001	00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Bimbingan Teknis Asistensi Penyusunan Naskah Dinas Bagi BUMD	39.425.600	39.425.600	39.425.600	69.425.600	69.425.600	APBD	Tidak berkelanjutan	Kecamatan Manggar	10 orang		Bimbingan Teknis terkait produk hukum dan Pengadaan barang/jasa BUMD	2 kali		
362	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Sekretariat Daerah	401	002	002	00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Operasi Pasar Murah	44.711.600	44.711.600	44.711.600	74.711.600	94.711.600	APBD	Tidak Berkelanjutan	7 Kecamatan	100000		Menjual Komoditas dengan Harga di bawah Harga Pasar	59 kali		
363	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Sekretariat Daerah	401	002	003	00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			Sekolah Pasar Modal bagi ASN dan Siswa SMA/SMK	4.500.000	4.500.000	4.500.000	14.500.000	14.500.000	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kecamatan Manggar	600 orang		Mengadakan Literasi Keuangan Sekolah Pasar Modal	4 kali		
364	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	Keuangan	502	002	004	00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Melaksanakan Penyaluran Dana Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan tepat waktu diperuntukan penurunan tingkat kemiskinan	87.501.904.000	79.645.045.900	89.070.000.000	90.070.000.000	90.075.000.000	APBD dan Dana Desa								
36	Mengurangi	Kecamatan	700	002	000	00	PROGRAM	Koordinasi	Peningkatan			Kegiatan PKK untuk						APBD								



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE				Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
			1	3	01	03				Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
5	jumlah kantong-kantong kemiskinan	n Manggar	1	3	01	03	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Desa Masyarakat di Wilayah Kecamatan			pengentasan kemiskinan berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan keterampilan, dan ketahanan pangan melalui 10 Program Pokok PKK. Program unggulan meliputi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), pemanfaatan pekarangan (Aku Hatinya PKK), pelatihan womenpreneur, serta pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem (Kikis).	52.322.400	52.322.400	420.393.000	490.533.500	490.533.500								
36	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Kecamatan Damar	7	0	0	2,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kegiatan PKK untuk pengentasan kemiskinan berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan keterampilan, dan ketahanan pangan melalui 10 Program Pokok PKK. Program unggulan meliputi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), pemanfaatan	5.400.000	6.000.000	330.000.000	330.000.000	380.000.000								



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
367	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Kecamatan Simpang Renggang	7010200	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			pekarangan (Aku Hatinya PKK), pelatihan womenpreneur, serta pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem (Kikis).	52.322.400	552.322.400	42.039.300	490.533.500	490.533.500	APBD						
368	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Kecamatan Dendang	7010200	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kegiatan PKK untuk pengentasan kemiskinan berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan keterampilan, dan ketahanan pangan melalui 10 Program Pokok PKK. Program unggulan meliputi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), pemanfaatan pekarangan (Aku Hatinya PKK), pelatihan womenpreneur, serta pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem (Kikis).	43.000.000	85.632.100	500.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD						





**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE			Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
									Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
370	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Kecamatan Kelampayan	7	0	2	00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							APBD							
			1	0	01	03				kemiskinan ekstrem (Kikis). Kegiatan PKK untuk pengentasan kemiskinan berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan keterampilan, dan ketahanan pangan melalui 10 Program Pokok PKK. Program unggulan meliputi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), pemanfaatan pekarangan (Aku Hatinya PKK), pelatihan womenpreneur, serta pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem (Kikis).	29.603.000	47.200.000	460.000.000	470.000.000	480.000.000								
371	Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan	Kecamatan Simpang Pesak	7	1	2	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						APBD								
			1	3	01	03				Kegiatan PKK untuk pengentasan kemiskinan berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan keterampilan, dan ketahanan pangan melalui 10 Program Pokok PKK. Program unggulan meliputi Usaha Peningkatan	72.150.000	67.740.600	26.400.000	650.000.000	653.000.000								



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian bantuan
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
									Pendapatan Keluarga (UP2K), pemanfaatan pekarangan (Aku Hatinya PKK), pelatihan womenpreneur, serta pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem (Kikis).												

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 -2029**

No	Strategi OPPKPE	Perangkat Daerah/ Urusan	KODE	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Aktivitas Real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat Bantuan	Lokasi	Jumlah sasaran Penerima manfaat	Besaran manfaat
							Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029					
									Pendapatan Keluarga (UP2K), pemanfaatan pekarangan (Aku Hatinya PKK), pelatihan womenpreneur, serta pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem (Kikis).										

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.  
NIP.19710602 200604 1 005